Partai Nasional Indonesia.

NASKAH AZASI
P. N. I.

Diterbitkan Oleh :
DEP PEN PROP DPP PNI

Kata Pengantar

Pasal 28 Anggaran Dasar P.N.I menetapkan, bahwa Partai mempunjai berbagai matjam naskah Azasi. Dan Dewan Pimpinan Pusat P.N.I, sedjak Kongres Persatuan—Kesatuan di Bandung pada bulan April 1966 sampai Kongres ke XII pada bulan April 1970 telah berhasil menjelesaikan tiga matjam naskah Azasi jang ditentukan dalam Pasal 28 Anggaran Dasar tersebut, jaitah Yudya—Pratidina Marhaenis sebagai perumusan tentang Marhaenisme, Keterangan Azas dan Paksha-Adhigama sebagai Haluan politik Partai.

Ketiga dokumen jang tertjantum dalam risalah ini dilengkapi dengan tjeramah Ketua Umum P.N.I Bapak Osa Maliki mengenai Marhaenisme,

Diharapkan dengan naskah-naskah azasi jang sudah ada ini seluruh warga-besar P.N.I dan masjarakat sudah dapat mempunjai pegangan mengenai masalah-masalah pokok tentang P.N.I, beserta dengan perdjuangannja.

Djakarta, 2 Djanuari 1970,—

Dewan Pimpinan Pusat P.N.I.
Dep, Penerangan-Propaganda.

Ketua,

(MH. ISNAENI)

YUDYA — PRATIDINA — MARHAENIS — RAKJAT MARHAEN/MARHAENIS
atau
BERDJUANG TERUS — MANGGALA
(m u k a d i m a h)

Bahwasanja perdjuangan untuk menjelesaikan Revolusi Indonesia dan membela kepentingan Rakjat Marhaen serta menentang musuh-musuhnja jaitu: Kapitalisme, Imperialisme, Kolonialisme, Neo-kolonialisme, Feodalisme; Diktatur dalam segala bentuk dan manifestasinja serta Kekuatan-kekuatan Kontra revolusi anti-Pantjasila dan kemudian untuk menjusun Masjarakat Adil-makmur adalah suatu perdjuangan jang sutji dan mulia.

Setelah menarik peladjaran dari Sedjarah-revolusi Indonesia jang disamping adanja hasil-hasil gemilang, memiliki pula lembaran-lembaran hitam jang berbentuk pemberontakan2 dan gerakan2 Kontra-revolusi lainnja jang didalangi oleh Kekuatan/kekuatan subversib-asing chususnja setelah mempeladjari konstelasi politik, — ekonomi, — sosial dan mental-budaja-keagamaan sesudah timbulnja peristiwa Kontra-revolusi G—30—S/PKI, maka PNI & Organisasi Massa Marhaen mengkonstatir berlangsungnja kemerosotan dibidang politik, — ekonomi, — sosial dan mental — budaja — keagamaan jang tidak dapat dibiarkan.

Maka telalah saatnja bagi Rakjat Marhaen/Marhaenis untuk serentak meningkatkan kesadaran dan daja-djuangnja serta memperkuat-susunan barisannja dalam wadah PNI & Organisasi Massa Marhaen sebagai wadah persatuan/kesatuan Rakjat Marhaen /Marhaenis untuk dimanfaatkan sebagai alat revolusi jang bertanggung djawab guna melandjutkan perdjuangan mengemban — AMANAT PENDERITAAN RAKJAT — demi suksesnja djalannja Revolusi Pantjasila jang tudjuannja dituangkan dalam — TIGA KERANGKA TUDJUAN POKOK REVOLUSI INDONESIA.

Untuk mensukseskan perdjuangan termaksud diatas, maka mutlak perlu adanja satu barisan kaum (warga) Marhaen & Marhaenis jang kompak dinamis, militant, radikal-progressip - revolusioner dan berdisiplin.

Partai Nasional Indonesia dengan segenap Organisasi Massa Marhaen adalah alat kaum Marhaen/Marhaenis untuk memperdjuangkan dan merealisasikan tjita2nja, jaitu tegaknja Negara Republik Indonesia, Kesatuan Pantjasila, berwilajah dari Sabang sampai Sukarnapura, Masjarakat Adil-makmur dan Dunia Baru.

Dalam rangka menegakkan dan membina ORDE—BARU, PNI & Organisasi2 Massa Marhaen berkewadjiban mengisi dan membina Tata-kehidupan Demokrasi Politik jang berinti-sarika-n Kerakjatan jang dipimpin oleh Hikmah Kebidjaksanaan Permusjawaratan/Perwakilan jang melempar djauh-djauh sistim Demokrasi Liberal serta membina sistim Demokrasi Ekonomi, Demokrasi Sosial dan Tata-kehidupan budaja keagamaan sesuai dengan Pantjasila, Undang-Undang Dasar 1945 setjara murni dan konsekwen serta Keputusan-keputusan Sidang Umum ke-IV MPRS tahun 1966.

Perdjuangan untuk mensukseskan tjita2 Revolusi kita itu tidak dapat dilakukan oleh s a t u golongan sadja, namun harus dilakukan bersama-sama dengan segenap Kekuatan progressip-revolusioner Pantjasila jang kompak dalam rangka pembinaan — KERUKUNAN NASIONAL —

Djelaslah kiranja, bahwa gagasan — KERUKUNAN NASIONAL — dengan sen

dirinja berwatak a n t i G.30.S/PKI dan anti Kekuatan2 Kontra revolusi lainnja.

PNI jang lahir pada tanggal 4 Djuli 1927 telah memberikan pembuktian-sedjarah mengenai perdjuangannja menentang sistim Kapitalisme, Feodalisme, dan Kolonialisme Belanda.

Demikian pula PNI (Partai Nasional Indonesia) — sebelum dan sesudah Kemerdekaan Indonesia — telah memberikan pembuktian—sedjarah mengenai perdjuangannja untuk meningkatkan deradjat dan tingkatan hidup Rakjat Marhaen jang telah dimelaratkan oleh sistim-sistim termaksud diatas.

MARHAENISME jang ditjetuskan pada tahun 1927 bersamaan dengan berdirinja PNI sebagai alat perdjuangannja ternjata merupakan azas dan tjara perdjuangan jang ampuh dan competen untuk dipergunakan sebagai landasan idiil-historis guna mensukseskan Revolusi Pantjasila termaksud diatas karena Adjaran Marhaenisme itu lahir sebagai hasil penarikan peladjaran jang tepat dari praktek perdjuangan Rakjat Indonesia melawan sistim pendjadjah-Belanda.

PANTJASILA jang lahir pada tanggal 1 Djuni 1945 jang akan mendjadi dasar/falsafah Negara serta doktrin Revolusi, merupakan pantjaran dari Marhaenisme sebagai azas dan tjara perdjuangan PNI, hal mana ditjatat setjara historis dalam pidato Lahirnja Pantjasila.

PNI & Organisasi Massa Marhaen jakin sejakin2nja, bahwa Pantjasila merupakan satu2nja dasar dan falsafah Negara jang mendjamin tertjapainja perdjuangan mengemban AMPERA, mendjamin kokoh-kuat-sentausanja persatuan/kesatuan Bangsa Indonesia, mendjamin tegaknja Negara Kesatuan Republik Indonesia Pantjasila berwilajah dari Sabang sampai Sukarnapura, serta mendjamin terwudjudnja Masjarakat Adil-makmur dan Dunia-Baru.

Maka dari itu PNI & Organisasi Massa Marhaen menentang sekeras2nja setiap usaha dari manapun datangnja dan bagaimana pun bentuk dan tjoraknja jang akan mengkaburkan dan mengingkari Pantjasila tsb.

Mengenai tjara perdjuangan, PNI & Organisasi Massa Marhaen berpendirian bahwa: tidak ada gerakan revolusioner tanpa didasari oleh Teori Perdjuangan jang revolusioner.

Marhaenisme adalah suatu teori dan tjara perdjuangan jang revolusioner jang berarti sarikan mendjebol Sistim/Orde Lama jaitu sistim Kapitalisme, Imperialisme, Kolonialisme, Neo-kolonialisme dan Feodalisme jang bermanifestasikan dalam sistim Liberalisme disegala bidang serta penjelewengan2 terhadap Pantjasila dan Undang2 Dasar 1945, untuk membangus sistim/Orde Baru jaitu sistim Demokrasi Pantjasila dan a n t i Kekuatan-kekuatan Kontra revolusi menjusun Masjarakat Marhaenis, jaitu Masjarakat Sosialis Indonesia berdasarkan Pantjasila.

PNI & Organisasi Massa Marhaen berpendirian bahwa — dalam menggunakan tjara perdjuangan termaksud diatas — PNI & Organisasi Massa Marhaen selalu akan berpidjak pada moral-as-perdjuangan Pantjasila jang dengan sendirinja berlandaskan adjaran-adjaran Agama.

Untuk mensukseskan perdjuangannja sebagaimana dilukiskan diatas, maka PNI (Partai Nasional Indonesia) — sebagai alat perdjuangan Rakjat Marhaen dan sekaligus sebagai alat-revolusi jang dibenarkan oleh ketentuan hak azasi dalam Pasal 28 UUD 1945 — harus kuat.

Akan tetapi perlu dikonstatir sebagai kenjataan bahwa dewasa ini PNI & Organi

sasi Massa Marhaen sedang berada dalam taraf rehabilitasi dan konsolidasi sesudah dilanda oleh bahaja pemetjahan setjara menjeluruh jang disebabkan oleh karena ke salahan kebidjaksanaan politik/organisasoris pada masa proloog dan epiloognja G.30S/ PKI.

Segenap warga PNI & Organisasi Massa Marhaen mengutjap sjukur kehadlirat Tuhan Jang Maha Esa jang oleh Rachmat Nja dapat ditjegah kehantjuran total PNI & Organisasi Massa Marhaen dengan dapat diusahakan/diprakarsainja usaha pemersatuan oleh kekuatan2, baik dari dalam tubuh PNI & Organisasi Massa Marhaen sendiri jang menjadari hakekat kemurnian Marhaenisme sebagai adjaran Persatuan, maupun oleh kekuatan2 Pantjasilais diluar PNI & Organisasi Massa Marhaen jang menganggap penting-perlunja persatuan/kesatuan PNI & Organisasi Massa Marhaen.

Berhubung dengan hal2 termaksud diatas, maka djelaslah kiranja bahwa potensi PNI & Organisasi Massa Marhaen jang diharapkan mendjadi faktor stabilisasi politik, terutama sesudah hantjurnja PKI dan Ormas2nja belum mentjapai tingkatan maksimal sebagaimana diperlukan untuk menunaikan tugas2 sebagaimana digambarkan diatas.

Terdorong oleh rasa tanggung-djawab jang tinggi jang ditimbulkan oleh kesadaran sedjarah dan tuntutan2 Revolusi Pantjasila dan terdorong oleh tuntutan Hati-nurani Rakjat Marhaen untuk menegakkan Kebenaran dan Keadilan didalam rangka merealisasi sistim politik — Ekonomi dan — sosial budaja — keagamaan sesuai dengan Pantjasila, Undang2 Dasar 1945 dan Keputusan2 Sidang Umum ke IV MPRS tahun 1966, maka :

Dengan RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA lahirlah didalam Sidang Madjelis Permusjawaratan Partai PNI Pertama jang berlangsung dari tanggal 28 s/d 30 Nopember 1966 di Djakarta, suatu manifestasi Tekad Perdjuangan dengan nama: "YUDYA PRATIDINA MARHAENIS" untuk menegakkan kembali PNI (Partai Nasional Indonesia) sebagai alas-revolusi jang mengamalkan Marhaenisme/Pantjasila bagi kepentingan Revolusi dan kepentingan Rakjat Marhaen.

YUDYA PRATIDINA MARHAENIS

berarti : Tekad Marhaen's untuk "Berdjuang terus setiap hari, setiap detik, tanpa berhenti dan tidak mandeg" dalam melaksanakan dan mengamalkan Marhaenisme / Pantjasila bagi Revolusi Pantjasila sebagai jang diamanatkan dalam AMANAT PENDERITAAN RAKJAT.

Pengamalan ini dituangkan dalam POLA PEMBANGUNAN PARTAI sebagai berikut :

I

PEMBINAAN IDEOLOGIS

1. Untuk kesatuan gerak dan kesatuan tindak, maka dibidang ideologis PNI & Organisasi Massa Marhaen harus memiliki kesatuan afsiran dan kesatuan rumusan ideologi Marhaenisme.

2. Mengingat sedjarah pertumbuhan rumusannja, maka rumusan Marhaenisme ini lebih dititik beratkan kepada Bumi Masjarakat, Sedjarah serta Kepribadian Bangsa Indonesia dari mana Adjaran2 itu digali.

Demi kesatuan rumus ini, maka ditetapkan perumusan sebagai berikut :

MARHAENISME adalah :

Ketuhanan Jang Maha Esa, Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi; jang berarti sama dengan PANTJA SILA.

3. Pembinaan dan Pengembangan Adjaran Marhaenisme dilakukan oleh Lembaga Pembina Marhaenisme.

4. PNI & Organisasi Massa Marhaen berkewadjiban menanamkan kejakinan tentang kebenaran Marhaenisme/Pantjasila kepada setiap warga dan simpatisan PNI & Organisasi Massa Marhaen dan menjebarluaskan pengertian serta tafsiran itu kepada Masjarakat dengan lisan, tulisan maupun perbuatan.

5. PNI & Organisasi Massa Marhaen berkewadjiban untuk mentjegah dan membantah usaha2 jang dengan sengadja ataupun tidak mengandung maksud mengadakan dan/atau menjebar-luaskan **tafsiran2 jang salah.**

II

POLA REHABILITASI, KONSOLIDASI DAN PEMBANGUNAN PARTAI DIBIDANG ORGANISASI

1. Partai Nasional Indonesia dan segenap Organisasi Massa Marhaen dari Pusat sampai tingkat daerah2 harus segera dikonsolidasikan dan dibangun serempak, sehingga memiliki kembali kemampuan, militansi, kelintjahan dan daja-kerdja serta daja-djuang jang tjukup untuk menunaikan tugasnja jang berat, simultan dan multikompleks itu.

2. Konsolidasi dan Pembangunan Partai & Organisasi Massa Marhaen berarti menjempurnakan Susunan Pengurus dan /atau peningkatan kepemimpinan setjara kolektif sebagai Partai Rakjat jang berpandangan djauh kedepan (= historis - bewust) berdjiwa radikal-progressip-revolusioner, berkewibawaan sesuai dengan kondisi dan situasi-politik dewasa ini serta jang mempunjai waktu dan tenaga untuk senantiasa memikirkan kepentingan kaum Marhaen.

3. Penjusunan Massa Marhaen dalam satu barisan Kaum Marhaen & Marhaenis, jang teratur, bersatu kokoh, kuat dinamis, militant, radikal-progressip - revolusioner dan berdisiplin terhadap garis Kepemimpinan Partai Organisasi Massa Marhaen.

4. Kewadjiban bagi setiap wagra dan petugas **Partai/Organisasi Massa Marhaen untuk membantu perdjuangan Marhaen** ialah membadjakan diri dan dapat mendidik dirinja dalam teori dan **praktek** perdjuangan untuk dapat **mendjadi seorang MARHAENIS jang BAIK jang berwatak luhur berfikir sehat, berbuat selalu mendjadi tjontoh jang baik,**

5. Perobahan tjara kerdja dibidang Organisasi hingga mendjadi tjara jang tepat, **tjepat, tegas dan lintjah dengan meninggalkan djauh djauh penjakit birokrasi**

6. **Menumbuhkan kader2 /aktivitas sebaguna dan kader kader/ aktivitas chusus jang berdisiplin,**

7. Penjempurnaan administrasi serta mempersiapkan logistik bagi kepentingan perdjuangan **dan pemilihan umum,**

III

PENGAMALAN MARHAENISME PANTJASILA SEBAGAI PENGABDIAN LANGSUNG UNTUK MASJARAKAT DAN RAKJAT

Marhaenisme tidak hanja menuntut adanja pengetahuan tentang teori perdjuangan akan tetapi mengharuskan adanja penge'rapan teori itu dalam praktek perdjuangan dan praktek kehidupan se hari2 Sebab teori anpa praktek adalah "mati" dan praktek tanpa teori tanpa arah/tanpa tudjuan"

1, Peningkatan aktivitas dalam Pertjaturan Politik:

a. Untuk menundjukkan kemampuan PNI/Organisasi Massa Marhaenis dibidang konsepsionil, maka segenap petugas PNI/Organisasi Massa Marhaen dibidang legislatip di Front Pantjasila dipusat maupun di daerah2 harus lebih digiatkan lagi dalam penunaian tugasnja, sehingga dapat diprakarsi karya2 dan konsepsi2 dibidang politik, ekonomi; dan sosial budaja keagamaan,

b, Demikian pula pertjaturan politik didalam Masjarakat harus ditangani setjara lintjah, tegas tapi bidjaksana
Mass media kita harus merupakan alat untuk menjuarakan garis garis politik Partai, alat pendidikan dan mendjadi obor untuk menjinarkan gagasan2 jang konstruktif untuk mensukseskan Revolusi,

2 Hubungan Partai dengan Fungsionalis Politik ;
Dalam hubungan dangan Pemerintah dan fungsionaris fungsionalis Politik lainnja, dipusat maupun didaerah PNI & Organisasi Massa Marhaen bersikap korektif konstruktif,

3, Peningkatan dalam usaha pelaksanaan Kerukunan nasional :

a. Didalam hubungan kerdjasama dengan kekuatan2 Pantjasilais lainnja PNI & Organisasi massa Marhaen harus dapat memanifestasikan usaha pemupukan dari segenap kekuatan jang Progresif revolusioner Pantjasilais untuk mentjiptakan KERUKUNAN NASIONAL sebagai sjarat mutlak bagi terwudjudnja stabilisasi politik,

b, Adjakan untuk bekerdja sama bukanlah berarti meninggalkan rasa harga diri Aksi aksi kekerasan jang sengadja ditudjukan untuk menghantjurkan PNI&Organisasi Massa Marhaen Marhaenisme Pantjasila harus dihadapi setjara wadjar dan setimpal

4, Peningkatan Operasi di Masjarakat:
Dalam mengadakan operasi langsung di Masjarakat sebagai amal dan dharma bahkti untuk kepentingan Rakjat PNI & Orgnisasi Massa Marhaen harus memiliki djuga petugas petugas jang militant dan dapat berfikir dan bertindak pramatis praktis dipelbagai bidang.

a. Ekonomi, al :

!Untuk dapat memperhebat kooperasi meningkatkan produksi menjempurnakan distribusi, transmigrasi, infrastruktur land reform irrigasi dll.

b, Pendidikan — Sosial al ;
Pendirian sekolah sekolah Balai kesehatan2 Balai Kesedjahteraan2 Ibu dan Anak Desa Pantjasila Lembaga Social Desa Pembinaan Perburuhan/Tani Mahasiswa peladjar dsb.

c. Mental Budaja Keagamaan al:
Mendirikan Mesdjid geredja Pura atau tempat Peribadahan dan Pengadjian menumbuhkan daja kreasi dalam bidang Kesenian/Kebudajaan, mendorong aktivitas dsb — dsb.

PLAINING DALAM PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan semua rentjana ini hendaknja diperintji dan dilaksanakan setjara sistematis menurut tahapan tahapan jang akan ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat PNI atau instansi instansi Partai/ Organisasi Massa Marhaen didaerah daerah sesuai dengan kondisi dan situasi pusat /regional.

2. Pertahapan dan Perintjian termasuk dialas diserahkan kepada instansi Partai Organisasi Massa Marhaen baik dipusat maupun diderah.

3. Pelaksanaan rentjana tahap Pertama harus dapat diselesaikan pada saat saat mendjelang dilaksanakannja Pemilihan Umum (5 Djuli 1968) hal mana merupakan tonggak sedjarah (— mijlpaal) dalam proses perdjuangan PNI & Organisasi2 Massa Marhaen setjara menjeluruh

Djakarta 30 Nopember 1966

MADJELIS PERMUSJAWARATAN PARTAI
PARTAI NASIONAL INDONESIA
Pimpinan Sidang

Ketua Umum	Sek Djen I
t d	t/d
(Osa Maliki)	(Usep Ranawidjaja)

BINA DHARMA
(PROGRAM KERDJA)

PENDAHULUAN

Didalam periode tahun 1967 dan thn 1968 ini PARTAI NASIONAL INDONESIA terutama sedjak berachirnja Sidang ke—II MPP PNI jang diselenggarakan dari tanggal 23 s/d 25 Djuli 1967 di Djakarta sebagaj suatu Partai Politik dan segenap Ormas2nja baik jang dipusat maupun jang di Daerah tela digembleng dalam suatu rentetan gelombang pasang surutnja hantaman rongrongan dansegala matjam usaha usaha dengan tudjuan hendak menghantjurkan PNI, Insja Allah senantiasa berkat lindungan dari Tuhan Jang Maha Esa dan berkat perdjuangan jg ulet, militant dan tidak mengenal patah semangat, oleh Pimpinan Partai dan masa anggota, lahirlah semangat pembaharuan jg ditjetuskan oleh adanja Kebulatan Tekad DPP PNI & Ormas2 PNI tanggal 20 Desember 1967, jang disusul kemudian dengan surat Penegasan dan Hak Hidup PNI dari Presiden dan Instruksi No 16 Th 1967 jang kesemuanja itu lahir dalam suatu proses sedjarah jang sungguh sungguh mengharukan Terharu karena PNI dengan segenap massa Marhaen mulai melepaskan diri dari lingkungan maut.

Hampir2 kita tidak dapat lagi berkumpul Bertemu muka, berdialoog dan menjeragamkan pendapat seperti jang saat ini kita lakukan seandainja semangat pembaharuan itu tidak terlahirkan, Marilah kita bersjukur dan memandjat do'a kehadirat Tuhan Jang Maha Esa jang telah memberikan ini semua dan segala-galanja. Didalam periode jang gelap gulita itu, dalam suasana keprihatinan dan ketjemasan jang bergelut, serta kehawatiran jang tak hentinja, kita masih dapat meneguhkan iman, tenang dan bersikap dewasa. Didalam hubungan jang demikian itulah, pengalaman menundjukkan kepada kita agar supaja dimasa datang, kita lebih meningkatkan perdjuangan, disiplin, kompak, bulat bersatu padu, menjatukan semangat, perasaan dan fikiran untuk terus menerus menjumbangkan amal dan dharma bakti kita kepada masjarakat, bangsa dan Negara. Inilah fase jang akan ditondjolkan didalam situasi dewasa ini hingga penunaian tugas akan lebih dirasakan setjara njata, oleh Rakjat banjak.

Maka dari itu Dewan Pimpinan Pusat PARTAI NASIONAL INDONESIA, telah berketetapan hati dan dengan sungguh2 meletakkan harapan dan perhatiannja setjara serius dalam masalah ini. Adalah mendjadi harapan kita semua dan demikian djuga jang dikandung dan ditunggu oleh seluruh Warga PNI & Ormas2nja, bahwa kita benar-benar dapat berbuat dalam berbagai usaha untuk meringankan penderitaan Rakjat. Mudah2an Sidang jang terhormat ini menarik perhatian ini kami selaku pimpinan Departemen Organsasi DPP-PNI jang ditundjuk untuk memberikan laporan mengenai bidang dan tugas2 jang mendjadi kewadjiban kami sebagaimana adanja.

Mengenai uraian setjara menjeluruh Saudara dapat mengikuti didalam halaman berikutnja.

Demikianlah untuk mendapatkan perhatian Saudara.

Selamat bekerdja dan berdjuang terus.

I. PROSES POLITIK ORGANISATORIS JANG DIHADAPI PNI.

Semendjak berachirnja sidang ke-II

Madjelis Permusjawaratan Partai (MPP) PNI pada tanggal 29 Djuli — 1967 — dimana hasil Keputusannja djuga setelah di sampaikan kepada Saudara — maka didalam penunaian tugas2 jang berikutnja, Dewan Pimpinan Pusat PARTAI NASIONAL INDONESIA setjara marathon bersama-sama dengan Ormas2 PNI dipusat dan daerah, diseluruh tanah air, kita dihadapkan kepada suatu keadaan jang njata2 tjukup mendjadikan situasi jang sangat prihatin. Situasi di beberapa daerah dalam hubungan dengan perkembangan Partai sangat mengchawatirkan, karena djustru oleh keadaan jang tidak dapat dihindarkan pada saat itu kita telah dipaksakan untuk terdjun didalam suatu gelanggang pertjaturan politik jang sangat gawat. Untuk menggambarkan masalah jg. demikian itu setjara teratur dan singkat baiklah Saudara kami adjak dan mengingatkan kembali terhadap hal2 sbb :

A. Sidang Istimewa MPRS pada tahun 1967 jang baru lalu, telah menghasilkan Ketetapan2 MPRS a.l.: Ketetapan MPRS No. XXXIII jang untuk itu sebagai suatu kedjelasan diikuti oleh sikap/pendirian Pemerintah — jang terkandung dalam pidato kenegaraan Pd. Presiden — tanggal 13 Maret 1967.
Disamping itu diseluruh tanah air, di mana2, proses peng-ORBA-an berdjalan terus didalam masjarakat.

1. Didalam hubungan itulah maka PNI sebagai salah satu daripada kekuatan2 sosial-politik Pantjasila is, sudah barang tentu merasa ikut bertanggung-djawab dan berkewadjiban untuk setjara positip aktip melaksanakan proses peng ORBA an dalam arti jang sesungguhnja. Iaitu melaksanakan Pantja Sila dan UUD 1945 setjara murni dan konsekwen sebagaimana jang telah dirumuskan dalam Pidato Kenegaraan Pd. Presiden Djendral Soeharto — (sekarang Presiden/Mandataris MPRS) — pada tanggal 16 Agustus 1967, jaitu dengan berusaha melenjapkan segala bentuk penjelewengan2 seperti jang pernah terdjadi di masa-masa jang lampu.

2. Udara pembaharuan dalam semangat Democrasi Pantja Sila jang bidjaksana; jang dikandung oleh Orde Baru tersebut memberikan makna dan arti bagi PNI untuk mengisi dan membina Orde Pantja Sila, dengan tindakan2 dan usaha-usaha a.l. :
   - meniadakan sikap kultus individu
   - mengadakan konsolidasi dan kristalisasi
   - pemurnian adjaran Marhaenisme setjara menjeluruh dalam tubuh Partai & Ormas2-PNI
   - pernjataan sikap/mental/perasaan/pikiran jang dewasa sebagai suatu Organisasi Politik/Organisasi Massa jang besar.

Jang kesemuanja itu adalah manifestasi dari pada kehendak untuk setjara djudjur melaksanakan politik "korektip konstruktip" jang diamanatkan oleh Kongres Persatuan dan Kesatuan Partai Nasional Indonesia di Bandung pada tahun 1966 disegala bidang. Dar. semangat dari pada korektip-konstruktip itu ternjata berkembang terus dua tahun ketahun dengan segala masalah jg dihadapi dan ragam variasinja jang ternjata telah menundjukan kepada dunia luar bahwa kita telah benar2 hidup dan tumbuh dalam alam jang dewasa dan sadar.

Garis Baru atau Garis Pemurnian jang dibawakan oleh PARTAI NASIONAL INDONESIA seperti jang antara lain digambarkan termaksud diatas — semendjak Kongres Bandung thn. 1966 itu — mudah2an dimasa jang akan

datang dan dilandasi oleh satu kejakinan jang kuat dapat menghantarkan warganja kepada suatu kehidupan jang lebih baik, didjiwai oleh semangat persatuan/kesatuan menudju realisasi 'kerukunan Nasional'

B. Kembali kepada masalah peng-ORBA an termaksud diatas, issue peng-ORBA an jang dikumandangkan pada saat itu, djustru disadari, disengadja atau tidak disengadja, kemudian perumusan nja dikaburkan oleh sementara kekuatan-kekuatan jang a priori hendak men deskreditkan/menghantjurkan PNI dgn tjara dan motip2 tertentu jang buruk. Barangkali mereka dirangsang oleh naf su untuk menang dalam Pemilihan Umum atau ingin merebut massa PNI atau merasa dalam kesempatan jang demikian itulah mereka memperguna kan waktu se-baik2nja untuk mendis kreditkan PNI dengan bermatjam2 da lih dan fitnah serta issue2 jang kasar a.l. sebagai berikut :
— bahwa PNI adalah Orde Lama, tanpa alasan jang djelas;
— bahwa PNI masih terus dituduh berkultus individu, meskipun Keputusan2 Sidang ke-I & ke-II MPP-PNI dan isi pidato2 pimpinan Partai baik didalam lembaga Pemerintahan /legislatip maupun di forum apapun telah menandaskan ber-kali2 bahwa PNI telah melempar djauh2 semangat kultus-individu tsb ;
— bahwa Marhaenisme tak ada bedanja dengan Komunisme ;
— bahwa azas Marhaenisme adalah suatu kripto ideologi jang k a t a n j a adalah 'Marxisme jang ditrapkan di Indonesia".

Tapi mereka2 itu t i d a k pernah menundjukkan kesediaan untuk membatja dan mendengar pendjelasan2 Lembaga Pembina Marhaenisme jang untuk itu telah mendjalankan research historis-ilmiah
— bahwa PNI masih b e l u m mendjalankan kristalisasi prosesnja. Pada hal kita mengetahui, dalam tubuhnja sendiri 'mereka' itu belum mengalami kristalisasi, seperti jang didjalankan oleh PNI didalam Kongres Persatuan & Kesatuan th. 1966 jang lalu.
— bahwa Istilah Marhaenisme dan Front Marhaenis diberikan penafsiran jang subjektip negatip, jang menurut mereka katanja mirip dengan istilah 'Marxisme' dlsb. ;
— dan masih banjak lagi.

Atas dasar alasan2 jang demikian itulah, maka perkembangan Partai seperti jang disinggung diatas sangat mengchawatirkan. Tuntutan penindakan, pembekuan dan pembubaran terhadap PNI kian hari kian keras dan berkumandang bergemuruh menggontjangkan djiwa, keamanan ketenteraman dan ketertiban kehidupan masjarakat, bangsa dan Negara, chususnja bagi warga PNI sendiri. Aksi2 itu demikian rupa hebatnja sehingga beberapa penguasa dan atau kekuatan2 sospol tertentu didorong untuk mengambil tindakan a.l. berupa pembekuan/pembubaran PNI dan Ormas2-nja se Sumatera. Ibaratnja pada waktu itu bumi Indonesia sedang gelap ; se-gelap2nja. Baiklah bahwa pada kesempatan ini kita renungkan sedjenak akan suatu kata2 jang kami sitir sebagai berikut :

— Hari tidak selamanja tjerah. Sekali waktu langit redup tertutup awan, mendjadi gelaplah semuanja. Dan kemudian hudjanpun mulai turun' —
Kata2 ini diungkapkan oleh Empu Arya Tada pada waktu Madjapahit sedang menghadapi tantangan jaitu tantangan terhadap negaranja, pada saat kira2 djaman Radja Hajam Wuruk memegang pemerintahan. Demikianlah kira2 saat2 kritis jang diuga dihadapi oleh PNI padawaktu2 jg lampau

hingga sangatlah sukar kita membajangkan apa jang akan terdjadi atas diri PNI dan warganja dihari kemudian. Aksi2 sepihak jang dilontarkan dan dilakukan setjara frontal dari segala arah dan serempak, bertubi2, bergelombang dan gemuruh diseluruh Wilajah Indonesia, oleh h a m p i r semua kekuatan sosial-politik.

Aksi2 sepihak tidak berhenti hanja sampai disitu; bahkan disertai :

1. retooling petugas2 PNI dari Lembaga2 Legislatip dan Exsekutip.
2. pemetjatan2 pegawai anggota PNI/Buruh Marhaenis dari lingkungan pekerdjaannja.
3. larangan berkuliah/sekolah bagi peladjar2 anggota GMNI/GSNI.
4. aksi2 lainnja tanpa mengindahkan Pantja Tertib, norma2 Demokrasi Pantja Sila, Hak Azasi manusia jg didjamin oleh UUD 1945 — pasal 28 UUD 1945 —

Dengan dalih adanja tuntutan/resolusi dari kekuatan2 tertentu jang apriori kepada PNI, terhadap kedjadian2 itu hingga beberapa waktu tidak ada tindakan2 chusus dari Pemerintah/Pedjabat sebagai suatu usaha untuk mentjegahnja, ketjuali beberapa pedjabat/penguasa jang mengeluarkan pula statement2 jang nadanja ber-beda2, ada jang positip dan ada pula jg negatip.

II. TANTANGAN2 JANG DIHADAPKAN KEPADA PARTAI.

a. Extern

1. Setjara langsung dan pandjang lebar tadi telah digambarkan bahwa tantangan2 dari luar jang sangat berat itu dihadapkan kepada Partai i.c. Ormas2 PNI didalam suatu strategi jang sangat djauh untuk selain akan menghantjurkan PNI sebagai kekuatan Pantja Sila-is jang konsekwen, djuga akan menghilangkan Dasar-Falsafah Negara Pantja Sila itu sendiri.

   Adalah patut kiranja diingatkan disini, kita sama sekali tidak boleh lengah dan tidak boleh mengabaikan akan adanja suatu kenjataan bahwa kekuatan2 illegal sisa2 G. 30.S/PKI dan kekuatan2 anti Pantja Sila-is/kontrev lainnja masih merupakan tentangan dan tantangan jg. latent bagi keselamatan dan kelangsungan hidup Negara Kesatuan R.I. berdasarkan Pantjasila. Hal-mana setjara langsung atau tidak langsung termasuk didalamnja hari-depan dari pada PARTAI NASIONAL INDONESIA. Karena kekuatan-kekuatan itu setjara a priori hendaknja menghantjurkan PNI jg dianggapnja sebagai lawan atau penghalang baginja.

2. Dibeberapa tempat kita masih harus menghadapi sikap beberapa Penguasa atau Pedjabat jang atjapkali menundjukkan atau mengambil sikap jang sama sekali djustru tidak sesuai dengan garis Pemerintah Pusat.

3. Partner Pantja Sila-is lainnja kadang kadang ikut meragukan iktikad baik PNI sebagai komponen Orde Baru oleh karena :
   — kesalah-pahaman
   — kurang informasi
   — atau karena dengan sadar sudah 'berafiliasi politik' dengan mereka jang a priori hendak menghantjurkan PNI, dengan motip : ingin mempergunakan kedjatuhan PNI ini untuk merebut massa dan 'mengalahkan' PNI dalam Pemilihan Umum.

B. Intern

Sebagai suatu tragedi jang sangat perih dan menjedihkan ialah bahwa djustru di-saat2 kita sedang dihantam. dirong-rong, disorot oleh kekuatan2 dari luar seperti jang digambarkan diatas itu maka dari kalangan kandang kita sendiri —

hingga dewasa ini — masih sadja ada unsur2 jang sangat negatip baik disengadja, disadari atau tidak sadari mereka2 itu dapat diartikan 'i k u t m e m b a n t u' dalam proses penghantjuran PARTAI NASIONAL INDONESIA dari da'am. Unsur2 tsb. dengan berkasak-kusuk; sikapnja; tindakannja setjara terang2an atau diam2 telah menodai dan merusakkan strategi perdjuangan dan kebidjaksanaan jang dengan sangat susah pajah — selama ini — dirintis di tempuh dan didjalankan oleh Pimpinan Partai dan Ormas2nja untuk menjelamatkan organisasi setjara menjeluruh. Mereka tidak mau mengerti bahwa tindakannja itu berakibat/sangat memberatkan dan mengganggu usaha2 penjelamatan PNI & Ormas2nja.

Adapun unsur2 negatip itu terdiri dari:

a. — mereka jang sedjak semula a priori menolak dan tidak mau mengakui hasil2 Keputusan Kongres Persatuan & Kesatuan PNI di Bandung pada tahun 1966. 'Katanja' tidak-sjah dan on-demokratis, dlsbnja.

b. — mereka jang dalam sikap dan perbuatannja masih sadja gandrung dengan 'Deklarasi Marhaenis'.

c. — mereka jang tidak mau mengerti bahwa arti dan makna 'YUDYA PRATIDINA MARHAENIS' ia'ah memurnikan adjaran Marhaenisme dari segala hubungan dengan Marxisme.

d. — mereka jang melontarkan issue dan menuduh bahwa Pimpinan Partai sekarang ini hendak 'mengkanan-kan' Marhaenisme dlsb-nja.

e. — mereka jang terus menerus masih memanifestasikan sikap-mental kultus indivídu dan a.l. dengan tjara menentang garis kebidjaksanaan politik DPP-PNI jang telah dan terus akan didjalankan selama ini sebagai suatu sikap politik korektip disegala bidang.

f. — mereka jang menjabot usaha2 jg dilakukan oleh Pimpinan Partai/Ormas2-PNI baik di Pusat maupun di Daerah a.l. dengan mendiskriditkan garis kebidjaksanaan PNI atau tokoh-tokohnja.

g. — mereka jang merasa sebagai "kampiun" Orde Baru dengan tulisan2 jang tendensius dan negatip disurat2 kabar adalah sengadja di dalam usaha untuk 'menelandjangi kelemahan2 Partai dan Pimpinan2 nja dimuka umum' oleh karena n a f s u/ambisi-pribadinja tidak terpenuhi.

Mereka itu tidak sadar dan mereka itu lupa bahwa segala penderitaan Partai dan Ormas2-PNI beserta segenap warganja jang mengalami bentjana jang dahsjat pada dewasa ini adalah merupakan phenomenon dan rentetan akibat daripada warisan politik jg salah dari Pimpinan2 dimasa lampau. Dan warisan jang demikian itu — jang dengan djudjur, sungguh2, dengan memeras-keringat dan tenaga; dengan keichlasan bathiniah dan djasmanih — akan kita netralisir setjara ber-angsur2, setjara tahap demi tahap hingga achirnja PNI akan terus madju dan kembali memperoleh peranan jang pantas dan lebih baik dalam pertjaturan politik dimasa2 jang akan datang.

Inilah salah satu tekad dan kehendak kita demi kedjajaan Marhaenisme dan Pantjasila.

Maka dari itu dalam suasana dan iklim Demokrasi Pantja Sila ini, DPP-PNI masih memberi kesempatan teradhir untuk memperhatikan Saudara2 tsb.

Siapa jang sadar dan mau, berkeinginan dengan hati jang djernih dan ichlas membantu usaha2 Partai/Ormas2 PNI didalam menjelamatkan organisasi Partai - Negara dan Bangsa + Falsafah Negara Pantja Sila

dan siapa jang hendak memberikan amal dan dharma bakti kepada masjarakat dgn djudjur dan iktikad baik, menurut tjara2 jang positip konstruktip seperti jang dikumandangkan lewat Garis Partai dengan YUDYA PRATIDINA MARHAENIS dan Bina Dharma (jang didalamnja telah terperintji setjara sistimatis mengenai segenap operasi aktivitas kita dalam mengabdi kepada masjarakat maka kami dan kita semuanja akan melapangkan dada untuk menjambut Saudara2 tsb. dengan kesungguhan hati dan bidjaksana. Mari kita tinggalkan lemparan jang pahit dimasa2 lalu, dan mari kita isi lembaran2 baru dengan kerdja dan tanggung djawab bersama.

Tetapi manakala mereka2 jang kami sebutkan diatas masih bersikeras pada pendirian nja tetap melakukan sikap jang a priori dan merusak nama Partai/Ormas2 PNI, dalam gedung ini atau diluar gedung ini, di Djakarta atau diluar Djakarta pendek kata apa bila mereka tetap merasa paling Marhaenis sendiri, paling revolusioner sendiri paling besar sendiri dengan tetap pada sikap dan watak seperti jang tersurat dan tersirat termaksud diatas maka pedih sadnja akan dika hukuman karma berlaku bagi mereka.

Dengan memperhatikan apa jang dikandung dan diamanatkan oleh.

— 1. Kongres Persatuan & Kesatuan PNI di Bandung 1966.

— 2. Instruksi DPP—PNI No. Surat 350/DPP/084/Org 1967 Tanggal 2 — Djuli 1967.

— 3. Kebulatan Tekad DPP—PNI/Ormas2—PNI tgl. 20—12—67.

— 4. Instruksi Presiden No. 16 Th 1967 tanggal 21—12—67.

maka dengan penuh tanggung djawab dan tanpa ragu ragu Pimpinan Partai/Ormas2 PNI akan mengambil tindakan—tindakan tegas.

Karena semua itu adalah demi kelangsungan hidup dan keselamatan PARTAI NASIONAL INDONESIA untuk menjosong hari depannja sebagai suatu tugas sutji jang kita pikul dan mendjadi tanggung djawab bersama.

Disamping jang digambarkan diatas masih ada phenomenon2 jang patut djuga mendjadi perhatian kita, jang semuanja ini mentjerminkan suatu luka—luka dan keprihatian jang sedang berdjangkit dalam pertumbuhan Partai pada dewasa ini.

Didalam suasana jang tidak menggembirakan itu DPP—PNI masih terus berusaha mengingatkan kepada Pimpinan2 Daerah 'g wilajahnja termasuk tenang dan tenteram memberikan laporan dari perkembangan jg terdjadi didalam lingkungannja. Patut dinjatakan disini, hendaknja mendjadi perhatian Saudara—saudara Wakil dari Daerah untuk masa—masa jang akan datang dapat memberikan laporan—laporan periodik mengenai perkembangan intern/ekstern dilingkungannja masing2. misalnja a l :

— posisi dan peranan PNI/Ormas2 PNI
— Situasi politik di Daerah Saudara.
— kegiatan2 Organisasi termasuk ber-registrasi anggota.
— tantangan jang dihadapi dari dalam ataupun luar PNI
— dan lain sebagainja.

Disamping itu DPP PNI masih hendak mengingatkan kepada Saudara, bahwa Instruksi Ulangan DPP—PNI No. 010/DPP/Intr/Org. 1967 tgl. 5 September 1967, ternjata — hingga saat ini—masih belum seluruhnja melaksanakan dan belum mendapatkan perhatian jang sewadjarnja. Bahwa didalam rangka menentukan sasaran dan strategi Partai untuk menghadapi dan memenangkan Pemilihan Umum jang akan datang, kita harus

mempujai gambaran riil dan djelas mengenai kwantitatif kwalitatif Partai. Atas dasar inilah maka bahan2 termaksud mutlak perlu, diregisteer dan dimiliki oleh Partai hingga mendjadi tanggung djawab bersama dan sebagai suatu kewadjiban pula untuk dengan sungguh—sungguh mengarahkan perhatian kita untuk itu.

Adalah mendjadi harapan kita bersama agar supaja peringatan dan 'peringatan' ini mendorong Saudara untuk melaksanakan dengan sebaik—baiknja. Demikianlah suatu tragedi sedjarah jang amat mengedjutkan dan menghawatirkan telah melanda dengan dahsjatnja terhadap seluruh kehidupan Partai dan diri kita masing—masing pada saat kita kepada suatu situasi dan alam jang gelap, segalanja. Pendek kata kita merasa belum pernah mengalami tjobaan2 jg demikian hebatnja seperti saat itu apabila dialam kemerdekaan dimana kita bebas dan berdaulat di Tanah Air kita sendiri.

Insja Allah kita tetap tabah, tetap sabar berpandangan luas dan djauh kedepan. Insja Allah kita tidak bisa, Insja Allah kita akan tegak terus, kita pertjaja dan berani untuk menghadapi segala matjam tentangan dan tantangan. Kita telah bertekad bahwa pengabdian kita adalah riwajat hidup kita bagi sedjarah dimasa depan.

Mati hidup kita untuk PNI! Mati hidup kita untuk Marhaenisme dan mati hidup kita untuk kedjajaan Pantja Sila dimana datang.

Atas dasar inilah dirintis segala matjam tjara djalan.

Baik jang dilakukan di Pusat maupun jg dilakukan di Daerah. Semua bergerak serempak, simultan disiplin dan tertib teratur. Kita mengakui bahwa untuk itu kita harus menghadapi rintangan2 jang tidak ringan. Pimpinan Partai siang dan malam dengan tidak mengenal lelah dan patah semangat mengadakan konsultasi, Pertemuan dan dialoog dengan pihak penguasa/dan pedjabat jang memiliki kewenangan untuk itu.

Dalam menghadapi tuntutan frontal - seperti jang digambarkan diatas — maka DPP-PNI menempuh tjaranja tjara :

I 1. Resolusi2 jang menuntut pembubaran pembubaran PNI tidak akan dilajani dengan suatu apapun djuga. DPP—PNI berkejakinan bahwa PNI tidak akan mati dan tidak dapat dimatikan oleh banjaknja resolusi2.

2. Mengenai 'Marhaenisme' diadakan penelitian-ilmiah historis oleh Prof. Sunario SH dalam hubungan dengan kegiatan Lembaga Pembinaan Marhaenisme, untuk mendapatkan pembuktian bahwa — Marhaenisme bukanlah 'MARXISME dst—nja'

3. Daerah2 Partai di Seluruh Indonesia diandjurkan untuk mengadakan kristalisasi proces dan 'refreshing' dalam pimpinan PNI dan Ormas—ormasnja.

4 Lewat tulisan disurat—surat kabar dan mass-media lainnja diadakan bantahan tentang issue2 jang dilontarkan : .

— tidak benar bahwa PNI mau mengcome back—kan Bung Karno (bahan2 authentik adalah pidato2 Fraksi PNI dalam MPRS, Kepts2 sidang ke—I dan II MPP—PNI.

— adalah fitnah bahwa PNI dituduh orla, mengingat PNI dalam sedjarahnja njata—njata tetap gigih dalam mempertahankan Pantja Sila dan menentang pemberontakan

pinberontakan jang hendak menjadakan Pantja Sila. Demikian djuga dalam hal mempertahankan UUD-45 sedjak Dekrit 5 Juli 1959. PNI dengan konsekwen dalam forum apapun senantiasa gigih mempertahankan Pantja Sila.

5. Penjelesaian masalah hak-hidup PNI harus dilakukan ditingkat Pusat dengan mengusahakan adanja Keputasan Politik dari Pemerintah Pusat.

II EVALUASI POLITIK — KESELAMATAN NEGARA PANTJASILA — DAN POSISI PNI SEBAGAI ALAT PERDJUANGAN.

Dalam pada itu DPP—PNI disamping memperhatikan tantangan2 diatas, setjara teliti mengadakan analisa dan evaluasi tentang situasi politik, kelandjutan sedjarah Revolusi Pantja Sila dan posisi PNI sebagai alat perdjuangan.

Mengenai situsai politik setelah diadakan penelitian, DPP-PNI mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Sisa2 kekuatan G 30 S/PKI ternjata masih merupakan kekuatan jang potensiil tidak dapat diabaikan (PGRS, TPR dll).

— kekuatan Darul Islam (DI/TII) dan Gerakan Islam jang fanatik mulai terang-terangan bergerak dan berkembang sebagai potensi jang tidak boleh diremehkan.

kekuatan sparatis sisa2 PRRI/Permesta RMS dan Gerakan Papua Merdeka ternjata masih djuga latent. Sekalipun tidak sangat potensiil namun tetap merupakan kekuatan jang tidak boleh diperketjil artinja.

Dengan demikian kita mendapatkan gambaran bahwa kekuatan jang disebutkan diatas pada hakekatnja merupakan kekuatan latent jang merupakan bahaja bagi keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pantja Sila sebagai falsafah. Dengan lain perkataan kelandjutan sedjarah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pantja Sila berada dalam bahaja apabila kekuatan2 diatas terus berkembang, tumbuh dan tanpa ada imbangannja Dan satu—satunja djalan untuk menjelamatkan - Negara Kesatuan Republik berlandaskan Pantja Sila

— tidak lain dan tidak bukan kedjuali keharusan untuk menggalang segenap potensi segenap kekuatan Pantja Sila—is.

Untuk kepentingan itulah maka PNI sebagai kekuatan Pantja Silais — harus dipertahankan dengan seksama jaitu dalam hubungan dan existensinja dengan semua kekuatan Pantja Sila—is lainnja.

III. Kembali seperti jang diuraikan diatas, bahwa masalah penindakan dan tuntutan Pembekuan/pembubaran PNI berkisar a.l.: dengan 4 (empat- alasan jaitu masalah :

1. — Front Marhaenis
2. — Bapak Marhaenisme
3. — Azas Marhaenisme
4. — Masalah kristalisasi & konsolidasi

Atas dasar pertimbangan2 jang disebutkan diatas:

DPP—PNI melandaskan tindakan kebidjaksanaan Umum pada :

A Kepentingan untuk menjelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Kepentingan mutlak untuk mempertahankan PNI sbg. kekuatan Pantja Sila-'s demi keselamatan Negara.

maka kita sampai pada suatu kesimpulan bahwa **KESELAMATAN PARTAI** harus berada diatas segala kepentingan dan persoalan apapun. Sebab apapun djadinja, keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pantja Sila.

Hingga achirnja kita sampai pada — sikap :

— Bertahan pada hal2 jang prinsipiil

-- Dengan sadar menjampingkan persoalan2 jang tidak prinsipiil.

Untuk itulah maka diantara masalah—masalah tiga besar, jaitu :

1 — Azas Marhaenisme,

2. — Front Marhaeneis

3 — Gelar Bapak Marhaenisme

maka Azas Marhaenisme-lah jang harus setjara PRINSIPIIL dipertahankan.

1 Mengenai Azas Marhaenisme.

Seperti sudah tertjantum dalam Yudya Pratidina Marhaenis, maka pengertian Marhaenisme adalah :

1. Ketuhanan Jang Maha Esa

2. Sosio—Nasionalisme

3. Sosio—Demokrasi

jg. berarti hal itu sama sekali bebas dari hubungan2 dengan Marxisme DPP-PNI berpendirian bahwa rumusan Marhaenisme jg demikian itu, sebagai azas Partai adalah suatu masalah prinsip jang mutlak harus dipertahankan. Pengertian itu djelas dan memberi suatu garansi bahwa azas Marhaenisme jang dianut oleh Partai Nasional Indonesia—njata tidak seperti jang selama ini dituduhkan oleh golongan2 diluar Partai terutama mereka jang terang2an dan a priori hendak mendiskriditkan PNI.

Bagi kita azas Marhaenisme dan PNI adalah Dwi Tunggal merupakan suatu kesadaran jang dapat ditjerai—pisahkan. Partai Nasional Indonesia tanpa Azas Marhaenisme adalah tidak lajak dan sangat djanggal untuk dinamakan atau menamakan diri PNI Seperti telah ditegaskan diatas maka DPP—PNI setjara prinsip mempertahankannja.

2. Mengenai istilah 'Front Marhaenis

Istilah ini umum dipergunakan th 1955 pada waktu dan dalam hubungan Partai menghadapi Pemilihan Umum jang pertama. Waktu itu istilah ini dipergunakan sebagai nama dan wadah daripada seluruh potensi Partai — Organisasi Massa Marhaen-nja (jang dulu dinamakan Gerakan Massa Marhaen), Didalam perkembangan dan pertumbuhan Organisasi/Partai sudah barang tentu PNI mengalami masa djaja dan masa gelap. Didalam situasi jang sangat gawat. Seperti telah di djelaskan diatas maka istilah ini merupakan 'alasan' dan sebagai pangkalan sasaran.

[illegible] 1 merupakan tjara dan batu—lontjatan untuk membunuh PNI.

Titik beratnja terutama pada penggunaan kata—kata 'FRONT". Dari itu kita memahami bahwa istilah itu telah banjak menimbulkan kesulitan2 dalam usaha usaha jang dirintis untuk menjelmakan PNI. Peniadaan/penanggalan istilah termaksud diatas hendaknja sama sekali tidak mengurangi dan tidak usaha mengurangi semangat perdjuangan kita semangat untuk mendudukkan ketjintaan kita kepada Marhaenisme dan pengabdian kita kepada Rakjat Marhaen.

Patut di-ingat bahwa wadah dari keluarga besar Partai Nasional Indonesia masih tetap ada meskipun istilah "f r o n t" ditiadakan dan itu tertjermin dalam organisasi Massanja jaitu :

— Gerakan Wanita Marhaenis (GWM)

— Gerakan Pendidik Marhaenis

—. Kesatuan Buruh Marhaenis (KBM)

— Gerakan Pamong Rakjat Marhaenis

— Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM)

dan perlu ditambahkan disini bahwa mengenai nama2 seperti tersebut diatas (KBM; GWM; GPM) masih tetap dipergunakan.

3. Mengenai gelar Bapak Marhaenisme

Didalam sidang ke-II MPP-PNI, telah diputuskan bahwa Gelar "Bapak Marhaenisme"

pada hakekatnja adalah registrasi kenjataan sedjarah jang t i d a k mempunjai konsek wensi apapun dalam hubungannja dengan Partai, baik setjara Organisatoris maupun setjara politis.

Dengan demikian djelas bahwa arti gelar "Bapak Marhaenisme" adalah registrasi/ tjatatan sedjarah dimana Dr. Ir. Soekarno adalah seorang penggali Marhaenisme dan bersama2 dengan tokoh2 pendiri PNI lainnja al. Bapak Prof. Sunario SH jang hadir ditengah2 kita sekarang ini.

Untuk mentjegah pen-salah tafsiran arti gelar "Bapak Marhaenisme" ini — sebagai mana diputuskan dalam sidang ke-II MPP-PNI pada bulan Djuli th. 1967 jang baru lalu — maka gelar Bapak Marhaenisme tsb ditiadakan.

Dalam hal ini setjara rasionel meniadakan/tidak menggunakan gelar Bapak Marhaenisme dapat dibenarkan. Atas dasar hal2 seperti termaksud diatas itulah maka DPP-PNI kemudian melakukan dialoog (termasuk dalam rangkaian masalah Sumatera jang disinggung diatas tadi) dengan Pedjabat2 Pemerintahan ditingkat Pusat. Hingga achirnja lahirlah pernjataan Kebulatan Tekad DPP-PNI beserta DPP/Presidium Ormas2 PNI pada tanggal 20 Desember 1967 jang kemudian hal itu telah mendorong Pemerintah Pusat untuk memberi penegasan mengenai Hak-Hidup PNI + Instruksi Presiden No. 16 th. 1967. Dengan landasan ini maka Partai Nasional Indonesia sebagai alat dan wadah perdjuangan dapat melandjutkan perdjuangannja untuk menegakkan Pantja Sila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karena juridis—formil didjamin oleh Pemerintah mengenai hak hidupnja, sebagai Partai, sebagai alat dan manifestasi daripada Demokrasi itu sendiri. Kita akan terus membawa suara demokrasi (democratic-voice) untuk mengisi dan membina Orde Baru/Orde Pantja Sila dimasa2 jang akan datang sebagai manifestasi daripada sikap PNI jang korektip-konstruktip terhadap siapapun dan disegala bidang.

MASALAH SUMATRA DALAM HUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRES NO. 16/th. 1967

Pada hakekatnja — seperti telah digambarkan diatas — aksi2 jang meningkat destruktif dan hendak menghantjurkan PNI dimana2 itulah jang mendorong beberapa Penguasa diwilajah Sumatera misalnja hingga jang bersangkutan mengambil tindakan berupa pembekuan PNI di Sumatera Utara jang kemudian disusul dengan pembekuan PNI diseluruh wilajah Sumatera.

Ber-kali2 Pimpinan Partai baik jang di Pusat maupun di Daerah mengadakan pertemuan dan konsultasi dengan pihak Penguasa dan Pedjabat jang mempunjai wewenang dalam hal ini, tapi hasilnja kurang begitu menggembirakan.

Bahwa seperti djuga ditegaskan diatas masalah hak-hidup PNI cq jang diwilajah Sumatera penjelesaiannja harus dilakukan ditingkat Pusat.

Untuk itulah achirnja usaha2 DPP-PNI mentjapai klimaksnja dengan lahirnja Kebulatan Tekad DPP—PNI & Ormas2 PNI tgl. 20 Desember 1967 jang kemudian disusul dengan penegasan Hak-Hidup dan Instruksi Pd. Pres. No. 16/th. 1967 tsb diatas.

Dengan demikian itu dan dalam menjongsong keputusan tentang rehabilitasi/ pentjairan kembali hak hidup PNI dan Ormas2 PNI di-wilajah Sumatera Pimpinan Partai mengadakan pertemuan dengan Pedjabat2/Penguasa2 baik di Pusat maupun di

Daerah sebagai folow-up dan untuk lebih meratakan djalan seperti jang mendjadi harapan kita bersama .

Team-team dari DPP-PNI bersama2 dengan petugas2 di Daerah jang bersangkutan telah mengadakan konsultasi, pertemuan dan dialoog-setjara seksama dan bidjaksana.

Laporan jang diterima di Pusat memberikan suatu gambaran jang djelas tentang bagaimana proses pentjairan hak- hidup PNI di Sumatera itu setjara tahap demi tahap dapat diselesaikan.

Point demi point dapat kita kantongi dan titik2 terang semakin dekat kepada sasaran. Hingga pada waktu diumumkannja Instruksi/Kawat Panglima Antar Daerah Sumatera No. : TR—088 per Maret 1968 tentang pengiriman Team Penanggulangan DPP-PNI/Team Operasi Kerukunan Nasional ke Sumatera maka, DPP—PNI telah berketetapan hati untuk mengambil kesempatan jang sebaik-baiknja.

Setjara berturut2 dari tgl 13 dan 14 Maret 1968; team termaksud diatas berangkat se keseluruh wilajah DAT I di Sumatera.

Adapun hasil2 usaha Team dapat kami kemukakan sebagai berikut .

— 1. Jang berhasil baik ialah pendjagaan di Sumatera Barat dan Riau

— 2. Mengenai penjelesaian PNI di Sumatera Utara DPP-PNI mempunjai pendapat jang optimis;

— 3. Untuk wilajah hukum Kodam IV/ Sriwidjaja masih terdapat rintangan-rintangan jang tidak ringan.

Pada pertemuan2 dan hasil dialoog antara Bapak Panglima Antar Daerah Sumatera/Major Djendral KUSNO UTOMO dengan utusan DPP-PNI, dapat ditarik kesimpulan bahwa finishing-tauch penjelesaian terachir masalah PNI di Sumatera berada ditangan Panglima Antar Daerah Sumatera.

Untuk menerobos dan dalam usaha mempertjepat pentjairan PNI di Sumatera itu maka DPP-PNI kemudian mengirimkan Surat No. 148/DPP/027/Org. 1968 tgl, 25 Maret 1968 jang disampaikan kepada Panglima Antar Daerah Sumatera/Major Djendral KUSNO UTOMO, di Djakarta, dimana pada saat itu sedang berlangsung sidang umum ke-V MPRS dan — Palima sendiri hadir mengikuti sidang2 tersebut.

Sebagai folow up daripada itu maka pada awal bulan April 1968. Kemudian Team DPP-PNI dibawah Sdr. Usep Ranawidjaja; Sekretaris Djendral I DPP-PNI bersama-sama dengan Sdr. Pamudji salah seorang Team Asistensi Dep. Organisasi DPP-PNI /Anggota DPRD-GR/MPRS dikirim ke Sumatera untuk mengambil bagian dalam dan meneruskan penjelesaian proses pentjairan PNI di Sumatera.

Hingga pada tgl. 22 April 1968 No. Kep. 036/14/1967 — Panglima Antar Daerah Sumatera Major Djendral KUSNO UTOMO telah mentjabut kembali surat Keputusan tentang pembekuan semua kegiatan politik PNI di Sumatera dan kemudian membenarkan & mengidjinkan PNI dan Ormas2nja di Sumatera untuk melakukan kegiatan2 dalam rangka konsolidasi/kristalisasi partai sesuai dengan Instruksi Presiden No. 16/th. 1967.

Kepada mereka dihadapkan kepada satu pertanjaan : .

Apakah mereka sanggup untuk mendewasakan PNI, hingga Partai itu benar2 merupakan suatu alat perdjuangan jang ampuh untuk membawakan perbaikan2 dalam kehidupan rakjat ketjil jang sudah puluhan tahun menderita.

What Next?

I. LANGKAH2 INTERN DI KANDANG SENDIRI.

Sebagai suatu kenjataan jang tidak dapat dielakkan, ialah bahwa kita menga

lami set-back dibeberapa lapangan jang harus kita kedjar dalam waktu jang tidak terlampau lama, hingga dimasa-masa datang kita benar2 telah sehat dalam djasmani dan rochani, mendjadi militant, trampil dan dewasa dalam penunaian tugas2 selandjut-nja.

Didalam kerangka jang demikian padat dan berat itu maka, tidak ada alternatip lain ketjuali kita harus berdjuang terus untuk mengedjar ketinggalan2 itu, oleh karena tugas kita — PNI — sebagai Partai Politik beserta Ormas2-nja, PNI adalah alat-perdjuangan untuk mengemban AMANAT PENDERITAAN RAKJAT, untuk itu kita harus kuat, harus teguh, berani menghadapi tantangan dan tentangan jang dihadapkan kepada kita, baik dari dalam maupun dari luar.

Tenaga Pimpinan.

Seperti jang telah didjalankan pada waktu2 jang lalu maka setiap usaha untuk menumbuhkan daja-guna Kader2 Pimpinan dalam arti kwalitas dan kwantitas dengan djalan: kursus, upgrading, pengkaderan dan hal2 jang serupa itu patut mendapat perhatian jang selajaknja. Hingga kita nanti-nja dalam djangka pandjang — 10 atau 15 tahun

— dapat menjumbangkan kepada masjarakat Kader2 dan Pimpinan bagi bangsa dan negara demi harkat hidup, amal dan darma bakti PNI dan warganja setjara njata.

DISIPLIN JANG TEGAS DAN DINAMIS.

Untuk mendewasakan sikap, tingkah-laku dan pola2 pemikiran jang tumbuh dan berkembang dika'angan para Warga/Anggota PNI/simpatisan perlu ditanamkan disiplin jang dinamis dan tegas, agar dengan demikian dapat dijegah timbulnja penjelewengan2, issue2 jang negatip dan usaha2 merusak kehormatan dan nama Partai/Organisasi.

Untuk itu kami berharap sidang ini dapat memberikan saran2 dan bahan2 pemikiran jang kita perlukan bersama.

Sedja'an dengan langkah2 tersebut diatas
— dalam proses konsolidasi dan kristalisasi
— dengan mengingat peraturan2 jang ada

kita harus mentjegah dan untuk tidak menerima :

— mereka jang tergolong bekas anggota PKI/Ormas-ormas PKI
— mereka jang tergolong bekas Partai Terlarang,
— mereka jang tergolong unsur2 negatip, seperti dikemukakan diatas.

Dengan adanja keserasian antara pimpinan dan anggota, dimana satu sama lain tumbuh dalam pendewasaan jang sadar dan mendjalankan suatu disiplin jang dinamis dan tegas, maka Insja Allah PNI akan madju dan dapat memperoleh kembali peranannja jang lebih baik di masa2 jang akan datang.

Pendek kata didalam menjambut dan mengembangkan follow-up daripada Kebulatan Tekad DPP-PNI & Ormas2 PNI + Instruksi Presiden No. 16/Th. 1967 serta intern kita harus bangkit serempak — kokoh, bulat, bersatu-padu dan tidak ada t e m p a t dan waktu lagi untuk membiarkan unsur2 negatip, merusak nama dan kehormatan Partai/Organisasi kita sendiri.

II. LANGKAH2 EXTERN/KELUAR.

Adapun langkah2 keluar/ekstern dapat diperintji sebagai berikut :

. Mempertebal semangat perdjuangan untuk mengemban AMANAT PENDERITAAN RAKJAT.

2. Mengumandangkan dan mejakini bahwa MARHAENISME adalah suatu adjaran teori dan praktek perdjuangan jg akan membawa kesedjahteraan dan kebahagiaan rakjat, jang manifestasikan dalam bentuk suatu tata-kehidupan kemasjarakatan jang:
   — ber Ketuhanan Jang Maha Esa
   ber Perikemanusiaan
   ber Kebangsaan
   ber Demokrasi dan
   ber Keadilan Sosial
   — lihat Bina Dharma (program-kerdja)
3. Mengumandangkan/mengembangkan dan melaksanakan semangat Persatuan dan Kesatuan Bangsa sebagai realisasi daripada gagasan Kerukunan Nasional, jang mulai terasa sangat bermanfaat pada dewasa ini.
4. Tundjukkanlah bahwa Saudara adalah warga PNI jang
   — berfikir baik
   — beriktikad baik
   — bersikap baik
   — berwatak baik dan
   — berbuat baik

Hindarkanlah dari keadaan bentrok-physik dan djangan terlibat dalam usaha2 untuk memantjing2 perselisihan ketjuali mereka merusak harga diri kita. Djangan melibatkan diri dalam Organisasi/Gerakan2 liar jang merongrong Persatuan & Kesatuan Bangsa, Negara dan Pantja Sila.

Dengan sumbangan2 jang demikian itu maka pada hakekatnja Saudara telah membawakan garis kebidjaksanaan Pimpinan/Partai dalam mengisi dan membina Orde Baru/Orde Demokrasi Pantja Sila, dalam tahapan sekarang ini.

PENUTUP ;

Pada achir laporan kami ini, tak lupa DPP-PNI mengadjak kepada Saudara2 anggota MPP-PNI untuk mengutjapkan sjukur kepada Tuhan Jang Maha Esa dan terima kasih kepada Pemerintah melalui Bapak Presiden Djendral Soeharto; bahwasanja seluruh potensi di Sumatera telah bangkit lagi seperti sediakala, untuk memperkuat barisan Orde Baru/Orde Pantja Sila. Diharapkan seluruh warga PNI menjambut pentjairan PNI diseluruh Sumatera dengan gembira dan terus menerus mengusahakan tertjapainja proses konsolidasi/kristalisasi jang positif di daerah Sumatera chususnja dan seluruh Indonesia umumnja.

Kesediaan untuk mawas diri adalah sendjata utama dalam rangka memperkuat organisasi keseluruhan dan menghilangkan rasa terlalu puas atas hasil suatu perdjuangan, bahkan meningkatkan terus usaha pemupukan kewaspadaan Nasional dan Persatuan/Kesatuan Nasional. Kesemuanja ini djuga bermanfaat bagi tertjiptanja "Kerukunan Nasional' jang ampuh, untuk mengusir kaum pemetja—belah Organisasi baik dari dalam maupun dari luar.

Marilah kita laksanakan terus YUDYA PRATIDINA MARHAENIS dan Bina Dharma Marhaenis dengan tekun dan penuh keuletan serta ketrampilan demi mensukseskan perdjuangan kita menghadapi pemilihan umum jang akan datang, massa Marhaen dari Sabang sampai Merauke senantiasa menunggu masa djaya dan sentausanja PARTAI NASIONAL INDONESIA.

Selamat bersidang dan bermusjawarah untuk suksesnja MPP PNI ke-III sekarang ini, madju terus pantang mundur!

Djakarta, 4 MEI 1968
Dewan Pimpinan Pusat
PARTAI NASIONAL INDONESIA
Departemen Organisasi
(IGN Gde Djaksa)
Wakil Ketua.

L A M P I R A N

BINA DHARMA (PROGRAM KERDJA) DALAM RANGKA PELAKSANAAN YUDYA PRATIDINA MARHAENIS

I. Badan Musjawarah PNI dan ormas2 PNI
— Rapat Badan Musjawarah Partai di adakan setjara priodik.

II. Badan2/Usaha jang mempunjai hubungan dengan Partai dan ormas2 PNI.
— Semua Badan/usaha (Lembaga, Jajasan, Perusahaan, usaha dll) jg mempunjai hubungan dengan PNI dan ormas2 PNI harus dikoordinir dan diawasi oleh Partai dan diatur dalam suatu pedoman pusat oleh DPP PNI.

III. Hubungan dan disiplin Organisasi :
1) Setiap pernjataan keluar dari ormas2 PNI jang bersifat Politis harus sesuai dengan garis kebidjaksanaan politik Partaj.
2) Setiap Pernjataan jang bersifat Nasional dan atau Internasional harus dikeluarkan atau dengan persetudjuan DPP PNI.

3) Ditugaskan kepada DPP PNI untuk menerbitkan petugas DPP PNI/Pimpinan pusat ormas2 PNI dalam rangka penindjauan ke-daerah2 untuk selalu berhubungan dengan DPD PNI setempat.
4) Perangkapan keanggotaan Pimpinan instansi Partai dan ormas2 PNI hanja dibenarkan dengan persetudjuan Partaj atau ormas2 PNI jang satu tingkat lebih tinggi dalam hal-hal chusus.

IV. Pemanfaatan tokoh2 Marhaenis dan massa Marhaen :
1. Menugaskan kepada DPP PNI untuk mengatur pemanfaatan setjara maximal tokoh2/Petugas2 Partai dari pusat dan daerah.
2. Massa Marhaen harus dimanfaatkan dalam bentuk unit2 kerdja dibidang kemasjarakatan dari Pusat sampai kebasis2.

V. Penilaian kembali terhadap Pimpinan ormas2 PNI dan instansi2 Partai :

1. Menugaskan kepada DPP PNI untuk menilai kembali Pimpinan Pusat ormas2 PNI dan instansi Partai dibawah DPP PNI dalam rangka pelaksanaan Yudya Pratidina Marhaenis dengan memperhatikan factor2 achlak, moral dan disiplin serta militansi, idiologis kewibawaan dan pengalaman.

2. Agar Partai memberikan bimbingan setjara intensip dan kontinue terhadap ormas2 PNI.
3. Ormas2 PNI mengadakan kongres dengan persetudjuan DPP PNI.

VI. Lembaga Logistik Partaj :
Menugaskan kepada DPP PNI untuk membentuk Lembaga Logistik Partai jang bertugas mengumpulkan dana ;
a). Untuk kepentingan perdjoangan PNI dan ormas-ormas PNI.
b). Untuk Pemilu
c). S o s i a l
dipusat dan daerah.

VII. Kader PNI dan ormas2 PNI

1. Menugaskan kepada DPP PNI untuk mengadakan registrasi dan penelitian kembali kader2
2. Menjelenggarakan Pendidikan Kader dari Pusat sampai kebasis2.

VIII. Assimilasi :

Menugaskan kepada DPP PNI untuk meningkatkan proses Assimilasi dalam rangka pembinaan kesatuan Bangsa.

IX. ART pasal 6 ajat 3 dirobah mendjadi:

1. Salah seorang Anggota dinjatakan dengan tanda Anggota jang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Tjabang.

NASKAH — LAMPIRAN
Kpts. No : 13/MPP-II/O g/67

BINA DHARMA (PROGRAM KERDJA) PNI/DAN ORMAS2 PNI ,

dalam rangka

PELAKSANAAN YUDYA PRATIDINA

M A R H A E N I S

I. PENDAHULUAN

Bahwasanja Marhaenisme jg berarti sama dengan Pantjasila telah mendjiwai dan mendasari Revolusi 17 Agustus 1945 untuk memenuhi Amanat Penderitaan Rakjat jang di konkritkan dalam Tri kerangka Tudjuan pokok Revolusi Indonesia.

MARHAENISME adalah azas dan theori perdjuangan guna mentjapai tjita2 Revolusi Pantja Sila jang tjara2 mentjapainja digariskan dalam tekad/strategi-dasar perdjuangan PNI & ormas2 PNI jaitu : -
Yudya Pratidina Marhaenis.

Menjadari sepenuhnja bahwa tjita2 Revolusi Indonesia jang bersifat multi kompleks dan berwatak anti imperialisme, kolonialisme feodalisme dan neo kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinja perlu di-realisir dengan penuh kepertjajaan kepada kekuatan diri sendiri menudju kepada masjarakat sosialis Pantjasila.

Mejakini bahwa Marhaenisme merupakan azas perdjuangan jang tepat untuk menjelesaikan masalah-masalah jang dihadapi kaum Marhaen dalam mentjapai tudjuan perdjuangannja memerlukan pengetrapan untuk mentjapai masjarakat adil makmur sama rata sama bahagia.

Maka tibalah saatnja untuk setiap Marhaen/Marhaenis untuk langsung mengamalkan dharma bhaktikan segenap kekuatannja dalam mengisikan tuntutan perdjuangannja sebagaimana digariskan dalam Yudya Pratidina Marhaenisme jang berpedoman pada hal-hal sbb.

1. Usaha untuk menegakkan, mengamankan Pantjasila bersama-sama dengan kekuatan Pantjasila-is lainnja.
2. Selalu berorientasi dan berpidjak kepada kepentingan Rakjat.
3. Memelihara kepribadian dalam setiap gerak kegiatan dan bertekad bersama sama semua kekuatan Pantja Silais menggalang persatuan/kesatuan untk menjelesaikan Revolusi Nasional.
4. Fungsi social kreatip dari agama, pendidikan seni dan budaja serta ilmu dan pergaulan masjarakat.

(5) Terdjaminnja demokrasi disegala bidang jaitu dibidang politik, sosial dan didalam segi ekonomi dengan mengutamakan kemakmuran masjarakat.

II. LANDASAN / DASAR / PEDOMAN /PELAKSANAAN.

1. LANDASAN IDIIL AZAS PERDJUANGAN :

Marhaenisme jang berarti sama dengan Pantja Sila merupakan azas bintang pedman dan falsafah bangsa Indonesia jang diridhoi oleh Tuhan Jang Maha Esa.

2. LANDASAN KONSTITUSIONIL : Undang-undang Dasar 1945, Ketetapan2 MPRS.
3. LANDASAN ORGANISATORIS : AD-ART dan pedoman2 Pimpinan PNI dan ormas2 PNI
4. LANDASAN GERAK (Strategi Dasar Operasi) :
Yudya Pratidina Marhaen's.
5. ALAT PERDJUANGAN :
Instansi Partai PNI dan ormas2 PNI dari basis hingga Pusat dan segenap potensi Rakjat Marhaen.
6. SASARAN OPERASI
Masjarakat terutama didesa-desa sebagai basis.
7. TUDJUAN PERDJUANGAN
a. DJANGKA PENDEK
Meningkatkan taraf hidup Rakjat Marhaen di segala bidang.
b. DJANGKA PANDJANG
Mentjapai masjarakat sosialis Pantjasila jang diridhoi oleh Tuhan Jang Maha Esa.

III. FAKTOR2 JANG PERLU DIPERHATIKAN.

1. Situasi politik dan kondisi Daerah.
a. Dalam menentukan ambeg-parama-arta dan dalam menentukan sasaran2 program-kerdja, hendaknja diperhatikan iklim-politik dari daerah2 jbs, termasuk pengaruh G.30.S/PKI dan gerakan kontrev lainnja.

Tjontoh: di-daerah2 jang beragama tebal, maka program kerdja ditudjukan pada usaha2 dibidang kerochanian-keagamaan sosial. Di-daerah2 perburuhan, usaha ditudjukan kepada usaha2 dibidang sosial-ekonomi.
b. Mengingat keadaan politik dan kondisi daerah itu djuga dilakukan penelitian apakah jang ditampil-kedepankan PNI, KBM (daerah perburuhan), atau DMI, LKN (daerah agama) untuk projek2 jang memerlukan tenaga physik (GPM, GMNI, GSNI) dst.
c. Di-daerah2 jang ekonomis-minus maka program-kerdja dititik-beratkan kepada pemenuhan kebutuhan Rakjat (koperasi, peningkatan produksi pangan, menumbuhkan industri Rakjat dlsb).

2. Keadaan dalam tubuh PNI dan ormas2 PNI sendiri.

Dalam menentukan program-kerdja hendaknja disesuaikan djuga dengan keadaan dalam tubuh PNI dan ormas2 PNI. Terutama diusahakan, agar supaja kekuatan dan ketrampilan bekerdja diantara PNI dan ormas2 PNI mentjapai keseimbangan. Jang lemah harus dibantu oleh lain2nja hingga kekuatan mendjadi sama. Jang mengalami penderitaan (pemetjatan, larangan berkuliah/bersekolah) harus dibantu, hingga mereka tidak patah-semangat.

3. Faktor psychologi perlu diperhatikan dalam memupuk saling pengertian dengan pedjabat2 setempat dan pimpinan parpol/ormas lainnja.

4. Faktor Angkatan Muda dalam PNI dan ormas2 PNI hendaknja mendapatkan perhatian chusus dalam usaha untuk mendidik mereka sebagai tjalon2 pemimpin jang matang dalam segala bidang.

IV. PROGRAM - KERDJA :

1. Bidang Politik dalam Negeri.

Dalam usaha untuk melakukan aktivitas2 jang disesuaikan dengan program Pemerintah untuk mentjiptakan stabilisasi politik dan stabilisasi ekonomi serta menghadapi pemilihan umum ini, maka PNI dalam programa politiknja harus menekankan hal2 sbb. :

a. Perlunja pemilihan Umum sebagai sjarat mutlak bagi pelaksanaan tata kehidupan demokrasi Pantjasila.

Maka segenap tenaga dan fikiran serta logistik harus dikerahkan untuk memenangkan pemilihan umum.

Persiapan2 di pusat dan daerah2 (setjara otonom dan berdikari) segera harus dimulai.

b. Sebagai Pantja Sila-is konsekwen maka setiap pemimpin dan warga PNI dan Ormas2 PNI, dimanapun dia berada, harus mendjadi tjontoh dalam mengamankan dan sebagai bintang tuntutan serta pedoman hidup

Kesadaran berke-Tuhanan Jang Maha Esa, hidup berkebangsaan, berperikemanusiaan, berdemokrasi dan berkeadilan-sosial harus dilaksanakan dalam praktek kehidupan sehari-hari.

Kebudajaan Nasional harus dikembangkan dengan berkepribadian Pantjasila pula.

c. Didalam lembaga2 wakil2 PNI dan ormas2 PNI harus lebih giat lagi dalam melaksanakan sosial support dan sosial controle dengan sikap korektip jang tegas dengan saran2 jang konstruktip terhadap Pemerintah.

Fraksi PNI dalam lembaga2 legislatip/eksekutip di pusat/daerah harus lebih giat dan berprinsip menju sun konsepsi2 jang diperlukan untuk melaksanakan tjita2 termaksud diatas.

d. Sebagai pentjetus gagasan Kerukunan Nasional maka setiap petugas PNI dan ormas2 PNI harus berusaha memelopori semangat persatuan /kesatuan bangsa.

Setiap persoalan jang timbul hendaknja pada taraf pertama diselesaikan dengan djalan musjawarah untuk mupakat. Djika suatu golongan/kekuatan terus menerus memusuhi PNI dan ormas2 PNI setjara a priori dengan tudjuan menghantjurkan PNI dan ormas2 PNI, maka didalam Negara hukum berdasarkan Pantja Sila harus diminta-an perlindungan hukum dari pihak Penguasa.

Djika perlindungan hukum ini tidak diberikan maka kita memiliki djalan2 lain untuk membela kemormatan PNI dan ormas2 PNI.

2. **Bidang Ekonomi dan Pembangunan**

Demi untuk meningkatkan taraf-penghidupan Rakjat, maka PNI dan ormas2 PNI, merasa berkewadjiban membantu dalam mentjiptakan stabilitas-ekonomi.

Disamping konsepsi2 jang akan diadjukan dalam lembaga2 legislatip/eksekutip, maka PNI dan ormas2 PNI sebagai alat perdjuangan djuga akan turut aktip mendjalankan aktivitas2 jang dimungkinkan langsung didalam dan untuk kepentingan masjarakat.

A. Penggunaan Tenaga Kerdja :

Pada hakekatnja 'pemetjanan' kesulitan tenaga kerdja adalah 'penjaluran para penganggur ke-sektor2 jang produktif. Djadi pengluasan lapangan kerdja bagi para penganggur harus diusahakan baik oleh Pemerintah, maupun oleh masjarakat sendiri, ataupun oleh Pemerintah ber-sama2 dengan rakjat. Disinilah terbuka kesempatan bagi PNI, KBM, Gerakan Nelajan Marhaenis, Petani untuk mendjalankan peranannja dibantu oleh ISRI sebagai pemikirnja. Para penganggur (kelebihan tenaga kerdja) dapat disalurkan ke-sektor produksi, misalnja: dengan perluasan pembukaan usaha2 di bidang produksi pertanian, peternakan dan perkebunan, mengintensiefkan usaha-usaha keradjinan rakjat, memprodusir alat2 pertanian dsb-nja dengan memberikan bantuan berupa bahan2 baku atau bahan penolong dsb-nja.

B. Pertanian :

PETANI dengan ahli2 pertaniannja dibantu oleh para pemuda meng-intensifkan semua segi disektor Pertanian dgn taraf: antara lain. a

a. up-grading tanah dan produksinja; membantu petani mendapatkan pupuk jang murah, dan memperbesar produksi pupuk (kompos)

b. rehabilitasi alat2 pertanian, irigasi dan dam2 rakjat, menjempurnakan pengairan setjara gotong rojong

c. perluasan areal tanaman;

d. tetap diusahakan bagi-hasil dengan rakjat penggarap serta perbaikan pemasaran.

C. Perkebunan :

K.B. Perkebunan/KBM dan PETANI dapat bergerak dibidang :

a. Perkebunan Rakjat ;
   1. up-grading produksi
   2. Rehabilitasi alat2
   3. up-grading skill tenaga2 kerdja
   4. memperdjuangkan perkreditan sedapat2nja jang meringankan beban.
   5. memperdjuangkan perbaikan pemasaran.

b. Perkebunan Pemerintah untuk mendorong diadakannja :
   1. Rehabilitasi jang effektief
   2. Effisiensi kerdja
   3. Pembaharuan tanaman dan perluasan areal.
   4. Subsidi jang selektief.
   5. Perbaikan perumahan.

D. Agraria :

Petugas2 PNI, chususnja dan PETANI berusaha :

— segera diteruskan pelaksanaan UU Pokok Agraria (Land-reform beserta peraturan2 pelaksanaannja).

— segera diperdjuangkan lahirnja UU Land use-planning.

— pentjegahan erosi dilakukan setjara nasional, bergotong rojong melakukan penghidjauan tanah2 tandus gundul dll.

— tanah2 jang telah digarap oleh petani untuk kepentingan peningkatan produksi pertanian dan perkebunan segera dilegalisir statusnja jang menguntungkan sipenggarap.

— peradilan land-reform tetap diadakan dan didjalankan untuk mengatasi persengketaan tanah setjepatnja.

E. Perikanan :

— merapikan pengorganisasian perikanan (Koperasi dan Gerakan Nelajan Marhaenis), baik perikanan maupun perikanan

darat serta diberi bimbingan terus me nerus.

— memberi bantuan kepada usaha2 dalam negeri jang membuat alat2 perikanan untuk meningkatkan produksi ikan.

— bersama-sama daerah (propinsi2) menentukan wilajah2 perikanan serta pengaturan2 jang memungkinkan para nelajan meningkatkan hasil penangkapannja jang sedjara tidak lasung akan menguntungkan negara.

— segi2 pengolahan ikan peng-gramman serta pemasarannja tetap mendapat perhatian baik dari pemerintah, maupun dari masjarakat terutama para pedagang ikan.

— diberi proteksi kepada usaha penangkapan ikan dalam negeri terhadap saingan2 luar negeri.

F. Industri Rakjat/Ringan

Petugas PNI (ekonoom2) berusaha untuk :

— menstimulir pengerahan usaha Industri Rakjat/ringan dalam negeri dengan mengusahakan fasilitas dan bantuan dimana perlu.

— menjediakan bahan baku/penolong dan spare-parts bagi industri tsb. Dan bersama2 diantara pengusaha swasta itu sendiri, agar dapat menekankan harga hasil produksi dalam negeri sedjauh mungkin mendekati daja beli rakjat konsumen.

— adanja perlindungan djaminan hukum bagi industri jang telah ada jang telah njata manfaatnja bagi rakjat banjak.

G. Perkapalan :

Petugas2 PNI dan ormas2 PNI ikut mendorong diadakannja :

— Rehabilitasi dari pada dok2 jang ada, karena kepunjaan Pemerintah maupun usaha swasta atau rakjat jang mewarisi tradisi pembikinan kapal/perahu rakjat.
rehabilitasi dari pada dok2 jang ada, karena sangat dibutuhkan oleh dunia perkapalan Indonesia. a
usaha bersama antara Pemerintah dan pihak Swasta, tjara bagaimana mengichtiarkan 'werk kapital' atau modal kerdja, guna memenuhi perkapalan jg akan melantjarkan lalu lintas ekonomi diselu ruh nusantara kita ini.

— facilitas2 untuk meng-import bebas spare-parts perkapalan dan mengawasi penjebarannja.

H. Perdagangan :

Petugas2 PNI dan ormas2 PNI berusaha agar supaja :

— penjaluran barang2 konsumsi hendaknja tetap melalui saluran2 jang telah ditentukan, misalnja dengan PP 140 dan Badan Penjalur lainnja jang telah ada diidjinkan. Dalam hubungan ini harus dipegang pendirian : memeratakan pe-penjebaran barang2 jg diperlukan rakjat

I. Transmigrasi :

Petugas2 PNI dan ormas2 PNI hendaknja berusaha melantjarkan transmigrasi

— Transmigrasi harus tetap dipandang dari beberapa segi, misalnja :
a. segi kepadatan penduduk
b. segi produksi disegala sektor
c. segi pertahanan dan keamanan negara

— apabila pemerintah belum mampu membiajai adanja transmigrasi umum sebagai jang pernah dilakukan, pemerintah harus menjerahkan kepada daerah atau kepada mereka jang dengan sukarela hendak bertransmigrasi. Pemerintah memberikan fasilitas2 jang sangat diperlukan serta mendjaga djangan sampai terdjadi penipuan, manipulasi atau penjalah

gunaan wewenang dari oknum jang di kuasakan oleh para transmigran untuk mengurusnja.

Objek pentrasmigrasian harus terletak dalam bidang produksi, terutama objek jang kwikyielding

2. **Meningkatkan aktivitas dibidang perkoperasian :**

Menjempurnakan tjara-kerdja, dan menggiatkan Biro2 Koperasi kita jang akan memberikan bimbingan.

3. **Bidang Sosial :**

Petugas2 PNI dan Ormas2 PNI jbs. dalam usaha-usaha :

a. Pembangunan Masjarakat desa, Pendidikan Masjarakat, Lembaga Sosial Desa, kebersihan dan kesedjahteraan Rakjat.

b. Menggiatkan usaha mendirikan dan memelihara poliklinik · membantu tuna karya, jatim piatu, tuna badan, dan perbaikan pendidikan moral-mental tunasusila, PPPK d'sb.

c. Perumahan rakjat sehat.

d. mengusahakan perbaikan nasib buruh tani nelajan dsb, jang tidak didasarkan atas rasionalisasi masal.

e. Aktivitas dalam lingkungan RT/RK /RW.

4. **Pendidikan :**

a. Menjelenggarakan dan menjempurnakan usaha Pendidikan Marhaenis/Pantjasila dari Taman Kanak2 hingga Perguruan Tinggi.

b. Mengadakan koordinasi terhadap usaha2 pendidikan antara Gerakan Pendidik Marhaenis, Gerakan Wanita Marhaenis, Unsur Ke-Agamaan (Djamiatul Muslimin, Kristen, Katholik dan Hindu Dharma), Lembaga Kebudajaan Nasional dan Partai dalam mengisikan unsur2 mental budaja kerochanian serta achlak dalam dunia pendidikan pada umumnja (BAKOPMA)

c. Kursus Kader Politik dan pembangunan (kemasjarakatan, kekarjaan, pengetahuan) jang dapat segera langsung bermanfaat dan dirasakan dalam kehidupan masjarakat untuk memberikan pembaktian kepada Nusa dan Bangsa.

d. Mengadakan kerdja sama dengan instansi2, perkumpulan2/organisasi2 sosial/pendidikan baik pemerintah maupun swasta, baik jang bertaraf nasional maupun internasional.

5. **Kebudajaan :**

a. Organisasi :

Setiap exponen seni/budajawan warga PNI dalam gerak kreasi, eduksi, dan koordinasi akan diorganisir melalui Lembaga Kebudajaan Nasional.

b. Operasionil :

Program djangka pandjang ditudjukan untuk mengembangkan kebudajaan jang berkepribadian Indonesia.

Program kerdja djangka pendek untuk memenangkan Pemilihan Umum maka diutamakan.

Unit Mobil Kesenian :

— Tiap tingkat Tjabang satu Unit Kesenian dengan anggota 4 dan max. 10 orang.

— Tiap tingkat Daerah satu Unit Kesenian dengan anggota minimum 8 dan max. 15 orang.

c. Penggunaan :

Tiap Unit-mobil Kesenian merupakan unit serba guna jang berkemampuan dibidang: Drama Reog/Dagelan, Njanjian bersama, Deklamasi dan dipergunakan untuk mendampingi petu-

gas Partai jang sedang meng adakan kampanje.

d. Materi/Bahan :
Semua naskah Drama, Njanjian dan Dagelan serta Tarian jang sifatnja merangsang massa untuk kemenangan PNI (terutama dalam rangka pemilihan Umum).

e. Unit Chusus :

— Tiap Tjabang harus membentuk team pelukis jang harus sudah terlatih untuk aktivitas2 dalam persiapan2 untuk pemilihan umum.
— Materi lukisan adalah poster jang menggambarkan perdjuangan untuk kemenangan PNI, tanda gambar dlsb.

6. **Keagamaan :**
Berpidjak diatas landasan Ketuhanan JME, maka setiap Marhaenis tak dapat melepaskan dirinja dari pada amanat itu untuk mempraktekkan :

a. Berbakti kepada Tuhan Jang Maha Esa.
b. Berbakti kepada sesama umat Manusia jang hendaknja dilaksanakan dgn amal perbuatan sbb :
— Menundukkan/melaksanakan dalam satu niat, kata dan perbuatan jang njata jang mentjerminkan toleransi jang se-besar2nja diantara pemeluk2 Agama.

— Membina kerdja sama jang murni dalam segala bentuk kehidupan masjarakat dan keagamaan dengan :
aa. Pembangunan Mesdjid, Geredja dan Puri sbg. tempat Peribadatan.
bb. Pembangunan Gedung2 untuk keperluan Pendidikan agama dan sosial.
cc. Atas dasar kesutjian kitab Sutji masing2 agama, diusahakan dibentuknja : LEMBAGA MUSJAWARAH AGAMA jang beranggotakan pemuka2 Agama Islam, Kristen/Katholik dan Hindu-Dharma jang bertugas :

— Memupuk kekeluargaan antara penganut Agama dalam lingkungan PNI dan ormas2 PNI keluar maupun kedalam.

— Memberikan pertimbangan jang menjangkut bidang Agama kepada PNI maupun ormas2 PNI tingkat Pusat (diminta maupun tidak).
— Memberikan bimbingan jg dan saran2 didalam menggantar setiap exponen PNI dan ormas2 PNI untuk mentjintai dan mengamalkan Agama masing2.
— Melaksanakan bersama program kerdja sama jg murni didalam mengembangkan/membina agama masing2 a.l. didalam :

— Pemeliharaan tempat2 ibadah (Mesdjid, Geredja dan Puri/Tjandi).
— Peladjaran Agama masing2.
— Pembinaan terhadap pendidikan Agama.

7. **Olahraga :**
1. Dalam setiap tingkatan organisasi (GPM, GMNI, GSNI), hendaknja ada

bagian jang chusus membina tjabang2 olahraga;

2. Perlu dibentuk badan Koordinasi disetiap wilajah Partai jang membina bidang olahraga, dimana disegala bentuk kegiatan keolahragaan dikoordinir oleh badan tsb.
3. Adanja latihan jang teratur dan serius;
4. Pada waktu2 tertentu diadakan pertandingan guna mentjari bibit olahragawan dalam lingkungan PNI dan ormas2 PNI. pertandingan2 diiakukan dari basis2 organisasi dan pada periode tertentu setjara nasional;
5. Diadakan pertandingan antar organisasi guna membina saling pengertian dan persahabatan.
6. Ikut aktip dalam badan2 keolahragaan jang bersifat lokal, nasional maupun internasional.

8. Bidang Organisasi :

A. Partai Nasional Indonesia dan segenap ormas2 PNI dari Pusat sampai tingkat daerah2 harus segera dikonsolidasikan dan dibangun sentumpak, sehingga memiliki kembali kemampuan, militansi, kelintjahan dan daja-kerdja serta daja djuang jang tjukup untuk menunaikan tugasnja jang berat, simultan dan multi kompleks itu.

B. Konsolidasi dan Pembangunan Partai dan ormas2 PNI berarti menjempurnakan nakan Susunan Pengurus dan/atau peningkatan kepemimpinan setjara kolektif sebagai Partai Rakjat jang berpandangan djauh-kedepan (= historis-bewust) berdjiwa radikal-progressip-revolusioner, berkewibawaan sesuai dengan kondisi dan situasi-politik dewasa ini serta jang mempunjai waktu dan tenaga untuk senantiasa membela kepentingan kaum Marhaen.

C. Penjusunan Masa Marhaen dalam satu barisan kaum Marhaen dan Marhaenis jang teratur, bersatu kokoh, kuat dinamis militant radikal progressip-revolusioner dan berdisiplin terhadap garis Kepemimpinan Partai dan ormas PNI.

D. Kewadjiban bagi setiap warga dan petugas Partai dan ormas2 PNI untuk membantu perdjuangan Marhaenis, untuk membekalkan diri dan dapat mendidik dirinja dalam teori dan praktek-perdjuangan untuk dapat mendjadi seorang MARHAENIS jang Baik, jang berwatak luhur, berfikir sehat berbuat tepat serta selalu mendjadi tjontoh jang baik.

E. Perobahan tjara-kerdja dibidang Organisasi hingga mendjadi tjara jang tepat, tjepat, tegas dan lintjah dgn meninggalkan djauh2 penjakit birokrasi.

F. Menumbuhkan kader2/aktivis umum serba-guna dan kader2/aktivis chusus jang berdisiplin.

G. Penjempurnaan administrasi serta mempersiapkan logistik bagi kepentingan perdjuangan dan pemilihan umum.

H. Usaha2 konsolidasi dan pembangunan Partai harus dipertjepat berhubung dengan persiapan pemilihan umum.

8. Bina Dharma ini dilengkapi dengan Lampiran tersendiri jang tidak terpisah

Djakarta, 25 Djuli 1967

SIDANG KE - II
MADJELIS PERMUSJAWARATAN PARTAI
PARTAI NASIONAL INDONESIA.

PEDOMAN

PELAKSANAAN BINA DHARMA (PROGRAM KERDJA) BIDANG ORGANISASI

dalam rangka

PELAKSANAAN YUDYA PRATIDINA MARHAENIS

Landasan-landasan:

Ideologi : Marhaenisme/Pantjasila.
Organisatoris : AD/ART dan Pedoman2 Pimpinan PNI dan ormas2 PNI.
G e r a k : Yudya Pratidina Marhaenis.
K e r d j a : Bina Dharma (Program Kerdja Marhaenis

S a s a r a n :

Pemulihan kemampuan, militansi, kelintjahan dan daja-kerdja serta daja djuang jang tjukup dari PNI dan ormas2 PNI.

1. Sidang MPP ke II di Djakarta dari tanggal 23 s/d 25 Djuni 1967, telah menetapkan Bina Dharma (Program Kerdja) dalam rangka pelaksanaan Yudya Pratidina Marhaenis, jang chusus dibidang organisasi a.l. menggariskan b a h w a :
   a. PNI dan segenap ormas2 PNI dari Pusat sampai tingkat daerah2 harus segera dikonsolidasikan dan dibangun serempak, sehingga memiliki kembali kemampuan, militansi, kelintjahan dan daja-kerdja serta daja djuang jang tjukup, untuk menunaikan tugas nja jang berat simultan dan multi-komplek itu;
   b. Usaha2 konsolidasi dan pembangunan Partai harus dipertjepat berhubung dengan persiapan pemilihan umum jang akan datang.
2. Untuk itu maka tugas pokok dan kewadjiban segenap instansi Partai jg paling mendesak sekarang ini, mengingat bahwa konsolidasi dan pembangunan tsb. adalah sjarat-mutlak bagi tertjapainja sasaran jang vital-strategis dan merupakan pula tuntutan objektif keadaan dewasa ini, untuk mentjapai :
   a. minimal: agar PNI dapat Survive dan
   b. maksimal: agar PNI mentjapai suatu posisi jang terhormat menang dalam Pemilihan umum jad.
3. Maka dari itulah tugas urgen seluruh potensi PNI dan ormas2 PNI mulai sekarang ini, ialah meningkatkan lagi usaha2 konsolidasi jang harus sudah mentjapai sasarannja pada achir tahun 1967 triwulan pertama tahun 1968 untuk kemudian dilandjutkan dengan usaha usaha pembangunan sebagai realisasi persiapan terachir jang harus merupakan garansi objektif bagi tertjapainja suatu posisi jang terhormat dalam bidang pemilu jang akan datang.
4. Agar supaja proses konsolidasi tsb dapat berdjalan serempak diseluruh daerah, sesuai dengan makna dan djiwa dari pada Ketetapan Sidang MPPke-II jang baru lalu maka ditentukanlah sistematiknja dibawah ini, sekedar sebagai pedoman dan pegangan dalam pelaksanaan oleh segenap instansi pimpinan (daerah, tjabang, anak tjabang dan ranting), dgn selalu memperhatikan pula situasi dan kondisi setempat.
5. Laporan bulanan mengenai hasil2 pelaksanaan tsb hendaklah dikirimkan kepada DPP-PNI c.q. Departemen Organisa

si, jang sudah harus menerimanja selambat2nja tanggal 10 tiap bulan berikutnja.

Pelaksanaan selama djangka-waktu 1 Oktober 1967 s/d dgn. triwulan pertama tahun 1968

I. Susunan Pengurus/Pimpinan.

1. Pada prinsipnja setiap instansi pimpinan (daerah, tjabang, anak-tjabang) sebagai satu kesatuan jg kolektif, demokratis dan berwibawa, adalah hasil pemilihan suatu konperensi jang wadjar sesuai dgn ketentuan2 dalam pasal2 46 jo. pasal 41, pasal 53 jo. pasal 45, pasal 60 jo. pasal 53 ART Partai.
2. Oleh karena itu, instansi pimpinan jang belum memenuhi ketentuan2 tsb, hendaklah segera mengadakan konperensi, untuk menjusun pengurus/pimpinan jang demokratis dan berwibawa, sesuai dengan situasi dan kondisi politik setempat.
3. Penjimpangan dari pada ketentuan2 dari ART tsb. diatas, karena keadaan memaksa atau karena sesuatu sebab/faktor extern, harus mendapat persetudjuan DPP liwat instansi pimpinan atasan.

II. PENINGKATAN SETJARA KOLEKTIF.

1. Adalah mendjadi kewadjiban setiap Marhaen/Marhaenis untuk membantu perdjuangan P.N.I dan ormas2 PNI, jang berarti harus selalu berorientasi kepada massa Marhaen kearah keselamatan massa dan organisasi.
2. Dengan demikian maka setiap Marhaenis jang terpanggil untuk turut memimpin perdjuangan Rakjat Marhaen, harus senantiasa berusaha meningkatkan diri dan membekali diri dengan teori dan praktek perdjuangan sehari—hari untuk dapat mendjadi seorang Marhaenis jang baik, berwatak luhur dan djudjur, berpikir sehat dan berbuat tepat selalu mendjadi tjontoh jang baik bagi lingkungannja.
3. Sebagai anggota pengurus/pimpinan bersama sama dengan rekan2 lainnja harus aktif mengikuti perkembangan situasi, menjumbangkan fikiran/tenaga guna tertjapainja peningkatan mutu/fungsi pimpinan serta keikut sertaan didalam menentukan sewaktu-waktu kebidjaksanaan sesuai dengan tuntutan objektif situasi.
4. Setiap pimpinan/pengurus setjara periodik (minimal sekali seminggu) mengadakan pertemuan (briefing/pendjelasan/penerangan) mengenai sesuatu jang menjangkut perdjuangan, untuk merata-luaskan serta menjeragamkan tanggapan/pengertian/kebidjaksanaan pimpinan/pengurus.
5. Hubungan formil/informil setjara pribadi antara anggota2 pimpinan pengurus harus diaktivir dan lebih di-intensifkan lagi, dalam rangka pembinaan rasa setiakawan dan rasa tanggung—djawab kolektif.

   Hal jang serupa dilakukan pula terhadap pimpinan ormas2 PNI di samping tokoh2/petugas2 Marhaenis lainnja jang berketjimpung di bidang eksekutif maupun legislatif.

III. PENJUSUNAN MASSA MARHAEN.

1. **Ranting/Kelompok, atau Anak Ranting** sebagai wadah untuk pe

numpangan massa Marhaen didalam wilajah/lingkungannja keramat penting sekali arti dan peranannja, terutama didalam memobilisir, meng-organisir dan mengkoordinir potensi Rakjat Marhaen, guna mentjapai posisi jang terhormat dan menang didalam pemilu jang akan datang.

2. Oleh karena itu pimpinan/pengurus dari Ranting/kelompok harus segera disempurnakan/ditertibkan pula guna meningkatkan kemampuan daja-kerdja dan daja-djuangnja.

3. Massa anggota Ranting/kelompok sekurang-kurangnja 1 kali sebulan dikerahkan untuk pertemuan/briefing/penerangan, terutama diarahkan untuk kegiatan2 sosial (mendirikan tempat2 beribadat, memperbaiki djalan2 kampung/desa mendirikan gedung2 SD, ataupun setjara bergiliran mengadakan pembersihan/perbaikan kampung halaman dan rumah tempat tinggal masing masing setjara bergotong-rojong).

IV. PENUMBUHAN TENAGA-TENAGA KADER/AKTIVIS.

1. Perlu segera dilakukan usaha2 kearah penambahan kader2/aktivis (pasal 9 ART Partai) selaku tjalon2 pemimpin dan tenaga penggerak didalam lingkungan organisasi Partai, disamping usaha2 kemasjarakatan lainnja.

2. Kader2/aktivis2 umum serbaguna membantu pimpinan sehari-hari misalnja didalam menjelenggarakan organisasi/administrasi, sedang kader-kader/aktivis2 chusus dikerahkan misalnja dalam mengerahkan/menggerakkan massa anggota/simpatisan untuk suatu pertemuan/rapat umum dan/atau sebagai team2/kelompok2 untuk membantu penjelenggaraan sesuatu pekerdjaan jang bersifat sosial-ekonomis/kemasjarakatan.

3. Untuk pendidikan kader2/aktivis2 tersebut, diadakan :

   a. kursus-kursus kader dengan djangka waktu tertentu serta kurikulum jang telah ditetapkan lebih dahulu oleh pimpinan.

   b. tjeramah2 chusus untuk mempertinggi kesadaran dan memperdalam pengertian mengenai soal2 Partai maupun umum lainnja.

   c. researsh sewaktu-waktu setjara berkelompok mengenai sesuatu persoalan jang dianggap penting/hangat.

   d. team2/kelompok2 kemasjarakatan, misalnja dalam hal mengerahkan bantuan untuk korban-korban bentjana alam, pembersihan kampung halaman rakjat, perbaikan djalan2 kampung/desa, mendirikan tempat2 peribadatan, gedung2 sekolah dsb-nja.

V. PERSIAPAN LOGISTIK.

1. Perlu segera dilakukan tindakan tindakan persiapan dalam rangka pembentukan logistik guna kepentingan.

a. PERDJUANGAN,
b. Pemilihan Umum dan
c. SOSIAL.

2. Untuk membantu usaha kearah pengisian logistik ini, dikerahkan tenaga—tenaga usahawan usahawan Marhaenis. kaum dermawan/simpatisan serta para pemuda (Pemu

da Marhaenis ,GMNI GSNI) dan G.W.M untuk pengumpulan dana-dana setjara legal.

3. Pertanggung-djawab mengenai penjimpanan dan penggunaan dana-dana tsb berada ditangan Bendahara Partai dibawah pengawasan pimpinan harian Partai.

4. Hendaknja setiap waktu tertentu (periodik) diadakan checking-up logistik antar seluruh pimpinan Harian Partai, sebagai follow—up pertanggungan-djawab terbuka dan kolektif.

VI. PENJEMPURNAAN ADMINISTRASI/SEKRETARIAT.

1. Sekretariat Partai supaja lebih diaktifkan lagi dan ditingkatkan terus sebagai salah satu echelon disamping Departemen2, jang mentjakupi bagian2 dokumentasi (arsip), ekspidisi, surat-menjurat dan pekerdjaan2 administrasi lain2nja seperti agenda, keagendaan dsb-nja berfungsi sebagai barro meter jang me-registreer naik turunnja suhu dari keseluruhan organisasi Partai.

2. Mengingat pentingnja kedudukan peranan Sekretaris Partai, maka segenap bagian-bagiannja perlu segera disempurnakan dengan mengutamakan efficiensy dan meningkatkan effektivitasnja, agar supaja senantiasa dan setiap saat sanggup memberikan gambaran jang up to date mengenai keadaan keseluruhan organisasi Partai, misalnja mengenai :

a. djumlah Daerah, Tjabang Antjab, Ranting/Kelompok dan ANGGOTA.

b. DPD, DPT, ANTJAB jang sah dan jang bersifat sementara.

c. banjaknja petugas2 Marhaenis dibidang eksekutif dan legislatif didalam wilajah tugas setiap instansi Partai.

d. gambaran tentang imbangan kekuatan sospol didaerah-daerah dll.

3. Untuk menampung kegiatan2 Sekretariat ini, perlu diusahakan adanja suatu tempat jang lajak untuk kantor.
Alangkah sempurnanja djika ruangannja dapat menampung segenap Sekretariat dari ormas2 PNI.

4. Personalia dapat dikerahkan dari kader-kader sebagai full timer maupun part— timer sebaiknja diambil dari G.P.M GMNI dsb-nja.

VII. PEMASANGAN PAPAN — PAPAN NAMA.

Pemasangan papan-papan nama hendaknja setjara menjeluruh dan seragam seperti jang telah ditetapkan oleh Kongres Persatuan & Kesatuan P.N.I bulan April 1966, melalui instruksi D.P.P—PNI No 230/DPP/044 Orgn. 1966 tanggal 13 Agustus 1966; untuk lebih tertibnja pemasangan papan-papan nama Partai dan ormas-ormasnja hendaknja dipasang pada tempat2 berikut :

1. Didepan Sekretariat Partai atau ormas2 PNI.

2. Dipersimpangan djalan jang strategis (berdasarkan pertimbangan kondisi setempat).

3. Pada setiap udjung Gang/lorong atau djalan2 desa/kampung disesuaikan dengan keadaan setempat).

4. Pada setaip rumah pimpinan partai dan ormas-ormas PNI dan lain—lain tempat jang dianggap perlu.

POKOK—POKOK PENDJELASAN

tentang

MARHAENISME

I. MARHAEN DAN MARHAENIS.

Adalah satu kenjataan demikian se djarah mengadjarkan, bahwa rakjat Indonesia, atau bangsa Indonesia se bagian besar terdiri dari tani ketjil, buruh ketjil, pegawai ketjil, peda — gang ketjil, pengusaha ketjil. Singkat nja sebagian besar terdiri rakjat mis kin.

Rakjat Indonesia kurang lebih terdi ri 91% buruh ketjil, pedagang ke tjil, tani ketjil, pengusaha ketjil pe gawai ketjil, jang hidupnja selalu mengalami kekurangan.

Mereka mempunjai nasib jang sama jang sehari2nja selalu tekan jam oleh gen jetan ekonomi dan oleh karena itu maka mereka itu termasuk golong an jang malang nasibnja

Golongan inilah jang dinamakan ka- um Marhaen, Artinja kaum melarat, kaum jang dimelaratkan oleh pendja djahan, imperialisme dan kapitalisme. Djadi istilah Marhaen tidak sama de ngan istilah Proletar jang hanja ber arti, kaum pendjual tenaga kepada madjikan2.

Oleh karena sebagian besar Rakjat Indonesia, kurang lebih 91% terdiri dari kaum Marhaen, maka dengan sen dirinja Rakjat Indonesia tidak me- ngalami kemadjuan dan tidak pernah menikmati kebahagiaan Dan untuk memadjukan Rakjat/Bangsa Indone- sia harus ada perdjuangan untuk me ningkatkan taraf hidup kaum Mar haen dimana ia berada dan dari go longan apapun. Kemakmuran dan ke bahagiaan kaum Marhaen, berarti kemadjuan, kemakmuran dan kebaha- gi aan seluruh Rakjat/Bangsa Indone sia.

Sekali lagi, untuk kepentingan ini perlu adanja perdjuangan menudju kearah terwudjudnja masjarakat jang sama rata sama bahagia lahir dan ba thin, masjarakat jang didalamnja ti- dak terdapat penindasan oleh manu sia terhadap manusia atau oleh go longan terhadap golongan, ialah ma- sjarakat Marhaen atau masjarakat sosialis Pantjasialis, masjarakat Adil dan makmur jang diridhoi Tuhan.

Dan siapapun jang berdjuang untuk kepentingan tertjapainja tudjuan per djuangan seperti tsb. diatas, maka ia adalah seorang Marhaenis. Dengan lain perkataan, seorang Marhaenis, adalah mereka jang berdjuang un tuk mentjapai majsarakat jang ber djuang untuk mentjapai masjarakat jang adil dan makmur, masjarakat Marhaenis atau masjarakat sosialis Pantjasila, jang berarti sekaligus me rupakan masjarakat jang bahagia ba gi kaum Marhaen dimanapun ia be rada dan dari golongan apapun.

II. MARHAENISME

Marhaenisme adalah pandangan hi- dup, ismenja kaum Marhaen dan Mar haenis. Artinja Marhaenisme adalah

satu azas, satu ideologie, satu faham dan tjara perdjuangan kaum Marhaen dan Marhaenis.

Dengan landasan azas dan dengan tjara perdjuangan Marhaenisme, kaum Marhaen dan Marhaenis berdjuangan untuk mentjapai masjarakat adil dan makmur atau masjarakat Marhaenis, atau masjarakat sosialis Pantja sila.

Marhaenisme sebagai azas, sebagai ideologi dan sebagai paham politik mengandung tiga unsur, ialah:

a. Ke-Tuhanan Jang Maha Esa,
b. Sosio-Nasionalisme:
c. Sosio-Demokrasi.

SOSIO-NASIONALISME :

Dalam sedjarah dunia, faham kebangsaan atau Nasionalisme, sering dihinggapi oleh sifat angkara murka, sifat bentji ke pada Bangsa lain, sifat chauvinistis dan agresief. Sifat2 jang demikian achirnja menumbuhkan sikap ingin mendjadjah bangsa lain. Itulah faham kebangsaan jang dipe ralat oleh kapitalisme dan imperialisme.

Tetapi sosio—nasionalisme mempunjai watak dan sifat2 jang lain. Sosio-nasonalis adalah faham kebangaan jang berdasarkan pada persamaan nasib, faham kebangsaan gotong rojong faham Kebangsaan jang ben dasarkan hidup kemasjaraakatan, faham ke bangsaan jang berperikemanusiaan, faham kebangsaan berlandaskan pada keingi nan bekerdjasama tidak untuk menggentjet dan mengisap.

Sosio-nasionalisme adalah rasionalisme jang positip kreatip faham kebangsaan jang mentjipta dan memudja.

Sosio berarti kemasjarakatan jang sadar akan kemanusiaan. Dan apabila berbitjra tentang kemasjarakatan dan kemanusiaan, tidak bisa menghindarkan diri dari rasa memudja, jang harus diartikan mengabdi kepada Tuhan Jang Maha Esa. Karena, ke kalah manusia jang melupakan sila urach mi antara manusia dengan manusia dan antara manusia dan Tuhan.

Oleh karena itulah, maka sosio-nasionalis me dengan sendirinja mengandung unsur Ke-Tuhanan Jang Maha Esa.

Sosio-nasionalisme atau faham kebangsaan, masjarakat dalam lingkungan bangsa sendiri, bangsa Indonesia, harus berpotong rojong, dan antara bangsa Indonesia deng an lain2 bangsa djuga harus bekerdja sama dengan pengertian setingkat dan sederadjat.

Dengan demikian maka sosio nasionalisme selalu berwatak anti imperialisme dan anti kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinja.

SOSIO — DEMOKRASI.

Sosio-demokrasi adalah demokrasi kom plit. Artinja demokrasi jang mentjakup dan meliputi: Demokrasi politik, demokrasi eko nomi, demokrasi sosial dan demokrasi ke budajaan.

Demokrasi Politik mengakui hak setiap warga-negara; hak Rakjat, untuk mengatur pemerintahan menentukan haluan dan susu nan Negara.

Demokrasi ekonomi mengakui hak setiap warga-negara, atau setiap orang, untuk hidup sama2 makmur, sama2 mengatur peng hidupan dan kehidupan.

Demokrasi ekonomi berarti mengakui hak hidup setiap warganegara setjara luas dan baik dalam bidang perekonomian.

Demokrasi sosial mengakui hak setiap warga negara, atau setiap orang untuk mendapat penghargaan jang sama sebagai machluk sosial. Demokrasi sosial oleh karenanja mengakui hak setiap orang untuk mentjapai tingkat kemadjuan, tingkat kedu

dukan sosial setinggi-tingginja dalam segala lapangan dan bidang, sesuai dengan bakat dan kemampuannja.

Demokrasi kebudajaan mengakui setiap warganegara dan setiap orang untuk mengembangkan kebudajaan dan menikmati keindahan dan manfaat kebudajaan.

Dalam sosio demokrasi djelas dikehendaki adanja persamaan hak bagi setiap orang, bagi setiap manusia sebagai sesama umat Tuhan Jang Maha Esa.

Dengan demikian maka djelas, bahwa djuga sosio demokrasi tertjakup unsur Ke-Tuhanan Jang Maha Esa.

SOSIO-DEMOKRASI MENGHENDAKI ;

a. Dalam lapangan politik Pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakjat, bentuk Pemerintahan jang sesuai dengan kehendak/suara rakjat dan bentuk negara hukum, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Dalam bidang kemasjarakatan, atau susunan masjarakat jang berdasarkan gotong-rojong atau masjarakat sosialis Pantjasila.

Oleh karena itu maka sosio demokrasi menolak setiap matjam kapitalisme, termasuk staats kapitalisme dan berdjuang untuk mewudjudkan kehidupan kolektip, koperatif. Dan sosio-demokrasi memberi kemungkinan berkembangnja usaha swasta, dalam pengertian tidak menimbulkan akibat hak milik atas alat2 produksi menjebabkan adanja penindasan dan penghisapan.

Demikianlah maka kesimpulannja: Marhaenisme adalah suatu ideologie, atau paham jang termasuk dalam golongan paham Sosialisme, terdiri dari 3 unsur: Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Sosio-nasionalisme dan Sosio Demokrasi. Dengan lain perkataan, Marhaenisme adalah Sosialisme Pantjasila.

III. MARHAENISME, MARXISME DAN PANTJASILA.

Marxisme adalah satu ideologie jang berlandaskan pada karya dan hasil pemikiran Marx. Ada beberapa basic ideas, prinsipalia dan essensalia jang sangat penting dari Marxisme sebagai pertjerminan kemurnian paham, atau ideologi tsb. Diantara sekian banjak prinsipalia dan essensialia jang menondjol ialah .

a. Marxisme tidak mengenal nasionalisme, oleh karena sifatnja jang internasionalistis, kosmopolitan. Marxisme tidak mengenal paham kebangsa - an.

b. Marxisme menganut theori, bahwa kehidupan manusia dan tjorak masjarakat sepenuhnja dipengaruhi dan tergantung pada penghidupan kebendaan, jang terkenal dengan teori histo - ris materialisme.

c. Marxisme tidak mau tahu me - ngenai kekuatan absolut, jaitu Tuhan Jang Maha Esa; akibatnja, anti Tuhan dan anti agama.

d. Marxisme dalam perdjuangannja menudju kearah terwudjudnja susunan masjarakat komunistis, menggunakan rezim diktatur proletariat.

e. Marxisme dengan proletar dan teori meerwaardenja dalam perdjuangan mewudjudkan tjita2nja menganut teori perdjuangan kelas atau klassenstrijd.

Tidak ada satu diantara basic ideas, atau prinsipnja dari Marxisme seperti tsb. diatas jang dianut oleh Marhaenis

me. Ada jang ditolak bahkan ada jang malahan bertentangan dengan Marhaenisme.

Marhaenisme djelas menganut paham kebangsaan ialah kebangsaan kemasjarakatan atau sosio-nasionalisme, menghidup-hidupkan, memelihara dan mempertebal semangat kebangsaan Sosionalisme mengakui bahwa bangsa2 adalah segolongan manusia jang tidak terpisah dengan golongan jang lain, malahan harus hidup bersama dengan golongan2 itu.

Karena itu dalam hubungan Internasional, sosio-nasionalisme mengakui kewadjiban bangsa2 untuk bekerdja-sama menjusun masjarakat bangsa2 sedunia, politis, ekonomis, dan kultuil. Dengan lain perkataan kosmopolitanisme atau internasionalisme jang menghapuskan nasionalisme bertentangan dgn Marhaenisme.

Marhaenisme tidak dapat sepenuhnja membenarkan dalil atau teori bahwa perkembangan kehidupan manusia, dan tjorak masjarakat sepenuhnja dipengaruhi dan tergantung pada kebendaan.

Tidak dapat menerima teori bahwa tjorak masjarakat sepenuhnja dipengaruhi dan tergantung pada keadaan ekonomi.

Marhaenisme berpendapat bahwa bukan hanja kondisi ekonomi, akan tetapi djuga kondisi batin menentukan tjorak dan perkembangan masjarakat. Baik kekuatan rochani atau tjita2 atau kekuatan djasmaniah, atau ekonomi kedua2nja sama2 berpengaruh pada gerak, tjorak dan perkembangan masjarakat.

Oleh karena itulah maka bagi Marhaenisme, teori historis materialisme tidak dapat setjara keseluruhan diterima. Marhaenisme mengakui sepenuhnja adanja kekuatan absolut. Absolute Macht atau adanja Tuhan Jang Maha Esa. Baik sosio nationalisme, atau sosio-demokrasi kedua2nja diresapi sinar hikmah ke Tuhanan Jang Maha Esa. Dengan demikian djelas Marhaenisme adalah ber-Tuhan.

Marhaenisme menganut faham demokrasi, dalam hal ini sosio demokrasi Demokrasi lengkap. atau demokrasi komplit, jang mentjakup demokrasi politik, demokrasi ekonomi demokrasi sosial dan demokrasi kebudajaan. Dan faham sosio-demokrasi menghendaki susunan pergaulan hidup sama rata dan sama bahagia, sehingga dengan demikian menolak setiap matjam/bentuk diktatur. Termasuk diktatur proletariat.

Kaum Marhaen bukan hanja kaum proletar seperti jang dikatakan kaum Marxis ialah kaum pendjual tenaga, bukan hanja kaum buruh jang mendjual tenaganja kepada kaum madjikan. Kaum Marhaenis adalah keseluruhan Rakjat Indonesia dimanapun ia berada dan dari golongan manapun jang dimelaratkan oleh imperialisme, kolonialisme dan kapitalisme.

Dengan demikian maka didalam Marhaenisme tidak dikenal satu matjam kelas, dalam hal ini klas proletar jang tertindas, jang selalu berlawanan dan berhadapan dgn. kaum penindas. sehingga dgn demikian Marhaenisme tidak menganut sistim pertentangan klas seperti jang diadjarkan oleh Marxisme.

Perdjuangan Rakjat Indonesia untuk mentjapai tjita2nja tidak hanja dilakukan oleh satu golongan sadja, akan tetapi oleh segenap potensi kaum Marhaen dan Marhaenis, jang terdiri dari berbagai matjam go

longan. Perdjuangan menghantjurkan kolonialisme, imperialisme dan kapitalisme di laksanakan oleh segenap kekuatan rakjat.

Oleh karena itulah teori perdjuangan klas, atau klassen strijd. jang hanja mengenal perdjuangan satu klas proletar sebagai klas jang tertindas, untuk menghantjurkan klas penindas, kolonialisme, imperialisme dan kapitalisme tidak berlaku bagi Marhaenisme.

Dalam masa pendjadjahan seluruh kekuatan Rakjat, chususnja kaum Marhaen dan Marhaenis berdjuang menghantjurkan kolonialisme, dan setelah mentjapai kemerdekaan, didalam merdeka ini dengan tjara dan gerak lain daripada didjaman kolonialisme landjutkan perdjuangannja membina dan mengisi kemerdekaan sesuai dengan tjita-tjita jang terkandung dalam Pantjasila kita.

Dari kenjataan2 dan perbandingan seperti diatas, maka djelas bahwa antara Marhaenisme dan Marxisme terdapat perbedaan2 jang prinsipiil dan essensiil. Basic ideas prinsipalia dan essensialia adjaran Marxisme bukan sadja tidak berlaku bagi Marhaenisme, akan tetapi bahkan berlawanan.

Dengan demikian maka djelas pulalah bahwa definisi inter—prestasi atau pengertian bahwa Marhaenisme adalah Marxisme jang diterapkan di Indonesia adalah satu penjelewengan jang tidak bisa dibenarkan.

Oleh karena itulah maka Sidang Madjelis Permusjawaratan Partai PNI jang pertama pada bulan Nopember 1966 setjara resmi merombak Deklarasi Marhaenis dengan Yudya Pratidina Marhaenis, jang isinia tegas menjatakan, bahwa Marhaenisme adalah: Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Sosio — Nasionalisme dan Sosio—Demokrasi jang pada hakekatnja sama dengan Pantja-Sila.

Memang ditindjau dari sedjarah, Marhaenisme lebih tua dari pada Pantjasila. Sedjak lahirnja, Marhaenisme mengandung unsur2 Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Sosio—Nasionalisme dan Sosio Demokrasi.

Dengan demikian tidaklah salah kiranja apabila kita katakan bahwa Marhaenisme adalah indentik dengan Pantjasila.

IV. MASJARAKAT MARHAENIS :

karena itu masjarakat Marhaenis adalah masjarakat sosialis Pantjasila, masjarakat adil dan makmur, jang tidak membenarkan adanja tindas menindas antara manusia atau antara golongan, jang bisa menimbulkan bahaja konfrontasi2 bahkan bahaja pertentangan kelas jang berlawanan dengan moral Pantjasila dan UUD 1945.

Pada hakekatnja masjarakat Marhaenis atau masjarakat sosialis Pantjasila adalah suatu perwudjudan djika konsekwen realisasinja, dari Undang2 Dasar 1945, mulai dari Mukadimah sampai batang tubuhnja.

Dan untuk tudjuan ini setiap Marhaenis harus siap berkorban merelakan segala apa jang dimiliki a daripadanja.

Demikianlah pokok2 pendjelasan mengenai Marhaenisme jang dianut oleh PNI/ Organisasi Massa Marhaen.

V. PNI DAN MARHAENISME.

PNI didirikan pada tgl. 4 Djuli 1927. Pada saat didirikan. PNI menggunakan 'Marhaenisme' sebagai azas, baru diantara tahun 1927/1929 Marhaenisme sebagai tjara dan teori perdjuangan dipopulerkan dan pengertian mengenai Marhaenisme sebagai azas perdjuangan ialah Sosio—nasionalisme dan sosio-demokrasi.

Pada tahun 1933 oleh Partindo (setelah PNI mengalami perpetjahan) dikeluarkanlah thesis jang menjangkut 'Marhaenisme' sebagai azas perdjuangan. Thesis ini dikenal sebagai 9 thesis perdjuangan Marhaenisme.

Sedjak Partindo dan PNI pada tahun 1933 dikenakan larangan oleh Pemerintah Kolonial Belanda maka tidak ada kegiatan setjara legal.

Setelah proklamasi kemerdekaan pada tgl. 17 Agustus 1945 dan terbuka kesempatan mendirikan Partai2 Politik baik di Djakarta ataupun diwilajah RI. berdirilah Partai2 jang dipelopori oleh Tokoh2 PNI. Di Djakarta dan dibeberapa Daerah berdiri 'Serikat Rakjat Indonesia', disingkat 'SERINDO di Jogjakarta berdiri Partai Kedaulatan Rakjat, di Makassar berdiri Partai Nasional.

Achirnja pada bulan Februari 1946 berkumpullah tokoh2 dari Partai2 seperti diatas dikota Kediri, dan berhasil mentjapai kata sepakat mendirikan Partai Nasional Indonesia disingkat PNI sebagai pelebur Partai tsb. diatas dan sebagai kelandjutan PNI th. 1927. Ditetapkan azas Partai Sosio Nasional—Demokrasi gabungan dari Sosio - Nasionalisme dan Sosio Demokrasi.

Pada th. 1952 mengadakan Konggres di Surabaja dan mempertegas azas Partai mendjadi "Marhaenisme" jang isi dan pengertian semula ialah sosio nasionalisme dan sosio demokrasi.

Dalam pendjelasan mengenai "Marhaenisme" sebagai azas, tidak pernah disebut2 masalah Marxisme.

Pada th. 1958 Bung Karno pada suatu kesempatan mendjelaskan bahwa 'Marhaenisme' adalah: het in Indonesia toegepaste marxisme.

Penegasan seperti tsb. diatas menimbulkan kehebohan didalam tubuh PNI dan menjebabkan timbul pro dan kontra. Achirnja terdjadilah pemisahan tokoh PNI dipelopori oleh Winarno, Asmara Hadi dan Winoto jang kemudian menghidupkan kembali Partindo.

Pada tahun 1960 PNI mengadakan Konggres di Sala dan mengambil keputusan membentuk Panitya Doktrin jang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai, ialah Ali Sastroamidjojo,

Panitya doktrin terkenal dengan Panitya 5, menghasilkan satu naskah jang berdjudul Dasar2 Pokok Marhaenisme'.

Djuga dalam naskah tsb tidak tertjantum tafsir bahwa Marhaenisme adalah Marxisme jang ditrapkan di Indonesia sesuai dengan kondisi, situasi dan sedjarahnja. Dengan lain perkataan, pengertian Marhaenisme tidak berobah, tetap sosio nasionalisme dan sosio demokrasi, dengan pengakuan terhadap adanja Kekuasaan Tuhan Jang Maha Esa.

Tahun 1963 PNI mengadakan Kongres di Purwokerto, Saudara Ali Sastroamidjojo terpilih kembali sebagai Ketua Umum dan Saudara Ir. Surachman sebagai Sekretaris Djenderal.

Pada bulan Nopember 1964 berlangsung Sidang 1 Badan Pekerdja Kongres di Lembang dan disinilah lahir Deklarasi Marhaenis jang menjatakan bahwa Marhaenisme adalah Marxisme jang ditrapkan di Indonesia sesuai dengan kondisi, situasi serta sedjarahnja.

Difinisi ini lebih tepat disebut tafsiran. Tafsiran ini kembali menimbulkan kegontjangan dalam tubuh PNI jg achirnja berakibat setjara menjeluruh sedjak bulan Agustus 1965.

Pada bulan April 1966 setelah peristiwa penghianatan G.30 S/PKI atas prakarsa Pak Hardi maka berlangsunglah Kongres Persatuan dan Kesatuan PNI/FM di Bandung dalam Kongres mana diambil keputusan adanja keharusan kristalisasi dalam tubuh PNI/Organisasi Massa—Marhaen.

Pada bulan Nopember 1956, berlangsung Sidang I Madjelis Permusjawaratan Partai PNI di Djakarta. Dalam Forum inilah di ambil keputusan setjara bulat untuk me ngembalikan pengertian/difinisi 'Marhaenisme' pada keasliannja.

Oleh karena itu maka ditjabutlah „Deklarasi Marhaenis' dan diganti dengan 'Yudya Pratidina Marhaenis.'

Dalam Yudya Pratidina Marhaenis' tertjantum dengan tegas, bahwa tafsiran Marhaenisme adalah: Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Sosio—Nasionalisme dan Sosio—De - mokrasi. Hal ini berarti, bahwa pengertian tafsir dan difinisi 'Marhaenisme' sebagai azas PNI jang pernah menjimpang dari garis aslinja selama 2 tahun (Nopember 1964 Nopember 1966) mulai bulan Nopember 1966 kembali pada sumber aslinja.

PAKSHA ADIGAMA

HALUAN POLITIK PARTAI PNI

PEMBUKAAN

Perdjuangan Partai Nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perdjuangan Bangsa Indonesia, halmana dapat dibuktikan oleh Sedjarah.

Perdjuangan Bangsa Indonesia ditudjukan untuk menghapuskan pendjadjahan diatas bumi Indonesia dan kemudian dengan Negara Republik Indonesia jang bebas dan merdeka itu sebagai wadah dan sarana, maka perdjuangan dilandjutkan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial serta demi untuk mewudjudkan peri kemanusiaan.

Sedjak PNI didirikan pada tahun 1927, maka PNI terus-menerus tanpa absen berpartisipasi dengan gigih dan penuh pengorbanan didalam perdjuangan tsb.

Dengan Rachmat Tuhan Jang Maha Esa, sedjak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, perdjuangan itu memiliki suatu wadah dan sarana jang lebih kuat lagi untuk mentjapai tudjuan Revolusi jaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan **Pantja Sila.**

Tudjuan Revolusi Indonesia mentjakup sarana perdjuangan PNI.

Tudjuan Revolusi Indonesia adalah untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakjat, tudjuan mana kemudian dikonkritkan dalam **Tiga Kerangka Tudjuan Pokok Revolusi** Indonesia sebagai tjita2 Negara dan Bangsa Indonesia jaitu :

1. Menegakkan dan mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pantja Sila jang berwilajah dari Sabang sampai Merauke.
2. Menjusun masjarakat jang adil-makmur lahir dan bathin jang diridhoi oleh Tuhan Jang Maha Esa.
3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial dan perdamaian jang abadi.

Tudjuan perdjuangan itu bersumber pada falsafah dan dasar Negara Pantja Sila sesuai dengan apa jang telah ditetapkan dan tersirat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Tudjuan untuk menegakkan dan mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pantja Sila jang berwilajah dari Sabang sampai Merauke mengandung arti, bahwa tjita2 kita bukanlah menudju kepada sistim feodal, absolut atau sistim diktatur dalam segala bentuk dan manifestasinja, tapi jang ditjita2kan adalah Negara Nasional jang berdasarkan hukum = Recht staat/pemerintahannja demokratis dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan Rakjat.

Tudjuan untuk menjusun masjarakat adil dan makmur lahir dan bathin jang diridhoi oleh Tuhan Jang Maha Esa adalah masjarakat jang mampu untuk mengolah kekaja-an Nasional dalam rangka meningkatkan produksi proces dimana kekajaan Nasional terbagi setjara adil, dimana seluruh Rakjat setjara merata dapat merasakan hidup bahagia, sedjahtera lahir bathin, tidak kurang sandang pangan dan perumahan, bebas dari kemiskinan materiil dan spirituil. Masjarakat jang ditjita2kan adalah masjarakat jang berkeadilan sosial, masja-

rakat jang bebas dari dominasi oleh satu golongan atau aliran apapun, bebas dari rasa takut terhadap siapapun bebas dari exploitasi dari manapun asalnja, hingga Rakjat mempunjai kesempatan bekerdja dengan giat dan tekun didalam suasana aman dan tenteram dan ketertiban, dimana Rakjat dapat menikmati pelaksanaan hak2 azasinja pendidikan pengadjaran dan kebudajaan jang berkepribadian Indonesia serta dimana Rakjat dapat beribadah menurut agama dan kepertjajaannja masing2.

Tudjuan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial dan perdamaian jang abadi berarti bahwa Bangsa Indonesia menentang kapitalisme, imperialisme dan kolonialisme serta segala matjam dominasi dari Negara, Bangsa, kekuatan dan dari aliran apapun.

Tudjuan termaksud diatas mengandung djuga suatu arti bahwa Negara dan Bangsa Indonesia bekerdja keras untuk memelihara persahabatan dan kerdjasama dengan Negara2 dan Bangsa2 lain diatas dasar sama deradjad dan saling hormat menghormati.

Masjarakat jang ditjita2kan sebagaimana digambarkan diatas itu merupakan gambaran dari masjarakat Marhaenis berdasarkan Ketuhanan Jang Maha Esa, Sosio Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi.

Djelaslah kiranja, bahwa tudjuan perdjuangan PNI mentjakup tjita2 Negara dan Bangsa Indonesia.

Masjarakat Marhaenis adalah sama dengan masjarakat sosialis Pantja Sila, masjarakat gotong-rojong jang tidak membenarkan adanja tindas menindas golongan tindakan mana berlawanan dengan moral Pantjasila dan UUD 1945.

Pada Hakekatnja masjarakat adil dan makmur, masjarakat Marhaenis jang sama dengan masjarakat sosialis Pantjasila adalah suatu perwudjudan dari UUD '45 mulai dari Mukadimah sampai batang tubuhnja.

Tantangan2 jang dihadapi Negara merupakan tantangan pula bagi PNI.

Sedjarah Revolusi Indonesia mengalami pasang surut.

Sedjarah Revolusi Indonesia, disamping adanja hasil2 gemilang, memiliki pula lembaran2 hitam jang berbentuk peristiwa2, misalnja : Pemberontakan PKI Madiun, APRA, ANDI AZIZ, Peristiwa RMS, DI/TII, PRRI/PERMESTA, dan jang achir dengan adanja gerakan Kontra Revolusi G 30.S/PKI.

Peristiwa2 itu jang pada hakekatnja merupakan penghianatan terhadap tjita2 Revolusi Pantjasila, menjebabkan Negara dan Bangsa kita menderita kerugian besar dgn gugurnja patriot2 kusuma Bangsa kerugian dibidang materiil, hingga keseluruhanja itu menimbulkan kemerosotan dibidang politik ekonomi, sosial dan mental kebudajaan.

Chusus didalam masa proloog, pada saat terdjadinja peristiwa G.30.S/PKI dan pada epiloognja gerakan kontra revolusi termaksud, kita telah mengkonstatir adanja penjelewengan2 terhadap Pantjasila dan UUD 1945, serta penjelewengan2 dibidang ekonomi. Achirnja semuanja itu telah menimbulkan suatu situasi konflik jang membahajakan persatuan/kesatuan Bangsa dan tata kehidupan politik ekonomi sosial dan mental kebudajaan-keagamaan.

Dengan adanja usaha2 oleh Pemerintah dan Rakjat untuk mengatasi situasi konflik tsb. dengan tjara2 politis konstitusionil 'clearing-approach' dan 'personal-approach' maka Rakjat Indonesia bersjukur kepada Tuhan J.M.E. bahwa hasil2 Sidang Istimewa MPRS dari tgl. 7 s/d 12 Maret 1967 sebagai rangkaian dan kelengkapan Sidang Umum ke IV MPRS bulan Djuni-Djuli 1966, telah berhasil mengatasi situasi konflik tsb. Peristiwa tsb. merupakan tonggak sedjarah

dalam perdjuangan mewudjudkan Orde Baru/Orde Pantjasila.

Lembaran2 hitam dari sedjarah Revolusi Indonesia jang membawakan tantangan2 terhadap Bangsa dan Negara, dengan sendirinja membawakan djuga tantangan2 terhadap PNI dan segenap Massa-nja. PNI jakin sejakin2nja bahwa Pantjasila merupakan satu2nja dasar dan falsafah Negara jg mendjamin tegaknja Negara Kesatuan R.I Pantjasila, berwilajah dari Sabang sampai Merauke, serta mendjamin terwudjudnja masjarakat adil makmur materiil dan spirituiil.

Maka dari itu PNI dengan segenap Ormas-ormasnja dan segenap massa-Marhaen menentang setiap usaha dari manapun datangnja dan bagaimanapun bentuknja dan tjoraknja jang akan menghianati, mengkaburkan, merobah dan meniadakan Pantjasila tersebut.

Demikianlah penegasan pendirian PNI dalam Yudya Pratidina Marhaenis jang di tjetuskan pada bulan Nopember 1966, sebagai kebulatan tekad PNI untuk melandjutkan perdjuangan menegakkan, mengamankan dan mengamalkan Pantja Sila

Sedjarah perdjuangan PNI ber-sama2 dgn. kekuatan Pantjasilais lainnja dalam menghadapi: sidang2 konstituante, pemberontakan-pemberontakan sebagaimana dimaksud diatas, memberikan pembuktikan sedjarah, bahwa pendirian jang ditegaskan merupakan pendirian prinsipiil jang telah dan akan terus dilaksanakan setjara konsekwen.

Segenap patriot Pantjasila-is tentu menjadari se-dalam2nja bahwa :

1. Negara Republik Indonesia dan Pantjasila sebagai dasar/falsafah Negara hingga kini dan untuk masa2 jang akan datang masih mendapatkan tantangan dan rongrongan baik kekuatan2 negatip jang anti Pantjasila lainja.

2 Keadaan politik, ekonomi, sosial, budaja dan keagamaan masih djauh dari apa jg di-tjita2kan oleh Rakjat Indonesia.

Maka mendjadi kewadjiban bagi Pemerintah ber-sama2 segenap kekuatan Pantjasila-is dengan ridho Tuhan Jang Maha Esa untuk serentak mengingatkan kesadaran, tekad serta daja djuang, guna melandjutkan perdjuangan mengemban AMPERA demi suksesnja Revolusi Pantjasila jang sasarannja dituangkan dalam Tiga Kerangka Pokok Revolusi Indonesia termaksud diatas,

Terdorong oleh rasa tanggung-djawab jg tinggi jang ditumbuhkan oleh kesadaran sedjarah dan tuntutan2 Revolusi Pantjasila dan didorong oleh tuntutan Hati-nurani Rakjat Marhaen untuk merealisasikan' : sistim politik, ekonomi dan sosial-budaja-keagamaan sesuai dengan Pantjasila dan Undang2 Dasar '45 termaksud diatas itulah serta sesuai pula dengan YUDYA PRATIDINA MARHAENIS, maka segenap potensi PNI dan Organisasi massa-nja :

- berlandaskan azas partai jaitu MARHAENISME dengan tafsiran dan perumusan jang asli/murni dan bebas dari pengaruh2 Marxisme.
- jang terkonsolidasi dan telah mengalami kristalisasi setjara positip.

harus ditingkatkan perdjuangannja untuk mengamankan dan mengamalkan Pantjasila, untuk menjumbangkan amal dan dharma baktinja kepada Negara, dan Masjarakat Indonesia guna mensukseskan pelaksanaan tjita2 perdjuangan ber-sama2 Pemerintah dan kekuatan Pantjasila-is lainnja dalam keadaan rukun dan damai dengan semangat gotong-rojong (partner-ship) jang djudjur dan ichlas.

I. LANDASAN PERDJUANGAN

Landasan-landasan Dasar Kenegaraan

Demi untuk suksesnja tudjuan Negara dan Bangsa Indonesia itu maka perdjuangan Bangsa Indonesia harus diberi landasan2 jg kuat tak tergojahkan dan tak boleh dirubah jakni :

1. LANDASAN IDIIL : Falsafah, Ideologi atau Dasar Negara Pantjasila jaitu : **Ketuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan jang adil dan beradab, Persatuan** (Kebangsaan) Indonesia **Kerakjatan** jg dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan dan **Keadilan Sosial.**
2. LANDASAN KONSTITUSIONIL : Undang2 Dasar 1945.
3. LANDASAN STRUKTURIL : Pemerintahan demokratis jang berbentuk Kabinet Presidentil.
4. LANDASAN OPERASIONIL : Garis2 Besar Haluan Negara dan Ketetapan2 MPRS.

Bagi suksesnja perdjuangan PNI dalam rangka perdjuangan Negara dan Bangsa termaksud diatas, dengan sendirinja diberlakukan pula landasan2 dasar kepartaian jang tidak boleh bertentangan dengan landasan2 dasar Kenegaraan termaksud diatas.

LANDASAN-LANDASAN DASAR KEPARTAIAN

1. LANDASAN IDIIL : MARHAENISME. Sesuai dengan YUDYA PRATIDINA MARHAENIS, PNI berpendirian bahwa perdjuangan tidak akan sukses tanpa didasari oleh teori-perdjuangan jang revolusionei.

Marhaenisme adalah suatu teori dan tjara perdjuangan jang revolusioner jang berintisarikan mendjebol Orde Lama, jaitu sistim Kapitalisme, Imperialisme; Kolonialisme, Neo Kolonialisme dan feodalisme serta penjelewengan2 terhadap Pantjasila dan UUD '45, untuk membangun Orde Baru/ Orde Pantjasila.

jaitu: Sistim Demokrasi Pantjasila dan menjusun masjarakat Marhaenis, jaitu Masjarakat sosialis berdasarkan Pantjasila Azas PNI adalah "MARHAENISME" jang rumusannja sebagaimana telah ditegaskan dalam YUDYA PRATIDINA MARHAENIS ialah: Ketuhanan Jang Maha Esa, Sosio-nasionalisme dan Sosio-demokrasi.

Rumusan termaksud diatas adalah rumusan dan tafsiran asli/murni sedjak 1927 dan sama sekali bebas dari pengaruh — pengaruh Marxisme dan telah mengganti „Doklarasi Marhaenis".

Dengan azas Marhaenisme jang arti, sifat dan rumusannja sebagai dimaksud diatas itulah, maka PNI dengan segenap massanja setjara konsekwen akan melandjutkan perdjuangan untuk menegakkan mangamankan dan mangamalkan Pantja Sila serta melaksanakan UUD 1945 setjara murni dan konsekwen dalam rangka dan membina Orde Baru/Orde Pantja Sila.

Marhaenisme jang ditjetuskan pada tahun 1927 hampir bersama dengan berdirinja PNI sebagai alat perdjuangan jang ampuh dan kompeten untuk dipergunakan sebagai landasan idiil guna mensukseskan Revolusi Pantja Sila termaksud diatas, karena adjaran Marhaenisme sebagai theori perdjuangan jang berkepribadian Indonesia itu lahir sebagai hasil panarikan peladjaran sedjarah dari praktek perdjuangan rakjat Indonesia melawan sistim pandjadjahan Belanda.

PANTJA SILA jang ditjetuskan setjara resmi pada tanggal 1 Djuni 1945, kemudian mendjadi dasar/falsafah Negara mengandung Sila-sila jang isi dan maknanja sama dengan unsur2 prinsip2 Marhaenisme, hal mana akan didjelaskan dibawah ini.

MARHAENISME dan PANTJA SILA

Diatas telah didjelaskan, bahwa untuk mentjapai tudjuan2 termaksud diatas, maka setiap perdjuangan harus mempunjai landasan jang kuat, jaitu landasan idiil. Landasan idiil bagi perdjuangan Negara dan Bangsa Indonesia adalah Pantja Sila jang telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang2 Dasar 1945. Landasan idiil Pantja Sila selain juga merupakan falsafah Negara dan Bangsa Indonesia, merupakan dasar Negara jang kokoh kuat, merupakan bimbingan tuntunan jang memberikan arah dan pedoman bagi perdjuangan Bangsa dan djuga merupakan pandangan hidup dari Bangsa Indonesia.

Negara Republik Indonesia Pantja Sila merupakan wadah dari Bangsa Indonesia jang terdiri dari banjak sekali suku2 Bangsa jang bersatu dalam "Bhinneka Tunggal Ika", dan djuga mendjadi wadah dari banjak kekuatan sosial-politik (parpol, ormas, Golkar) dengan aliran jang berbeda2. Meskipun demikian kesemuanja itu harus merasa berkewadjiban untuk bersama2 menegakkan, mengamankan dan mengamalkan Pantjasila sebagai falsafah dan dasar perdjuangan. Demikian halnja dengan PNI.

Agar supaja perdjuangan PNI terdjamin mentjapai sukses, maka PNI harus mempunjai landasan idiil jang merupakan azas dari Partai.

Marhaenisme sebagai azas PNI merupakan dasar perdjuangan jang memberikan arah, tuntunan dan tudjuan sekaligus seperti jang ditegaskan dalam YUDYA PRATIDINA MARHAENIS. Mengingat hal2 termaksud diatas, maka Marhaenisme sebagai azas Partai diperlukan setjara mutlak, tanpa mengurangi pentingnja pragmatisme dalam mendjalankan program partai. Sebaliknja pragmatisme tanpa landasan idiil dapat menjimpang dari prinsip2 perdjuangan.

Antara Marhaenisme dan Marxisme terdapat perbedaan jang prinsipiil dan essensiil. Prinsip2 dan essensialia adjaran Marxisme bukan sadja tidak berlaku bagi Marhaenisme, akan tetapi bahkan berlawanan. Buktinja adalah demikian.

Marhaenisme djelas menganut faham kebangsaan, jaitu kebangsaan jang berdjiwa kemasjarakatan atau sosio-nasionalisme. Marhaenisme menghidupkan, memelihara dan mempertebal semangat kebangsaan.

Sosio-nasionalisme mengakui bahwa bangsa-bangsa adalah golongan2 manusia jang tidak dapat terpisah satu dengan jang lain, malahan harus hidup bersama dalam masjarakat bangsa2 atau masjarakat-dunia.

Karena itu dalam hubungan internasional, sosio-nasionalisme mengakui kewadjiban bangsa2 untuk bekerdja sama menudju masjarakat bangsa2 sedunia, bebas dari dominasi, bebas dari pendjadjahan, penindasan, politis, ekonomis dan kulturil.

Sebaliknja, Marxisme tidak mengenal faham kebangsaan atau nasionalisme, oleh karena menganut faham cosmopolitanisme-internasional.

Marhaenisme tidak dapat membenarkan dalil atau teori bahwa perkembangan kehidupan manusia dan tjorak masjarakat sepenuhnja dipengaruhi dan tergantung pada kebendaan, tidak dapat menerima teori bahwa tjorak masjarakat sepenuhnja ditentukan dan tergantung pada keadaan ekonomi.

Marhaenisme berpendapat bahwa bukan hanja kondisi ekonomi, akan tetapi djuga kondisi kedjiwaan menentukan tjorak dan perkembangan masjarakat. Baik kemauan rochani atau tjita2-an kekuatan [illegible] [illegible] pula gerak, tjorak dan perkembangan masjarakat.

Oleh karena itulah maka, bagi Marhaenisme, teori historis materialisme tidak dapat setjara keseluruhan diterima. Marhaenisme mengakui sepenuhnja adanja Tuhan Jang Maha Esa. Baik sosio-nasionalisme atau sosio-demokrasi, kedua-duanja diresapi sinar-hikmah ke Tuhanan Jang Maha Esa.

Dengan demikian djelaslah bahwa Marhaenisme adalah faham jang berke-Tuhanan J.M.E., sedangkan marxisme tidak mau tahu-menahu tentang adanja Tuhan dan anti agama.

Marhaenisme menganut faham Demokrasi dalam hal ini sosio-demokrasi Demokrasi lengkap jang mentjukup demokrasi politik demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Faham sosio-demokrasi menghendaki susunan pergaulan hidup sama-rata dan sama bahagia, sehingga dengan demikian menolak setiap matjam/bentuk diktatur, i.c. diktatur proletariat.

Kaum Marhaen bukan hanja proletar seperti dikatakan oleh kaum Marxis ialah kaum pendjual tenaga, bukan hanja kaum buruh jang mendjual tenaganja kepada kaum modal. Kaum Marhaen adalah keseluruhan rakjat Indonesia dimanapun ia berada dan dari golongan manapun jang dimelaratkan oleh Kapitalisme, Imperialisme dan Kolonialisme.

Dengan demikian maka didalam Marhaenisme tidak dikenal satu matjam kelas, dan dengan sendirinja tidak menganut teori perdjuangan kelas seperti jang diadjarkan oleh Marxisme.

Perdjuangan rakjat Indonesia untuk mentjapai tjita2nja, tidak hanja dilakukan oleh satu golongan sadja, akan tetapi oleh segenap potensi kaum Marhaenis dan Marhaenis, jang terdiri dari berbagai2 matjam golongan. Perdjuangan menghantjurkan Kapitalisme, Imperialisme Kolonialisme dan segala bentuk dominasi serta feodalisme dilaksanakan oleh segenap kekuatan rakjat. Demikian pula perdjuangan terhadap kemiskinan dan kemelaratan jang disebabkan oleh tidak adanja tanggung-djawab dari sementara Pemimpin2 Indonesia sendiri.

Oleh karena itulah teori perdjuangan klas atau klassenstrijd jang hanja mengenal perdjuangan klas proletar tidak sesuai dengan Marhaenisme.

Dalam masa pendjadjahan, kekuatan rakjat, berdjuang menghantjurkan kolonialisme dan kemudian segenap Bangsa melandjutkan perdjuangannja untuk membina dan mengisi kemerdekaan sesuai dengan tjita2 kita berdasarkan Pantjasila.

Djelaslah kiranja, bahwa rumusan "Marhaenisme adalah Marxisme jang ditrapkan di ..." merupakan penjelewengan. Maka dari itu sidang Madjelis Permusjawaratan Partai (MPP) jang pertama pada bulan Nopember 1966 setjara resmi menjatakan "Deklarasi Marhaenis" dan menggantinja dengan Yudya Pratidina Marhaenis jang tegas menjatakan bahwa Marhaenisme jang tegas menjatakan, bahwa Marhaenisme adalah : Ketuhanan Jang Maha Esa, Sosio-Nasionalisme dan Sosio Demokrasi, Jang maknanja dan djiwanja identik/sama dengan Pantja Sila.

Sosio-Nasionalisme adalah faham kebangsaan jang tidak mengandung arti sempit/chauvinistis dan agressip tetapi bersifat gotong rojong dalam melakukan kerdja-sama Sifat itu djuga berlaku dalam kerdja sama dengan bangsa2 lain, kerdja sama atas

dasar saling hormat menghormati dan sama deradjad.

Sosio-nasionalisme adalah faham kebangsaan berdasarkan persamaan nasib dan sepenanggungan, tidak unuk gentjet-menggentjet tapi faham kebangsaan jang berperikemanusiaan.

Sosio-nasionalisme adalah faham kebangsaan berlandaskan keinginan untuk bekerdja sama jang berdjiwa kemasjarakatan apabila positip-kreatip.

Dan apabila kita berbitjara tentang "perikemanusiaan", kita tidak bisa menghindarkan diri dari apa rasa bertakwa kepada TUHAN JANG MAHA ESA. Oleh karena itulah maka sosio-nasionalisme dengan sendirinja mengandung unsur ke-Tuhan-an Jang Maha Esa.

Djelaslah kiranja, bahwa "Sosio-nasionalisme" mentjakup arti, isi dan makna:

a. Sila Kedua dari Pantjasila: "Kemanusiaan jang adil dan ber-adab" atau "Perikemanusiaan".
b. Sila Ketiga dari Pantja Sila "Persatuan Indonesia atau Kebangsaan Indonesia.

Sosio-demokrasi adalah demokrasi lengkap. Artinja demokrasi jang mentjakup dan meliputi demokrasi jang mentjakup dan meliputi demokasri politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial.

Demokrasi Politik, mengakui prinsip kedaulatan Rakjat, dan mengakui pula hak setiap warga negara, hak rakjat untuk mengatur pemerintahan Negara jang berbentuk Negara Hukum menentukan haluan Negara.

Demokrasi ekonomi mengakui hak setiap warga negara untuk hidup sama2 makmur, sama2 mengatur perekonomian Negara dan Rakjat.

Demokrasi sosial mengakui hak setiap warga negara, untuk mendapat perlakuan jang sama sebagai machluk sosial.

Demokrasi sosial oleh karenanja mengakui hak setiap orang untuk mentjapai tingkat kemadjuan, tingkat kedudukan sosial setinggi2nja dalam segala bidang dan lapangan sesuai dengan bakat dan kemampuannja.

Dengan demikian djelaslah pula, bahwa Demokrasi sosial mentjakup arti, isi dan makna :

a. Sila Keempat dari Pantja Sila: Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan atau kedaulatan Rakjat/ Demokrasi, dan
b. Sila Kelima: Keadilan Sosial.

Dengan pendjelasan termaksud diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa Marhaenisme dengan rumusan: Ketuhanan Jang Maha Esa, Sosio-Nasional dan Sosio-Nasional dan Sosio-Demokrasi mentjakup isi makna dari ke-lima Sila dari Pantja Sila.

Djelaslah kiranja bahwa persamaan makna/djiwa Marhaenisme merupakan penjimpulan jang logis jang sama sekali bebas dari maksud2 untuk menurunkan deradjat dari Pantja Sila sendiri.

Djustru kesamaan djiwa/semangat itulah jang mendorong PNI sebagai kekuatan jang setjara politis/ideologis akan konsekwen menegakkan, mengamankan dan mengamalkan Pantja Sila, halmana telah dibuktikan dalam sedjarah pada waktu sidang1 Konstituante tahun 1957 dan pada waktu sidang2 Konstituante tahun 1957 dan pada waktu Negara RI, Pantja Sila dilanda oleh pemberontakan2 jang hendak meniadakan Pantja Sila.

1. LANDASAN STRUKTURIL : PNI DENGAN SEGENAP ORMAS2NJA.

YUDYA PRATIDINA MARHAENIS menegaskan bahwa untuk mensuksesekan perdjuangan termaksud diatas, maka mutlak perlu adanja satu barisan Massa Mar

haen/Marhaenis jang kompak dinamis, militant, radikal-progresip revolusioner dan berdisiplin, jang dihimpun dalam suatu wadah/organisasi-perdjuangan. Partai Nasional Indonesia dengan segenap organisasi massa Marhaen adalah alat kaum Marhaen/Marhaenis untuk memperdjuangkan dan merealisasikan tjitanja, sebagaimana diatas.

Untuk mensuksesekan perdjuangan sebagaimana dilukiskan diatas maka PNI/Ormas2 PNI — sebagai alat perdjuangan Rakjat Marhaen jang dibenarkan oleh Ketentuan dalam pasal UUD 1945, harus kuat.

Akan tetapi perlu dikonstatir sebagai kenjataan bahwa dewasa ini PNI/Ormas2 PNI sedang berada dalam taraf rehabilisasi sesudah ditanda oleh perpetjahan jang disebabkan oleh karena kesalahan kebidjaksanaan politik/Organisatoris pada masa proloog dan epiloognja G.30S/PKI.

Segenap warga PNI mengutjap sjukur kehadlirat Tuhan JME jang oleh Rachmat-Nja dapat ditjegah kehantjuran total dari PNI dengan adanja usaha pemersatuan PNI, jang diprakarsai oleh Djenderal SUHARTO, bersama2 kekuatan2 dalam tubuh PNI sendiri.

Berhubung dengan hal2 termaksud diatas maka djelaslah kiranja bahwa potensi PNI jang diperlukan sebagai faktor stabilisasi politik, terutama sesudah hantjurnja PKI dan Ormas2nja-perlu ditingkatkan maksimal, sebagaimana diperlukan untuk menunaikan tugas2 sebagaimana digambarkan diatas.

II GARIS dan SASARAN PERDJOANGAN PARTAI—

A. Bidang Politik.

Pengertian Orde Baru/Orde Pantja Sila

"Orde Baru adalah tata kehidupan masjarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia jang didasarkan pada pelaksanaan Pantja Sila dan UUD '45 setjara murni dan konsekwen".

"Orde Baru harus mengandung sikap, tekad dan iktikad baik jang sedalam2nja untuk mengabdi kepada Rakjat mengabdi kepada kepentingan Nasional berlandasan Pantja Sila dan UUD '45" Demikianlah rumusan mengenai pengertian Orde Baru/Orde Pantja Sila jang diberikan oleh Pemerintah.

Meskipun bermatjam2 tuduhan dilontarkan terhadap PNI, tapi sedjarah perdjuangan PNI membuktikan, bahwa PNI sebagai partai tidak pernah menginginkan adanja individu2 jang menjeleweng. Hal pengertian termaksud diatas, terlepas dari itu tidak hanja terdjadi didalam lingkungan PNI tapi djuga dalam lingkungan kekuatan kekuatan sosial politik lainnja.

Dalam rangka menegakkan dan membina Orde Baru, maka dalam YUDYA PRATIDINA MARHAENIS ditandaskan bahwa PNI berkewadjiban mengisi dan membina tata kehidupan Demokrasi Politik jang berintikan Kerakjatan jang dipimpin oleh Hikmat Kebidjaksanaan Permusjawaratan/Perwakilan jang melempar djauh2 sistim absoluut atau Demokrasi Liberal, serta membina sistim Demokrasi Ekonomi Demokrasi Sosial dan Tata-kehidupan berdaja-ke-agamaan sesuai dengan Pantja Sila Undang2 Dasar 1945 serta Keputusan2 MPRS.

Berhubung dengan hal-hal termaksud diatas, maka-maupun di forum lembaga2 kenegaraan atau dalam kehidupan kemasjarakatan oleh PNI bersama-sama Pemerintah dan kekuatan2 Pantja Sila-is lainnja harus diusahakan tetap tegak teguhnja dasar, ideologi dan falsafah Negara Pantjasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Setiap usaha untuk menjadakan, mengganti, merongrong; mengamandeer dan memodifieer Pantja Sila harus ditjegah dan terhadap pelaku-pelakunja harus diambil tindakan tegas menurut hukum.

Membina dan mengisi Orde Pantja Sila berarti menegakkan sistim demokrasi Pantja Sila.

Untuk merealisasikan kehidupan demokrasi Pantja Sila dan untuk melaksanakan ketentuan2 dalam UUD 1945 maka PNI mendjamin akan terus menerus berusaha, agar supaja fihak Pangusaha mendjamin pelaksanaan hak—hak demokrasi menurut Pasal 28 UUD 1945, jaitu:

— Kemerdekaan berserikat, berkumpul; mengeluarkan pikiran setjara lisan dan tulisan.

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul dimanifestasikan dalam bentuk djaminan bagi hak-hidup partai2, organisasi kekarjawanan dan organisasi massa lainnja, selama organisasi tersebut setia pada Pantja Sila, dan djaminan terhadap peranannja sebagai kekuatan sosial-politik.

Untuk menjempurnakan kehidupan politik dan untuk pentjerminan perwakilan dari pada kekuatan2 sosial-politik dalam lembaga2 kenegaraan, pemilihan umum jang bersifat umum, bebas dan rahasia harus dilaksanakan, dalam waktu jang setjepat mungkin.

Hasil Pemilihan Umum itu harus dapat memberikan djaminan dipertahankannja Pan

tja Sila.

Untuk mentjegah dan merobah sistim multi-partai perlu adanja pandjederhanaan kepartaian, ke-ormasan. Pelaksanaan penjederhanaan kepartaian, ke-ormasan dalam waktu djangka pandjang, dilakukan dengan "sistim pengguguran/dropping" dimana suatu persentasi minimal dari seluruh djumlah suara menentukan gugur atau tidak-gugurnja hak-hidup dari Parpol/Ormas jbs.

Usaha untuk merealisasikan Pemerintahan demokratis selalu harus dilandaskan pada :

— Undang2 Dasar 1945, jo Undang2 No. 10/1966.
— Ketetapan2 MPRS.
— Prinsip2 Demokrasi Pantja Sila jang mengakui hak-hidup partai2;
— prinsip Negara Hukum (rule of law).

Demikian pula, dalam usaha untuk mensukseskan pelaksanaan tjita2 perdjuangan, perlu terus menerus diusahakan untuk :

a. memupuk persatuan dan kesatuan Bangsa (kerukunan Nasional)

b. memupuk kerdja-sama jang erat disemua forum antara: kekuatan sosial-politik Pantja Sila-is dan Pemerintah c.q. ABRI (partnership ORBA).

Sebagai konsekwensi politis-logis dari kerdja sama itu dan untuk menarik garis lurus-fungsionil dari kekuatan sosial-politik dari masjarakat — ke lembaga legislatip dan — sampai ke lembaga eksekutip maka kekuatan sosial politik Pantja Sila-is harus mendapatkan refleksi dalam Badan Eksekutip di-pusat dan daerah.

Demikian pula kekuatan2 sosial-politik Pantja Sila-is hendaknja mendapatkan refleksi pula dalam lembaga2 Kenegaraan lainnja.

Perdjuangan untuk mensukseskan tjita2 Revolusi kita itu, chususnja untuk melaksanakan pembangunan tidak dapat dilakukan oleh s a t u golongan sadja, namun harus dilakukan ber-sama2 dengan segenap kekuatan progressip revolusioner Pantja Sila-is jang dimanifestasikan dalam kekompakan dan partnership antara Pemerintah/ABRI dengan Rakjat jang terorganisasi. Itulah sumber dari lahirnja gagasan "KERUKUNAN NASIONAL" jang ber-intisarikan pemupukan persatuan dan kesatuan Bangsa; penghimpunan segenap kekuatan Progressip-revolusioner Pantja Sila-is dan atas suatu landasan-bersama melaksanakan program-bersama.

Berlandaskan pada gagasan Kerukunan Nasional itu, maka kebidjaksanaan politik dapat diarahkan pada terTjiptanja stabilitas politik permanen, jang mendjadi prasjarat bagi stabilisasi ekonomi dan sebagai prasjarat bagi pembangunan ekonomi untuk djangka pandjang. Stabilitas politik akan tertjapai bilamana dapat dipelihara semangat persatuan dan kekuatan dikalangan kekuatan Pantja Sila-is dalam rangka pembinaan partnership dan dalam rangka penghimpunan dan mobilisasi seluruh kekuatan Nasional.

Seluruh kekuatan2 positip harus didorong, dikembangkan dikoordinir dan diintegrasikan menudju kearah sasaran2 jang hendak kita tjapai. Perbedaan diantara kekuatan tersebut hendaknja diselesaikan dengan semangat musjawarah untuk mufakat dan dengan djalan "clearing approach" seperti makna dari Revolusi DPR-GR tanggal 20 September 1966

Dalam pembinaan kekuatan2 Pantja Sila-is harus ditjegah timbulnja kontradiksi jang antagonistis, apalagi konfrontasi. Meskipun demikian perlu diadakan garis pemisah jang tegas antara kekuatan jang anti Pantja Sila.

PNI dengan segenap Organisasi Massanja bertekad bulat untuk bersama2 dengan kekuatan Pantja Sila-is lainnja — mengikis habis sisa2 G 30 S/PKI dan kekuatan2

ja'nnja jang hendak merongrong/menjada kan Pantja Sila.

PNI dan segenap Organisasi Massa-nja berketetapan hati untuk melaksanakan se mua Keputusan2 Sidang Umum ke-IV Si dang Istimewa MPRS chususnja Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 dan se mua Keputusan sidang Umum ke V MPRS.

B. Politik Dalam Negeri.

Politik Dalam Negeri harus diarahkan kepada usaha2 untuk mengangkat meningkatkan dan memelihara harkat deradjat dan potensi Rakjat Indonesia hingga memiliki sifat2/semangat/Kesadaran Nasional.

Mengingat hal2 termaksud diatas ma ka PNI mengusahakan agar Pemerintah menerobos dan membuka daerah2 jang terisolasi dan memperhatikan peningkatan perkembangan politik, ekonomi dan sosial mental-kebudajaan terhadap daerah2 jang fanatik.

Demikian pula dalam rangka menghadapi plebisit di Irian Barat pada tahun 1969. PNI dengan segenap Ormas2nja dengan se kuat tenaga ikut serta aktif berusaha agar supaja Irian Barat tetap berada dilingkungan Negara Kesatuan R.I. berdasarkan Pantja Sila.

Chusus terhadap daerah2 jang demikian itu, maka Pemerintah bersama2 Rakjat harus berusaha untuk meningkatkan:

a. Kesadaran berkebangsaan/nasionalisme jang tebal.
b. Kesadaran bernegara, semangat perdjuangan dengan kesediaan berkorban setjara djudjur, ichlas dan berwatak untuk menjempurnakan kehidupan Negara R.I. Pantja Sila jang meliputi segala bidang.
c. Semangat dan karelaan untuk mengabdi kepada kepentingan Rakjat dan negara dan meletakkan kepentingan tersebut diatas kepentingan pribadi dan golongan.

PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH

Dalam usaha untuk menjempurnakan sistim pemerintahan daerah jang demokratis dan memiliki otonomi jang seluas2nja, hendaknja diusahakan adanja penjerahan kekuasaan urusan dan djawatan dengan disertai pengaturan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah jang sedemikian, hingga memungkinkan daerah otonomi itu dapat mengatur rumah tangga dari daerah2 jbs sebaik2nja dan ikut melaksanakan pembangunan daerah untuk peningkatan kesedjahteraan Rakjat di-daerah2 jbs.

Dalam rangka mentjiptakan daerah2 jang berotonomi seluas2nja, hendaknja Desa sebagai potensi ekonomi harus dapat dikembangkan setjara wadjar dalam rangka pembangunan masjarakat desa.

Kepada Rakjat harus diberikan harapan2 jang positip, sebagai prasjarat mental/psychologis untuk dapat diadjak ikut serta melaksanakan pembangunan.

Aparatur Pemerintahan.

Aparatur Pemerintahan, sebagai pelaksana kebidjaksanaan Pemerintah Negara maupun sebagai instansi jang memberikan djasa (service kepada masjarakat merupakan salah satu kuntji daripada suksesnja program Umum Pemerintah.

Administrasi Negara dalam arti jang luas masih harus diperbaiki dan ditingkatkan effisiensi dan effektifitas-kerdjanja birokrasi-negatip dan korupsi harus dilenjapkan sehingga pelaksanaan tugas lebih tjepat dan lantjar.

Hendaknja terus dilakukan usaha2 untuk menumbuhkan kegairahan-bekerdja, meningkatkan keahlian berpedoman pada "the right man on the right place", menumbuhkan ketekunan dan ke-intensipan kerdja de

ngan meng-effektip-kan sistim pengawasan dan pendobrakan hambatan2 disegala bidang.

Harus terus menerus diusahakan untuk mentjegah: pensalah gunaan kekuasaan/wewenang, tindakan2 jang bertentangan dengan hukum serta disiplin, pensalah-gunaan dan mismanagement dalam perusahaan Negara serta penjelewengan penjelewengan lainnja.

C. **Bidang Politik Luar Negeri.**

Garis Politik jang harus ditempuh oleh Pemerintah telah ditentukan dalam TAP No. XII/MPRS/1966 dan Nota No 1/MPRS/1966. Bagi PNI pedoman itu telah digariskan dalam Keputusan Sidang MPP ke II/tahun 1967.

Politik Luar Negeri Indonesia — sesuai dengan bunjinja Pembukaan Undang2 Dasar 1945 — bersifat anti imperialisme dan anti kolonialisme serta anti dominasi dalam segala bentuk dan manifestasinja serta ditudjukan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Politik bebas dan aktip jang demikian sifatnja itu harus diabdikan kepada dan diarahkan untuk kepentingan nasional, terutama kepentingan ekonomi Rakjat. Demikian itulah sekaligus merupakan garis politik didalam hubungan ekonomi internasional.

Untuk mewudjudkan politik bebas aktip itu chususnja didalam suasana perang dingin jang membawakan tantangan2 berat — diperlukan suatu "home-front" jang kuat, jaitu jang dimanifestasikan dalam persatuan/kesatuan Bangsa jang kokoh: kekuatan-ekonomi jang bebas dari ke-tergantungan dan kekuatan militer jang tjukup.

Dalam rangka menegakkan politik bebas dan aktip itulah maka Indonesia tidak boleh terikat dalam pakta2 militer dan menentang adanja pangkalan2 asing jang dapat membahajakan perdamaian dunia.

Berdasarkan garis politik termaksud diatas, maka Indonesia hendaknja berusaha meningkatkan kerdja sama dangan Negara2 didunia, chususnja Negara2 Asia-Afrika.

Kerdja-sama regional jang telah mendjadi kenjataan dengan adanja "ASEAN" — selama bergerak dibidang2 non-militer jaitu dibidang kerdja sama ekonomi dan kebudajaan — merupakan kebidjaksanaan sesuai dengan politik bebas aktip dan politik tetangga baik.

Banjak masalah2 dibidang politik luar Negeri, jang dihadapi oleh Pemerintah dan Rakjat Indonesia, mitsalnja :

— masalah Vietnam, masalah krisis Timur Tengah, masalah RRT tentang PBB masalah2 praktek diskriminasi rasial dan pelaksanaan hak2 azasi di USA dan Afrika Selatan dan tentang tenaga nuklir dlsb

Dalam menghadapi masalah2 tsb. tjukup kiranja ditundjukkan kembali pada keputusan2 Sidang MPP ke II No 10/MPP-II/POL — 1967.

D. **Bidang Ekonomi-Keuangan dan Pembangunan.**

Untuk menanggulangi penderitaan Rakjat jang makin meningkat akibat dari kemerosotan ekonomi Indonesia jang disebabkan oleh pemberontakan gerakan Kontra Revolusi G 30 S./PKI dan penjelewengan terhadap Pantja Sila dan Undang2 Dasar '45 mismanagement, pamborosan: birokrasi: korupsi dsb. dan dengan adanja ke-bidjaksanaan dibidang ekonomi dan keuangan, maka dititik beratkan pada usaha rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi dalam rangka pelaksanaan Undang2 Dasar 1945, terutama dalam pasal2: 23: 27: 33: dan 34, berikut pendjelasannja jang telah ditegaskan oleh Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS

/1966, dan TAP XXVII/MPRS-'66. Faktor penting jang tidak boleh diabaikan adalah faktor partisipasi dan pengawasan Rakjat jang effektip.

Kebidjaksanaan ekonomi dalam tarap untuk masa2 jad. diarahkan pada masalah ekonomi Rakjat dengan diberikan prioritas utama pada pentjukupan pangan, sandang dan perumahan Rakjat, dengan tidak me ngabaikan penumbuhan industri-agraris dan penjelesaian projek2 jang terbengkalai sebagai sasaran2 dari pembangunan jang berentjana.

Prinsip2 Demokrasi Ekonomi, sesuai dengan Pantja Sila dan UUD 1945 a.k me miliki tjiri2 sbb :

a perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan dan karenanja berlandaskan kepertjajaan pa da kemampuan diri sendiri dan mentje gah ketergantungan pada kekuatan2 lu ar negeri. Bantuan luar Negeri hanja merupakan perangsang bagi kegiatan2 ekonomi dalam Negeri.

b. sumber2 kekajaan Negara dan Keuang an digunakan untuk kepentingan me ningkatkan kemakmuran dan Kesedjah teraan bagi Rakjat.

c. tjabang2 produksi dalam Negeri harus ditingkatkan dan mendapatkan proteksi Pemerintah (berhubung dengan politik fiscal/import).

d Memberantas dan pentjegahan pengang guran, hingga setiap warganegara men dapatkan pekerdjaan serta penghidupan jang lajak.

e. hak milik perseorangan diakui dan ber fungsi sosial.

f. potensi, inisiatif dan daja kreasi Rak jat harus diperkembangkan sepenuh nja, untuk meningkatkan penghidupan ekonomi, sosial dan kebudajaan.

Sebaliknja Demokrasi Ekonomi tidak menghendaki adanja :

a. sistim "free fight liberalisme" jang me numbuhkan exploitasi oleh manusia ter hadap manusia dan bangsa lain.

b. sistim "etatisme" dalam mana Negara memegang dominasi dibidang Ekonomi sehingga mendesak serta mematikan po tensi dan daja kreasi Rakjat.

c. monopoli jang merugikan masjarakat.

Didalam mengolah kekajaan dan potensi ekonomi melalui penanaman modal, peng gunaan teknologi, penambahan pengetahu an peningkatan ketrampilan, peningkatan kemampuan berorganisasi dan management terutama didasarkan pada kemampuan ser ta kesanggupan Rakjat Indonesia sendiri; tampa menutup kemanfaatan modal; tekno logi dan skill dari luar negeri; selama ban tuan itu tidak mengakibatkan ketergantu- ngan terhadap luar Negeri.

Politik Luar Negeri harus diarahkan untuk kepentingan perbaikan ekonomi dan pembangunan didalam Negeri.

Landasan untuk menentukan skala pri oritas adalah projek2 jang menghasilkan barang dan djasa jang sangat diperlukan bagi kebutuhan Rakjat banjak.

KEBIDJAKSANAAN EKONOMI DJANGKA PENDEK

Politik ekonomi; keuangan dan pemba ngunan jang bersifat berdikari swa semba da/swadaja) diarahkan untuk memperbesar produksi dan pendapatan Nasional dengan pembagian merata se-adil2nja untuk mening katkan taraf hidup; daja-kerdja kesedjahtera- an dan kebahagiaan Rakjat jang sebesar2nja.

Kebidjaksanaan ekonomi djangka pen dek ditudjukan pada pemulihan produksi (rehabilitasi) dan stabilisasi dengan skala prioritas sbb :

a. pengendalian inflasi; dengan mengingat production-approach".
b. kebidjaksanaan fiscal; jang diarahkan pada peningkatan produksi.
c. pentjukupan kebutuhan pangan; sandang dan perumahan Rakjat.
d. rehabilitasi prasarana ekonomi; penjediaan bahan baku/penolong.
e. peningkatan kegiatan ekspor; penjempurnaan pelaksanaan sistim B.E.
g. memberantas pengangguran.
h. melaksanakan rentjana pembangunan dengan mendahulukan projek2 jang terbengkalai.

Usaha rehabilitasi dan stabilisasi harus mengutamakan pemulihan kapasitas produksi di-sektor jang dapat membangkitkan potensi dan daja kreasi Rakjat atau jang dapat lebih tjepat meredakan tekanan inflasi. Guna pelaksanaan program rehabilisasi dan stabilisasi ekonomi harus disertai gerakan kebidjaksanaan moneter; kebidjaksanaan neratja pembajaran luar negeri; dan sebagainja; disertai dengan perombakan2 institusionil.

Pembangunan ekonomi adalah pembangunan daripada ekonomi (ecconomic resources). Oleh karena potensi2 ekonomi terdapat didaerah2 maka pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari pembangunan daerah.

Rehabilitasi dan penjempurnaan sistim perhubungan dan Pembangunan Masjarakat Desa dan pelaksanaan transmigrasi perlu diperhebat dan diarahkan setjara swa sembada dari Rakjat sendiri dengan memberikan fasilitas2 dan mempermudah prosedure pelaksanaannja.

Dalam melaksanakan kebidjaksanaan ekonomi; maka pemerintah hendaknja lebih berusaha untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi. Dalam rangka ini sangat diperlukan usaha meniadakan birokrasi dan meninjau dengan teliti status dan fungsi perusahaan2 Negara.

Koperasi merupakan apparatur jang penting dalam menumbuhkan sistim ekonomi berlandaskan azas kekeluargaan. Pemerintah berkewadjiban untuk memberikan bimbingan; pengawasan; fasilitas dan perlindungan tarhadap Koperasi.

Sesuai dengan tugas pemerintah untuk sedjauh mungkin mengembangkan potensi dan daja kreasi Rakjat dalam bidang Ekonomi maka dalam batas2 ketetapan dan djiwa Undang2 Dasar 1945 golongan Swasta-nasional memiliki kebebasan untuk memilih bidang usaha masing2; jang tidak menguasai hadjat hidup Rakjat banjak.

Kebidjaksanaan impor harus ditudjukan kepada pemasukan barang2 jang langsung dapat mempertinggi produksi ataupun barang2 jang sangat diperlukan Rakjat banjak dengan tetap memberikan proteksi pada produksi dalam Negeri.

E. **Bidang Sosial dan Kesedjahteraan Rakjat.**

Untuk mawudjudkan Sila Keadilan Sosial; maka harus diusahakan untuk menghilangkan perbedaan jang menjolok dalam penghidupan golongan jang ekonomis kuat dan golongan jang ekonomis lemah.

Usaha untuk memperbaiki keadaan-sosial dan meningkatkan kesedjahteraan Rakjat; pada hakekatnja tidak dapat dipisah2kan dengan peningkatan produktivitas dan penjelenggaraan distribusi jang merata dalam rangka perbaikan keadaan ekonomi.

Untuk mentjapai maksud diatas; maka per-tama2 kesadaran tentang kemuliaan kerdja setjara menjeluruh hendaknja ditanamkan lewat pendidikan dan penerangan kepada masjarakat.

Kemudian sebagai prasjarat bagi pertumbuhan produktivitas; Pemerintah bersama2 dengan Rakjat berusaha memperbaiki sikap mental; mentjiptakan disiplin; dan

ke ertiban setjara menjeluruh dalam rangka menjiptakan PANTJA TERTIB Penumbuhan dan dikembangkannja semangat persatuan; parasaan senasib dan sepenanggungan; hidup setjara gotong rojong diperlukan untuk menanggulangi kesulitan2 bersama.

Didalam rangka pembangunan Nasional; maka masalah tenaga kerdja perlu mendapat perhatian jang serius; Maka dari itu perlu diadakan usaha2; jaitu a.l :

1. Peningkatan dan peninggian mutu dan nilai tenaga kerdja antara lain melalui pendidikan latihan kerdja.
2. Mentjegah/ mengurangi pengangguran dan pengangguran t.k kentara dengan penumbuhan lapangan kerdja atau Transmigrasi.
3. Memberikan perangsang untuk gemar bekerdja didesa2 sebagai basis perekonomian rakjat; dan untuk mengurangi urbanisasi.
4. Menjelenggarakan penertiban mental ideologis terhadap tenaga kerdja hingga memiliki djiwa; tekad dan semangat untuk bekerdja keras; djudjur dan tekun sebagai amal dan dharma-bakti bagi suksesnja Revolusi Pantja Sila.
5. Perbaikan nasib; upah dan djaminan sosial jang seimbang dengan prestasi kerdja dan martabat manusia.
6. Fakir miskin/anak2 terlantar berhak memperoleh djaminan pendidikan dan sosial.

Didalam taraf kehidupan masjarakat jang serba kurang pada dewasa ini; masih perlu diadakan perbaikan2 dibidang sosial; demikian pula bantuan sosial perlu diberikan kepada Rakjat jang sangat memerlukan.

Maka dari itu; urgensi program; sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 mengenai pengintensipan LSD; Rehabilitasi penderita tjatjat; dan program pembangunan Rakjat Sehat hendaknja diutamakan.

Dibidang kesehatan; perlu diusahakan terus perbaikan kesehatan Rakjat dengan memperhatikan faktor2 geografis dan demografis dengan djalan ikut berusaha :

1. Memperbanjak djumlah rumah2 sakit dan poliklinik2; terutama didesa2.
2. Memperbanjak dan menjebarkan djumlah dokter2 dan djuru2 kesehatan sampai di-pelosok2 dan usaha2 pentjegahan/pemberantasan penjakit2 epidemis.
3. Menanam rasa kesadaran tentang kebersihan dan kesehatan.
4. Menekan harga2 obat2an dan tarif pemeriksaan serendah2nja hingga dapat dipikul oleh golongan rakjat jang membutuhkan.
5. Meningkatkan obat2an tradisionil jang telah diselidiki dalam laboratorium2 setjara ilmiah.

F. BIDANG MENTAL/SPIRITUIL :

Untuk mensuksesKan perdjuangan; maka diperlukan patriot2 Bangsa jang memiliki moral dan achlak jang tinggi serta mental jang kuat. Agama merupakan unsur jg penting dalam membentuk manusia pribadi lagi pula peri kehidupan rochaniah merupakan kebutuhan Rakjat.

Berhubung dengan itu; maka Pemerintah bersama-sama rakjat wadjib mengusahakan pembinaan keagamaan dan kerochanian.

Dengan memperkuat kejakinan beragama itu dapat ditjegah tumbuhnja sisa2 dari G.30.S/PKI dan dapat ditjegah pula tumbuhnja faham/kepertjajaan jang melanggar norma2 ke-agamaan dan jang dapat melemahkan sendi2 peri-kehidupan kerochanian Bangsa Indonesia.

Sesuai dengan Ketetapan MPRS jbs; maka masalah pendidikan Agama tanpa

adanja paksaan terhadap sesuatu Agama merupakan suatu masalah penting jang harus diperhatikan PNI.

Sesuai dengan Pantja Sila sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia maka Rakjat Indonesia berhak menikmati keleluasan memeluk Agamanja masing2 dengan penuh toleransi keagamaan.

Berhubung dengan hal2 termaksud diatas; maka Pemerintah barsama2 Rakjat — i.c. warga PNI beserta Ormas2nja — berkewadjiban untuk memelihara suasana tertib tenang dan aman; baik lahir maupun batin; sebagai suatu landasan mental -psychologis; untuk mentjegah timbulnja pertentangan ke-agamaan; dan untuk mentjiptakan stabilitas-politik serta ter — tib sosial.

Untuk kesemuanja itulah; maka diperlukan penjempurnaan dari usaha2 untuk dapat meningkatkan manfaat setjara effektip; dari tempat2 ibadah dan pusat2 keagamaan; agar supaja sendi2 kehidupan keagamaan dapat dipupuk dan dikembangkan; dengan memberikan fasilitas dan kesempatan jang sama kepada semua Agama.

G. Bidang Pendidikan dan Kebudajaan.

Sistim pendidikan Pantja Sila jang harus diatur dalam suatu Undang2 Pokok Pendidikan; ialah untuk:

1. membentuk manusia2 jang ber-Katuhanan Jang Maha Esa;
2. Menumbuhkan rasa-kebangsaan Indonesia jang tebal;
3. mempertebal rasa-peri-kemanusiaan;
4. membentuk manusia2 jang berdjiwa Demokrasi; dan berkeadilan sosial;
5. mempertinggi mutu ketjerdasan dan ketrampilan warga negara hingga berguna bagi bangsa dan Negara terutama dalam pembangunan ekonomi dan modernisasi peri -- kehidupan kemasjarakatan.
6. membentuk patriot2 Pantja Sila-is jang memiliki moral/budi pekerti, mental dan tata-susila tinggi dan berwatak baik.

Sistim pendidikan, banjak dan matjamnja sekolah2, penempatan tenaga2 pengadjar dan kurikulum hendaknja disesuaikan dengan faktor termaksud diatas serta prospek pertumbuhan Negara dan Masjarakat djangka pendek maupun djangka pandjang.

H. Didalam periode peralihan dari masjarakat Indonesia, jang telah mengalami kegontjangan dibidang politik ekonomi dan sosial kebudajaan rakjat tentu mengalami kemunduran dalam kehidupan kebudajaan.

Dengan demikian dapat dimengerti pula bahwa dewasa ini dan untuk masa2 jang akan datang masjarakat Indonesia mudah dilanda oleh pengaruh kebudajaan asing jang dapat merusak sendi2 kehidupan dan kepribadian Indonesia.

Maka dari itu Pemerintah bersama-sama Rakjat — i.c PNI beserta Ormas2nja — berusaha untuk memulihkan dan menumbuhkan serta melindungi kebudajaan nasional jang berkepribadian Indonesia Penumbuhan kebudajaan Nasional mudah dengan sendirinja harus didasarkan pada Pantja Sila.

Dalam rangka membangun dan mengembangkan Kebudajaan Pantjasila, maka Pemerintah ber-sama2 rakjat dengan seniman budajawannja berusaha untuk meningkat—kan menggali, memelihara dan memadjukan Kebudajaan.

Kebudajaan Pantja Sila jang berkepribadian Indonesia itu bertjirikan :

a. mentjorakkan ke bhinneka tunggal-ikaan kebudajaan2 daerah sebagai dasar dan sumber dari pada kebudajaan Nasional; karena itu patutlah dibina pertumbuhan kebudajaan2 daerah itu dengan peningkatan mutunja.
b. hasil2 kreasi jang mentjorakkan kepribadian Pantjasila merupakan menifes

tasi pengungkapan hati nurani rakjat jg dapat mempertinggi deradjat kemanusiaan bangsa Indonesia dengan mengarahkan kemadjuan adab dan kebudajaan, merangsang sopan santun bertata susila dan berbudi luhur.

Untuk mentjapai ini perlu ditumbuhkan terus kerdjasama jang erat antara Pemerintah dalam menanamkan dalam djiwa rakjat adanja penghargaan terhadap seni budaja.

Kepada para seniman budajawan ini Pemerintah dan masjarakat hendaknja turut serta dalam :

a. Mendorong kegairahan mentjiptakan kreasi2 baru dibidang seni dan budaja dengan: adanja pemberian2 fasilitas dalam penghargaan jang wadjar terhadap hasil2 jang telah ditjiptakan maupun terhadap usaha2 seniman budajawan itu sendiri.

b. mentjegah unsur2 jang bertentangan dengan Pantjasila dengan tidak menutup penerimaan unsur2 dari luar jang ber - sifat memperkaja dan dapat mempertinggi hakekat kebudajaan Pantja Sila.

c. Mengadakan registrasi pentjipta jang dimuat dalam almanak2 seni tahunan

d. Mengadakan dokumentasi seni setjara baik dengan mengadakan museum2, wisma seni art Gallery maupun berupa film2 dokumentair, penerbitan2 chusus dll.

e. Pemeliharaan pertundjukan2 rakjat jang masih asli,

f. Pertukaran2 antar budaja daerah untuk memperluas saling pengertian.

I. Bidang Pertahanan dan Keamanan.

ABRI sebagai alat pertahanan dan Keamanan mempunjai tugas kewadjiban u k melindungi keselamatan Rakjat. kemerdekaan Bangsa dan keutuhan wilajah Negara terhadap antjaman2 bahaja dari luar maupun dari dalam Negeri sendiri.

Untuk menunaikan tugas tsb. diatas men djadi kewadjiban ABRI untuk selalu berusaha mempertinggi kwalitas, daja tempur dan daja guna dari masing2 kesatuan ABRI disamping adanja tugas2 lain sebagaimana dimaksud dibawah. Selandjutnja Doktrin Han Kam-Nas Catur Dharma — Eka Karma harus dimanifestasikan dalam bentuk pengintegrasian antara ABRI dan Rakjat.

Sebagai kekuatan jang berpartisipasi dibidang pembangunan Nasional, maka civic mission', baik personil maupun material harus lebih diefektifan hingga dengan demikian potensi ABRI djuga bermanfaat dibidang produksi setjara maximal, dengan pengaturan hubungan sipil-militer jang harmonis.

J. Bidang peng-organisasian PNI beserta Ormas2nja.

Untuk melaksanakan tugas berat seperti tsb. diatas, maka diperlukan suatu organisasi perdjuangan jang kuat, teratur rapih, serta disiplin jang membadja. Sehubungan dengan hal tsb YUDYA PRATIDINA MARHAENIS telah menegaskan sebagai berikut :

1. Partai Nasional Indonesia dan segenap Organisasi Massa Marhaen dari Pusat sampai tingkat Daerah2 harus segera di konsolidasikan dan dibangun serempak, sehingga memiliki kembali kemampuan militansi, kelintjahan dan daja ke dja serta daja djuang jang tjukup untuk menunaikan tugasnja jang berat, sulit tan dan multikompleks itu.

2. Konsolidasi dan Pembangunan Partai/ Organisasi Massa Marhaen berarti menjempurnakan Susunan Pengurus dan atau peningkatan kepemimpinan setjara kolektif sebagai Partai Rakjat jang berpandangan djauh kedepan (= historis-bewust), berdjiwa radikal-progressip-revolusioner, berkewadjiban untuk senantiasa

membela kepentingan kaum Marhaen sesuai dengan kondisi dan situasi-politik dewasa ini serta jang mempunjai waktu dan tenaga.

. Penjusunan Massa Marhaen dalam satu barisan jang teratur bersatu kokoh kuat, dinamis, militant, radikal-progressip revolusioner dan berdisiplin terhadap garis kepemimpinan Partai/Organisasi Massa PNI.

4. Kewadjiban bagi setiap warga dan petugas Partai/Organisasi Massa Marhaen untuk membantu perdjuangan PNI; utk membadjakan diri dan dapat mendidik dirinja dalam teori dan praktek perdjuangan untuk dapat mendjadi seorang MARHAENIS jang BAIK, jang berwatak luhur, berfikir sehat, berbuat tepat serta selalu mendjadi tjontoh jang baik.

5 Perobahan tjara-kerdja dibidang Organisasi hingga mendjadi tjara jang tepat, tjepat tegas dan lintjah dengan menjingkirkan djauh penjakit birokrasi, dengan membina sistim dwiwarga keatas dan kebawah.

6. Menumbuhkan kader2/aktivis umum serba-guna dan kader2/aktivis 2 chusus jang berdisiplin.

7 Penjempurnaan admintrasi serta mempersiapkan logistik bagi kepentingan perdjuangan dan pemilihan umum.

Selain dari hal2 tsb. diatas keputusan Tekad DPP PNI dengan segenap DPP/Presidium Organisasi Massa-nja dibidang organisasi menegaskan pula sbb. :

1. Didalam usaha mengisi dan membina ORDE BARU ini, maka PNI dengan segenap Organisasi Massa-nja mejakini bahwa semua kekuatan soial-politik harus melaksanakan kristalisasi dan konsolidasi dalam tubuhnja masing2.

2. PNI dan segenap Organisasi Massa-nja menjadari bahwa dalam tubuh PNI dan Organisasi Massa-nja harus djuga diadakan kristalisasi dan konsolidasi agar supaja tubuh sehat, dewasa, militant dan trampil untuk dapat menunaikan tugas perdjuangan jang berat itu.

3 Konsolidasi dan kristalisasi dimaksud diatas meliputi :

a. menghilangkan mental Orde Lama dan menumbuhkan serta mengembangkan mental Orde Baru dalam arti kata jang sebenar2nja.

b. Meningkatkan tenaga2 pimpinan Partai/Organisasi Massa-PNI hingga kadir dari pemimpin2 jang memenuhi sjarat2 dan mampu melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud diatas.

c. Terus menerus mengadakan penjempurnaan dan keserasian gerak dibidang Organisasi dalam partai dan Organisasi massa-nja.

d. Membersihkan diri dari unsur2 negatif didalam tubuh PNI/Organisasi Massa-nja dan jang mengganggu pelaksanaan tugas sutji sebagaimana digambarkan di atas.

Pembinaan Ideologi.

Untuk kesatuan gerak dan kesatuan tindak maka dibidang ideologi PNI dan Ormas2nja harus memiliki kesatuan tafsir dan kesatuan rumusan ideologi Marhaenisme, jang rumusannja ialah: **Ke Tuhanan Jang Maha Esa, Sosio-Nasionalisme** dan **Sosio-Demokrasi** jang makna dan djiwanja sama dengan PANTJA SILA.

Untuk pembinaan dan pengembangan Adjaran Marhaenisme Lembaga Pembina Marhaenisme, perlu ditingkatkan Karyanja hingga dalam waktu jang singkat dapat melahirkan Doktrin Marhaenisme dan Naskah2

Azasi jang diharuskan oleh AD/ART Partai.

PNI/Ormas2 PNI berkewadjiban menanamkan kejakinan tentang kebenaran Marhaenisme dan Pantja Sila kepada setiap harga dan simpatisan PNI untuk dipakaai sebagai landasan idiil didalam mengsukseskan perdjoangan.

Setiap warga PNI berkewadjiban untuk mentjegah dan membantah usaha2 jang dengan sengadja ataupun tidak, menganndung maksud mengadakan dan/menjebar-luaskan tafsiran2 jang salah.

PENG-AMAN-AN MARHAENISME DAN PANTJASILA SEBAGAI PENGABDIAN LANGSUNG UNTUK NEGARA BANGSA DAN MASJARAKAT.

Marhaenisme tidak hanja menuntut adanja pemilihan2 pengetahuan tentang teori perdjuangan, akan tetapi mengharuskan adanja pengetrapan teori itu dalam praktek perdjuangan dan praktek-kehidupan seharihari. Sebab teori tanpa praktek adalah 'mati' dan praktek tanpa teori adalah 'tanpa arah/tanpa tudjuan'.

Dengan pedoman kepada YUDYA PRATIDINA MARHAENIS dan BINA DHARMA (Program Partai) PNI dengan segenap Organisasi Massa Marhaen akan terus berdjuang sekuat tenaga memberikan amal dan dharma bakti kepada Negara, Bangsa dan Masjarakat dalam bentuk :

— Konsepsi2 jang positif mengenai masalah-masalah ekonomi-sosial-kebudaaan, dan keagamaan sebagai mana diuraikan diatas jang disalurkan lewat Lembaga2 Legislatif dan Eksekutif dimana PNI dan Organisasi Massa Marhaen diwakili ;

— Meningkatkan aktivitas2 didalam Masjarakat sebagai sumbangan jang konkrit berupa amalan jang njata dalam rangka mengadakan perbaikan dibidang termaksud diatas.

Untuk pelaksanaan tugas2 setjara terperintji tjukup kiranja ditundjuk pada Program Partai (Bina Dharma).

MARHAENISME Berlawanan dengan MARXISME

TJERAMAH : KETUA UMUM P N I BAPAK OSA MALIKI

Saudara2, saja merasa mendapat kehormatan bahwa sajalah jang pertama kali memberikan tjeramah kepada Sudara2, disamping kesempatan membuka tjeramah2 berantai ini.

Untuk menjingkat waktu dalam kesempatan ini saja tidak akan menjampaikan atau menguraikan segala sesuatu mengenai masalah2 politik pada waktu sekarang seperti tadi telah digambarkan oleh Bu Hardi bagaimana gawatnja keadaan kita sekarang djika kita melihat daerah2 kita, jaitu keadaan nasib PNI/Front Marhaenis setjara nasional. Tetapi saja akan to the point sadja memenuhi pengharapan penjelenggara untuk menjampaikan apa jang diminta daripada saja pada malam ini kalau tidak salah kemarin dan tadi djuga sudah didjelaskan kembali, jaitu saja hendaknja memulai menjampaikan kepada Saudara2 menguraikan kembali kepada Saudara2 tentang Marhaenisme didalam pengertian persamaannja Marhaenisme dengan Pantja Sila. Ini konsekwensi dari pada keputusan MPP pertama dalam bulan Nopember tahun 1966 jang lalu, seperti tertera dalam Judya Pratidina Marhaenis, jaitu bhw Marhaenisme dalam rangka mentjari kesatuan tafsiran bagi kita ialah : Marhaenisme adalah Ketuhanan Jang Maha Esa, Socio-Nasionalisme dan Socio-Demokrasi jang hakekatnja adalah sama dengan Pantjasila.

Djadi atas dasar inilah saja kira Saudara2 penjelenggarara ingin mendengar kembali atau ingin memperdengarkan kembali dengan perantaraan mulut saja kepada Saudara2 bagaimana sesungguhnja hal itu, jg buat saja sesungguhnja ini adalah berarti u angan bagi saudara2, sebab Saudara toch sudah mengakui lebih djauh didalam perkembangan sedjarah ideologi kita.

Saudara2, demikianlah sambutan saja terhadap kesempatan tjeramah berantai ini. Dan dengan demikian maka sebagai saja tadi katakan, jaitu saja akan to the point & menjampaikan segala sesuatu mengenai materi tjeramah malam ini.

Dan terima kasih bahwa saja sudah mendapat peringatan, supaja saja duduk sadja tetapi memang saja djuga akan duduk. Saja didalam rangka pemberian sambutan itu memang harus berdiri dan diwaktu mengadjar itu tentu seenaknja saja bisa berdiri bisa berdjalan2 dan bisa duduk. Saja masih menggunakan etiket, jaitu kalau

Saudara2, saja sebetulnja terus terang sadja sebagai manusia mesti mengakui bahwa pikiran saja sekarang ini sedang berada dalam kurang tenang. Tetapi walaupun begitu saja akan berusaha melawan gelora hati saja dan pikiran saja, kalau bisa demi untuk menjampaikan apa jang saudara minta mengenai ideologi. Dan oleh karena persoalan ideologi ini adalah soal jg menghendaki pemikiran jang teliti dan berhati2 maka sajapun ingin minta kepada Saudara2 supaja djuga mengikutinja dengan teliti dan hati2 dan kritis, mendjelang nanti kalau saja sudah menjampaikan segala sesuatu jang saja harapkan tidak usah terlalu pandjang ; nanti kita landjutkan dengan diskusi sekedarnja.

Saudara2, untuk membitjarakan Marhaenisme dan Pantja Sila tentu saja mesti mengungkap sedikit rahasia dari apa jang

tadi diuraikan oleh Bu Hardi, mengapa di perlukan uraian kembali mengenai Marhaenisme dan Pantja Sila ini.
Saudara2 tahu dan tidak usahkita sembu nji2 bahwa sekarang didalam masjarakat kaum istilah Bu Hardi itu dari depan pen djuru mata angin kita memang sedang di soroti. Baik setjara partai, baik setjara ideologi baik setjara strategi perdjuangan, baik setjara politik praktis, baik setjara organisatoris, maupun sebagai individu2 kita me mang sedang disoroti.

Penjorotan ini Saudara2 tahu ada jang wadjar, ada jang tidak wadjar. Tetapi kesemuanja dapat kita ambil kesimpulan dengan melepaskan soal2 tanggapan kita mengenai soal2 politis, praktis dan strategis maka baiklah kita ambil satu pokok tanggapan itu supaja relevant dus langsung hubungannja dengan malam ini, dengan tjeramah ini jaitu sorotan ideologi perdjuangan kita jaitu terhadap Marhaenisme.

Didalam masjarakat, mengenai ideologi Marhaenisme ini ada jang mengatakan bahwa Marhaenisme bagaimanapun dikatakan oleh PNI adalah Marxisme jang ditrapkan di Indonesia Marxisme jang ditrapkan sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia dan seterusnja Itu satu.

Dus karena itu maka Marhaenisme tidak bebas marhaenisme tidak lepas dari pengaruh2 marxisme dan oleh karena itu Marhaenisme tidak dapat di terima.

Begitulah kesimpulannja.

Kedua Marhaenisme sama dengan Pantja Sila. Inipun, ada tanggapan orang jang mengatakan bahwa tidak sepantasnja Marhaenisme disamakan dengan Pantja Sila. Karena itu maka misalnja seperti di Tjirebon kawan2 PNI/Front Marhaenis tidak dikehendaki oleh masjarakat disana untuk mengatakan, bahwa Marhaenisme adalah Pantja Sila, Dus Marhaenisme tidak boleh disamakan dengan Pantja Sila.

Ketiga Marhaenisme dgn Pantja Sila. Kalau marhaesisme itu toch sama dengan pantjasila mengapa PNI masih tetap sadja memegang Marhaenisme sebagai idiologi ; tjukup dengan Pantjasila itu sadja. Begitulah, ini suara suara jang sampai kepada kita jang kita dengar.

Nah, Saudara2 berhubung dengan persoalan itu maka orang di dalam masjarakat kita sekarang ini turut, banjak jang turut mengupas, menganalisa, mempeladjari Marhaenisme ini tentu dengan maksud untuk legaliseren apa jang dikatakan itu jaitu bahwa bagaimanapun Marhaenisme ini adalah Marxisme jang ditrapkan sebagai berikut

Saudara2, baiklah kita dengan ini sampai kpd satu probleem bagi kita semua blm kita membitjarakan sedjarah — probleem, apakah benar Marhaenisme jang kita anut sekarang ini adalah Marxisme jang ditrapkan sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia dengan dia punja — sedjarah — dia punja adat istiadat dan sebaginja. Apakah benar itu demikian. Ini probleem pertama jang harus didjawab.

Problema kedua, jaitu apakah benar Marhaenisme itu sama dengan Pantjasila ?
Dan problema ketiga, untuk menanggapi suara2 itu jaitu bagi kita apakah benar sebagai dikatakan orang Marhaenisme ini adalah Marxisme punt.

Djadi ini tingkat2: Marhaenisme adalah sama dengan Pantja Sila ; dan Marhaenisme adalah Marxisme. •••

Saudara2, kalau saja mengatakan problema djadi masalahnja sudah tentu menghendaki satu studie, sudah tentu menghendaki pengupasan menghendaki analisa, malah barangkali ini menghendaki atau seminar tersendiri atau simposion tersendiri, jang

memang dulu tahun 1961, pernah saja mengemukakan persoalan ini, jaitu dalam sidang Badan Pekerdja di Tjipajung dengan kata2 dengan usul dari satu seksi Seksi Ideologi waktu itu Seksi Kebudajaan.

Seksi kebudajaan waktu itu, mengusulkan agar diadakan seminar mengenai Marhaenisme ini sesuai dengan keputusan Kongres ke IX di Solo, Djuli 1960. Akan tetapi ketika itu ketua Umum waktu itu Pak Ali Sastroamidjojo berpendapat tidak perlu mengadakan simposion atau mengadakan seminar Marhaenisme. Padahal ketika itu maksud saja memang untuk sebetulnja memetjahkan persoalan2 jang waktu itu sedang tumbuh, jaitu masalah 'Marhaenisme adalah Pantja Sila' dan 'Marhaenisme adalah Marxisme jang ditrapkan sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia dan sebagainja'. Tetapi apa boleh buat, Saudara2 dalam sidang Badan Pekerdja Kongres di Tjipajung itu usul kami dari Seksi Kebudajaan pada waktu itu tidak dapat diterima

Saudara2, barangkali memang sekarang sudah terlambat mengadakan simposion atau seminar mengenai Marhaenisme itu sebab situasi sudah berobah. Sekarang ini kita sudah dihadapkan kepada sesuatu keadaan, jang sebetulnja tidak memberi kesempatan kepada kita untuk mentjoba2, atau untuk mengadakan simposion, atau seminar mengenai Marhaenisme ini sebab soalnja sekarang mengenai idiologi Marhaenisme rompaknja sudah mendjadi persoalan luas didalam masjarakat kita untuk tidak mengatakan se olah2 sudah mendjadi persoalan Nasional.

Saudara2, bajklah saja akan memberikan djawaban kepada probleem jang pertama.

Apakah benar Marhaenisme sebagai didefinisikan atau di tafsirkan didalam Deklarasi Marhaenisme tahun 1964 di Lembang jaitu Marhaenisme adalah Marxisme jang ditrapkan sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia dan seterusnja.

Bajklah satu persatu akan kita tjoba memberikan djawaban.

Saudara2, untuk memberikan djawaban ini, kita tidak akan lepas dari kupasan sedjarah kupasan sedjarah dus meninjau dalam sedjarah atau perkembangan kita. Saja akan mentjoba menguraikan sedjarah ini dari jang dekat sampai kepada jang djauh.

Siapa jang sebetulnja mula2 merumuskan definisi ini apakah Bung Karno, apakah saja, apakah Pak Ali apakah Pak Karun dengan apakah Ibu Jusupadi. Ini harus di djawab.

Saudara2 saja djadi tukang obat Ini ada buku ketjil saudara2 tahu buku apa ini. kalau saudara seorang kader Marhaenis mesti sudah tahu

Tetapi memang buku ketjil itu tidak banjak

Bajklah, saja akan membatja sadja .

Marhaenisme jaitu socio nasionalisme dan socio demokrasi, sebagai teori masjarakat dan teori perdjuangan Marhaenisme menurut penegasan oleh Bung Karno sendiri adalah Marxisme jang diselenggarakan di Indonesia:.

Sehubungan dengan djaman jang sedang kita lalui dapatlah pula dikatakan bahwa Marhaenisme adalah Marxisme jang diselenggarakan di Indonesia dalam djaman kapitalisme diseluruh dunia jang meluntjur di sendja kala.

Idee sosialisme sebagai matahari pagi sedang naik menudju zenit dibeberapa negeri sosialisme sebagai sistim jang di bangunkan dan disempurnakan dan bangsa2 Asia sudah banjak mentjapai kemerdekaan nasionalnja, sedang jang belum merdeka lagi berdjuang dengan se-hebat2nja untuk mentjapai kemerdekaan Nasionalnja. Djadi dapat pula dikatakan, bahwa Marhaenisme adalah Marxisme jang diselenggarakan di negeri2 djadjahan, atau bekas djadjahan da

lam masa revolusi kemerdekaan bangsa2 Asia — Afrika sedang imperalisme dan kapitalisme diseluruh dunja dengan derasnja menudju kepada maut"

Ini dikeluarkan di Bandung, kota kembang tanggal 27 Nopember tahun 1958 Dan buku ini namanja 'Thesis Sembilan' atau sembilan Thesis' Ini bukunja namanja Sembilan Thesis jg disusun oleh Sdr. kita Sdr Asmara Hadi jaitu setelah beliau memisahkan dari dari kita & mendirikan Partindo kembali.

Disamping ini ada lagi penerbitan2 lain jang lebih tegas, tetapi tidak saja bawa. Tjukup dengan ini sadja. Ini sedjarah.

Pada waktu itu tahun 1958 PNI memang sedang dalam konflik dengan beberapa kawan, jang telah membentuk partai baru, menghidupkan kembali Partindo, Sdr. Asmara Hadi dan kawan2 lainnja, karena kita pada waktu itu tidak dapat menerima ini, tidak dapat menerima pendefinisan dan pernjataan ini. Kita tidak menerima bahwa Marhaenisme adalah Marxisme jang ditrapkan dan seterusnja.

Tetapi, Saudara2 sekarang akan bertanja. Inikan Asmara Hadi. Tetapi bagaimana Bung Karno dalam soal ini. Maka akan saja djawab kepada Saudara2, lepas dari pada pernjataan apa jang dikatakan oleh Pak Asmara Hadi, bahwa penegasan ini diberikan oleh Bung Karno, maka saja mesti mengatakan; bahwa memang Bung Karno di Bogor dalam tahun 1958 kalau tak salah bulan Mei; kepada Delegasi dari Konperensi Pendjdik Marhaenis ketika itu; jang saja apal antara lain Bu Supeni; dan Bu Supeni djuga jang menjampaikan laporan kepada DPP pada waktu itu, jaitu bahwa Bung Karno memang mengutjapkan definisi ini, jaitu bahwa 'Marhaenisme is het in Indonesia toegepaste Marxisme'. Ini bahasa Belanda. Marhaenisme is het in Indonesia toegepaste Marxisme, dan oleh Delegasi itu di sampaikan kepada DPP jang waktu itu DPP pun menolak. Ketua Umumnja ketika itu adalah Pak Suwirjo.

Kongres Solo, tahun 1960 memutuskan membentuk Panitia Doktrin jang ketiga, dan achirnja Saudara2 maka Panitia Doktrin jang ketiga disusun oleh DPP dan Panitia Doktrin jang ketiga ini, terdiri dari Pak Ali sebagai Ketua, Pak Wir; Pak Ruslan Abdulgani; Pak Sajuti dan saja sebagai anggota; Panitia Doktrin inilah jang bekerdja; berusaha bekerdja untuk mewudjudkan satu doktrin Marhaenisme.

Tjatatan :

1. Istilah Panitia itu oleh Kongres disebut Panitia Penjusun Naskah, "Dasar2 Adjaran Marhaenisme".

2. Dalam menjusun Naskah "Dasar2 Adjaran Marhaenisme" itu masalah moral Marhaenis dan masalah Agama supaja lebih diperhatikan.

Saudara2, berhasillah Panitia Doktrin jang ketiga atau Panitia Lima ini menghasilkan satu naskah jang ketjil sekali, jang didjudulnja 'Dasar2 Pokok Marhaenisme'.

Buku inilah hasil daripada Panitia Lima itu tadi.

Saudara2, itu waktu antara tahun 1960 dan 1963.

Saudara2 naskah ini oleh Panitia Doktrin oleh karena ada permintaan dari Kongres; bahwa naskah itu kalau sudah disusun harus dibawa kepada Bung Karno untuk di restui; dimintakan restunja; maka naskah ini disampaikanlah kepada Bung Karno; jang ketika itu mendapat gelar dalam Kongres di Solo 'Bapak Marhaenisme'. Maka naskah ini dikirimkan disampaikan kepada Bung Karno; dikirimkan oleh satu delegasi dari DPP untuk diminta perestuannja.

Saudara2; sampai kepada Kongres Purwo kerto dan djuga sampai sekarang naskah doktrin ini tidak pernah mendapat restu dari Bung Karno.

Saudara2, ketahuilah bahwa malam ini saja bitjara, saja akan berusaha berbitjara dengan berdoman kepada Tri Karya Pari suda artinja berpikir benar, berkata be-nar dan bertindak benar. Djadi saja mesti mengatakan apa jang tidak menurut penda pat dan pengalaman saja. Begitulah, Saudara2.

Namun demikian, naskah ini dibawa ke Kongres Purwokerto dan oleh Kongres Pur wokerto diterima ketika itu. Djadilah ini Doktrin. Tetapi dengan tidak menggunakan kata doktrin, tetapi Dasar2 Pokok Marhaen isme.

Saudara2, buku ini Saudara sudah batja semua, atau lupa?

Didalam buku ini baiklah saja peringat kan jang penting sadja — disini tidak ada dan tidak terdjantum definisi "Marhaenisme adalah Marxisme jang ditrapkan". Disini tidak ada. Ini saja peringatkan. Panitia dok trin terdiri dari Pak Ali sebagai Ketua, pa ra anggotanja : Prof. Dr. Hadji Ruslan Ab-dulgani, Sajuti Melik, Pak Suwirjo; jang se betulnja waktu itu sudah tidak bisa ak-tief dan saja sendiri. Saudara2, sudah tahu. Disini tidak ada definisi "Marhaenisme ada lah Marxisme jang ditrapkan sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia dan seba gainja". Malah disini ditegaskan bagaimana filsafat Marhenisme itu. Filsafat Marhaenis me, jaitu filsafat lahir batin, filsafat perdju angan Marhaenisme jang tidak bisa lain selain daripada ber Tuhan, atau Ketuhanan. Sebab kehidupan bangsa Indonesia adalah kehidupan rohaniah ini tidak bisa lain. Dua soal jang penting saja tegaskan :

1. Bahwa didalam Dasar2 Pokok Marhaen isme ini, tidak ada difinisi itu ditjantumkan, dan
2. Mengenai filsafat Marhaenisme jang menekankan, bahwa filsafat Marhaenisme adalah lahir dan batin; jang mengakui ke kuatan lahir dan kekuatan batin jang timbal balik dalam prosesnja.

Dan jang didalam perdjuangannja, panda ngan hidupnja; menjandarkan kepada kehidu pan rohaniah bangsa dan rakjat Indonesia, jaitu bangsa dan rakjat jang ber-Tuhan. Ke kuatan Jang Maha Kuasa Itu halaman 38. djadi dalam bidang Dasar Filsafat Marhaen isme.

Kekuatan Jang Maha Kuasa itu, jaitu jang ada tanpa mempunjai sebab, ia sebut Tuhan. Ini itu artinja rakjat Indonesia. Maka Tuhan lah pula jang menentukan adanja kekuatan lahir dan kekuatan batin didalam tubuh ma nusia. Ini Dasar2 Pokok Marhaenisme jang sekarang saja ungkap, jang disusun bersa ma oleh Lima orang itu.

Nah, Saudara2 saja sudah sampai kepada membitjarakan tentang Dasar2 Pokok Marha enisme jang diterima oleh Kongres di Pur wokerto tahun 1963, dan berarti berlaku untuk seluruh wilajah dan massa Front Mar haenis. Akan tetapi apa jang terdjadi pada tahun 1964 bulan Nopember? Terdjadilah sidang Badan Pekerdja Kongres di Lembang.

Dan sebagai Saudara2 ketahui, maka si dang Badan Pekerdja Kongres di Lembang telah mengeluarkan satu Deklarasi jang ter kenal. Deklarasi Marhaenis, dimana dida lamnja ditjantumkan definisi jang saja sebut kan tadi, jaitu definisi, bahwa Marhaenis me adalah Marxisme jang ditrapkan di Indo nesia. Dengan satu opdracht, bahwa hanja ada satu pengertian mengenai idiologi Mar haenisme, jaitu Marxisme jang ditrapkan se suai dengan kondisi2 dan situasi di Indo nesia.

Untuk memungkinkan adanja pengertian jang tepat mengenai idiologi Marhaenisme

itu, maka setiap Marhaenis setjara minimal harus mempeladjari dan menguasai (itu imperatief) .

1. Situasi dan kondisi serta sedjarah perdjuangan dan masjarakat Indonesia ;,
2. Ilmu dan teori Marxisme sebagai methode berpikir dan methode perdjuangan.

Saudara2, inilah pula jang mendjadikan sebab timbul pertikaian2 pendapat. Walau pun sudah mendjadi keputusan dari sidang Badan Pekerdja Kongres dj Bandung itu ta di, tetapi persoalan ini tidak bisa lepas daripada lingkungan PNI/Front Marhaenis. Ia tetap merupakan issue pertikaian.

Nah, demikianlah. Kita sekarang sudah tahu, bahwa definisi Marhaenisme adalah ...trapkan dan sebagainja itu.

Sedjarahnja demikian Sebagaimana Saudara2 tahu, tahun 1955 Panitia Doktrin pertama dimana duduk Sdr. Asmara Hadi telah mempersoalkan ini. Dalam Kongres di Semarang tahun 1956, persoalan doktrin tidak selesai, dan dibentuk Panitia Doktrin kedua. Saja mulai turut: Sampailah ke Kongres Solo. Purwokerto dan kemudian sampai kepada sidang Badan Pekerdja Kongres di Lembang: Menurut buku jang ada pada saja, dan menurut sedjarah dari pekerdjaan Panitia Doktrin, maka jang menjatakan pertama kali adalah Sdr Asmara Hadi, dan ini ditengahi oleh Bung Karno. Sedjak kita dengar dari Bung Karno tahun 1958, Asmara Hadi tahun 1955, Definisi ini terus djadi pertikaian: Tapi sekali kita mengatakan Marhaenisme adjaran Bung Karno, itu harus berarti bahwa Marhaenisme adjaran Bung Karno tidak bisa lain daripada definisi ini;

Saja sekali lagi mesti berkata benar, sekarang waktunja. Saja tidak tahu apakah Bu Hardi ingat atau tidak. Setelah Kongres Kesatuan dan Persatuan di Bandung, kami menghadap Bung Karno di Bogor mengha dap kepada Bung Karno sebagai Bapak Marhaenisme. Saja berkata kepada Bung Karno didalam bahasa Djerman : "Im Marhaenismus leben wir und sterben wir allen". Apa djawab Bung Karno ? 'Baik Tetapi Marhaenismus adjaran Bung Karno, dus Marhaenisme jang didalam arti, atau definisi Marxisme jang ditrapkan di Indonesia Saja lalu mengatakan pada waktu itu: Kami mengerti, tetapi persoalannja bukan itu. Pantja Sila sekarang sedang terantjam. Pantja Sila is in gevaar, Pantja Sila sedang dalam bahaja.

Kemudian Bung Karno bertanja kepada masing2. ketika itu jang mendjawab Pak Usep. Bagaimana; Marhaenisme adalah Marxisme jang ditrapkan, menurut definisi itu. Pak Usep tjuma mendjawab : Ja; bagi kami Marxisme itu sesuai dengan apa jang ditetapkan Bung Karno sendiri di UNPAD, jaitu Marxisme tidak lain dan tidak bukan hanja sebagai methode berpikir sadja.

Jang kedua kali waktu Panitia Peneliti Adjaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dari MPRS, saja Ketuanja; saja pernah datang ber-sama2 dengan kawan2 para anggota Panitia itu kepada Bung Karno. Ini terdjadi bulan September tahun 1966. Ketika itu ada Pak Roeslan Abdulgani, ada Pak Harto; ada Pak Sanusi; jang kebetulan saja bersamaan datang dan dari Panitia itu ada rupa2, ada dari NU; ada dari Gasbiindo; ada dari Golongan Karya, Golongan Daerah; memang anggota Panitia Peneliti dari MPRS itu terdiri dari Lima Golongan, Nasionalis; Islam; Kristen, Katholik; Daerah dan Karya.

Pada waktu itu, Saudara2 pada waktu itu Bung Karno baru sadja beberapa waktu sebelumnja; jaitu didepan Angkatan '45 telah menjatakan; bahwa beliau adalah seorang Marxis — "bahwa kalau dibelah dada saja maka saja ini adalah seorang Marxis". Itu

beberapa waktu berselang; saja tidak ingat tanggalnja: tetapi Saudara2 ingat kedjadiannja; tjuma tanggalnja lupa.

Djadi Bung Karno sudah mengatakan kepada dunia, bahwa beliau adalah seorang Marxis. Saja katakan kepada dunia, sebab Bung Karno bukan orang ketjil, Bung Karno adalah Pemimpin Besar, kata2nja satu patah sadja mesti didengar dunia pada ketika itu djuga. Dan semua Duta2 Besar sudah mengawatkan kpada negaranja masing2, bahwa Bung Karno menjatakan diri dihadapan Angkatan '45, bahwa beliau adalah seorang Marxis.

Nah, Saudara dalam kesempatan Panitia Penelijti itu; saja merasa didesak ketika itu oleh Bung Karno. Waktu itu dari pihak NU; ada Ibu Wachid Hasjim dan Pak KH Muslich.

Ibu Wachid Hasjim minta mbok Bung Karno itu tak usah toch menjatakan sebagai seorang Marxis; kami 'kan tidak pertjaja bahwa Bung Karno seorang Marxis.

Ibu Wachid Hasjim ini memang rupanja dekat dengan Bung Karno. Katanja lagi ; Lha; itu kan Marhaenisme sudah tjukup. Tetapi Bung Karno waktu itu mendjawab : Ja; Marhaenisme, tetapi Marhaenisme itu apa. Ini ada orang PNI, ini Pemimpin PNI; tjoba terangkan apa Marhaenisme itu Sambil menundjuk kepada saja.

Saudara2, bagaimana saja pada waktu itu, didalam keadaan jang didesak. merasa di faitac rompli s ja mesti menjatakan apa. Isi saja duduk berdampingan sekali. Bung Karno — Saja. Saja Ketua Panitia djadi mendapat kehormatan. Disitu ada Pak Harto. ada Pak Sanusi, ada Pak Roeslan Abdulgani, ini semua orangdjago2 toch, dan semua anggota Panitia, ada antara lain djuga Sdr. Muhd. Achmad, ada. Saja diminta; didesak oleh Bung Karno untuk mengatakan apa jang beliau inginkan.

Saudara2, tjobalah bajangkan oleh Saudara2 pada waktu itu apa jang mesti saja katakan Ber-kali2 saja berkata kepada Bung Karno, bahwa saja mengerti kepada keinginan Bung Karno, tetapi saja tidak bisa menerima.

Sebab sedjarah dulu tidak begini, lain. Djadi bagaimana saja mesti bisa mengatakan apa jang diinginkan oleh Bung Karno pada waktu itu.

Saja tidak bisa menerima devinisi ini. Bung Karno pada waktu itu menfait-accompli pada saja, supaja saja, karena orang PNI sebagai Ketua PNI, menerangkan tafsir Marhaenisme itu. Djadi ini untuk mendjawab Ibu Wachid Hasjim.

Itu bulan September. Saja terpaksa bungkem dngan seribu bahasa, bungkem dengan seribu bahasa. Apa saja mesti mendiscreditkan Bung Karno didepan orang banjak dengan menjatakan pendapat saja lain.

Apa saja mesti menjatakan apa jang beliau inginkan, tetapi jang bertentangan dengan geweten saja. Djadi ini soal pribadinja, lalu soal politis. Apa akan terdjadi, kalau saja pada waktu itu lalai lengah untuk berkata. Karena itu saja bungkem. Saja kuntji mulut saja, saja diam. Bung Karno bingung tentu. Apa boleh buat.

Nah, kemudian KH Muslich "intervensi", kata se-hari2nja njeleneh. Apa njeleneh? Njeleneh itu njeletuk. "Marhaenisme adalah Marxisme jang ditrapkan di Indonesia', begitu K.H. Muslich. Direct waktu itu Sdr Muhd: Achmad berkata : Tidak. Bukan! Saja tidak terima itu, begitu Muhd: Ahmad.

Ja, kalau begitu apa, kalau begitu apa. Bung Karno berkata. Muhd. Ahmad : Ja, buat saja Marhaenisme itu adalah synthese. Adalah synthese dari Nasionalisme Islamisme dan Marxisme. Itu adalah synthese dari

Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme, se perti apa jang diterangkan oleh Bung Kar no dalam **surat Kabar Pemandangan** dulu, Pak Achmad lupa tanggalnja, seperti djuga saja lupa. Jaitu dalam surat Kabar Pemanda ngan tahun **1941 waktu beliau** di Bengkulu.

Nah, itu djuga boleh, nah itu djuga boleh demikian Bung Karno.

Demikianlah, Saudara2. Dus Saudara2, me ngetahui, bahwa hangatnja persoalan ini, de finisi ini sampai kepada saat2 terachir de mikian. **Dan waktu MPP akan** mengadakan pertemuan, akan mengadakan sidang perta ma, dimana kami dari DPP datang mengha dap Bung Karno, Bung Karno masih pesan. bahwa Deklarasi Marhaenis itu hendaknja berlaku. Tetapi DPP pada waktu itu tidak dapat menerimanja.

Nah, demikianlah. Saudara itu gambaran kepada Saudara2, bahwa sadjak tahun 195', 1956. 1958 dan tahun 1958 inilah Bung Kar no menjatakan.

Saudara2, begitulah perlu diketahui seka rang oleh Saudara2, bahwa PNI Partai Na sional Indonesia, PNI/Front Marhaenis sam pai tahun 1964 sampai sebelum sidang Badan Pekerdja Kongres di Lembang, PNI meme gang pendirian sematjam itu, dus tidak me nerima definisi itu, tetapi sesudah Lembang itulah.

Tetapi saudara2 tahu dari mana datang nja ini sedjarahnja.

Saudara2, baiklah, belum mendjadi satu oplossing bagi Saudara2 dengan keterangan ini. Saja akan memberanikan diri memberi kan kepada Saudara2 bahan pemikiran. Apa jang sudah saja berikan, belum mendjadi op lossing, apa jang saja berikan, hanja konsta tering daripada sedjarah tentang definisi.

Tatapi jang mendjadi pertanjaan itu tadi, apa benarkah Marhenisme itu adalah Marxis me jang ditrapkan sesuai dengan kondisi di Indonesia?

Saudara2, barangkali agak pandjang ini horus saja terangkan tidak mengapa untuk mentjari kedjernihan.

Kalau Bung Karno dalam waktu jang achir2 ini, dus didepan Angkatan '45 menja takan, bahwa beliau seorang Marxis dan se belum itu belum pernah kita dengar, maka kita sebenarnja harus menerima kata2 be liau itu. Dus kita tahu Bung Karno seorang Marxis, dus kita mendengar bahwa Bung Karno seorang Marxis pada tahun 1966 . se belum itu, sebelum itu umur saja sudah 60 tahun, sebab umur itu berharga, djangan dilebihi dan djangan dikurangi. Ja, tanggal 30 Desember jad. itu jarig saja, orang Be landa bilang jarig, itu persis 60 tahun menu rut ibu saja. Saja sendiri tidak tahu. 30 De sember '67 dus 30 Desember '07, djadi mestinja kan sudah 60 tahun itu.

Nah, demikian Saudara2, kita harus mene rima atas pengetahuan dan atas pengumu man dari Bung Karno, bahwa Bung Karno se orang Marxis. Jang sebelum itu belum per nah kita **dengar. Dus baru tahun** '66 Bung Karno mengatakan seorang Marxis. Saja ti dak tahu mengapa Bung Karno perlu menja takan itu, walaupun saja tahu, bahwa me mang Bung Kano seorang Marxis. Saja tahu Pak Sartono djuga tahu, bahwa Bung Karno seorang Marxis. Tetapi beliau baru menja takan tahun '66 didepan Angkatan '45. Saja tidak tahu apa maksudnja. Apa itu spontani tas sadja, atau bagaimana?

Nah, Saudara2 saja mengatakan Bung Karno seorang Marxis. Begini soalnja :

Saudara2 pernah membatja riwajat hidup Bung Karno, Saudara pernah membatja bu ku tebal, jaitu kumpulan tulisan namanja "Dibawah Bendera Revolusi". Teliti oleh Saudara2 semua tulisan itu.

Saja mempunjai kesimpulan dengan tjara membatja itu sadja, tetapi disamping i-

tu djuga menurut kata crang2 tua, Bung Karno adalah seorang Marxis, tetapi Marxisnja Bung Karno itu adalah Marxisnja Bung Karno sendiri. Marxis Bung Karno bukan Marxis dari abad ke-19, bukan dogmatic Marxis.

Bung Karno adalah salah seorang Marxis diantara berdjuta-djuta Marxis, atau beratus ribu Marxis, atau berpuluh-ribu, beribu beratus ratus Marxis didunia ini, jang satu dengan lainnja berbeda. Sebab dalam dunia Marxisme telah timbul telah tumbuh puluhan ratusan revisionis, dan Bung Karno adalah salah satu daripada Marxis revisionis. Beliau akan mengakui, sebab beliau sudah mengakui ini didalam buku jang ditulis oleh belia sendiri, jaitu didalam "Dibawah Bandera Revolusi", jang beliau mengatakan, bahwa revisionisme tidak dimulai dari Bernstein, revisionisme Marxisme di mulai oleh Marx sendiri.

Dus Beliau disana sebagai alasan mengatakan: Apa misalnja revisionisme dari Marx itu? Jaitu apa jang dikatakan oleh Marx Das kapital, mengenai teori verelendung, didalam Manifesto Komunis dan didalam mengenai kesengsaraan rakjat itu berlainan dasarnja, beliau mengakui adanja revisionisme.

Djadi Revisionisme itu sudah dimulai dari Marx sendiri. Dus kalau sesudah Marx itu ada revisionis2, Marxis2 revisionis, itu soal biasa. Ini berarti djuga beliau mesti akan mengakui "saja pun seorang revisionis". Tapi ini tidak akan dinjataakn.

Apakah ini satu tuduhan dari saja kepada Bung Karno? Betul, ini tuduhan dari saja, tuduhan jang baik sekali.

Saudara2, Surat Kabar Sinpo (Pia) Djakarta 8 September '58 berkata . 'Marhaenis Sartono tokoh PNI dan bekas tokoh Partindo dulu dalam sambutannja pada pertemuan besar Front Marhaenis Djakarta Raya Minggu pagi di Gedung Pemuda antara lain membenarkan, bahwa Marhaenisme adalah Marxisme jang disesuaikan dengan keadaan2 di Indonesia dengan maksud mempertinggi deradjat kaum marhaen jang djumlahnja berdjuta2. Tetapi dalam pada itu menurut Marhaenis Sartono, Marhaen bukanlah proletar, dan Marhaen tidak memperdjuangkan suatu kassen-strijd jang prinsipiil diadjarkan dalam Marxisme.

Marhaenis Sartono dalam hubungan ini menegaskan bahwa PNI tidak dapat menerima historis-materialisme dalam keseluruhannja, oleh karena menurut Marhaenisme bukan hanja keadaan ekonomi, tetapi tjita2 djuga menentukan tjorak dan perkembangannja jang wadjar. Oleh Sartono dikatakan bahwa selain hal tersebut, PNI tak dapat pula menerima diktatur dalam bentuk apapun djuga.

Djika Partindo kata Mr. Sartono, dalam ideologinja tak dapat pula menerima historis-materialisme sebagai satu2nja hal jang menentukan tjorak serta perkembangan masjarakat dan selain itu tak dapat pula menerima diktatur dalam bentuk apapun djuga, maka antara PNI dan Partindo tak terdapat perbedaan apa2. Akan tetapi apabila Partindo berpendapat, bahwa untuk mereka historis-materialisme itu dalah satu2nja jang menentukan tjorak masjarakat, maka ideologi jang dianutnja itu bukanlah Marhaenisme, akan tetapi terang Marxisme".

Demikian Mr. Sartono jang menambahkan, djikalau mereka (Partindo) memang betul menerima adjaran Marxisme dalam keseluruhannja tak usahlah mereka menamakan dirinja marhaen dan hal itu bukanlah sesuatu jang memalukan.

Sartono mengemukakan bahwa djika soal2 tsb didjawab Partindo, barulah dapat kita lihat, apakah antara partai itu dan PNI

terdapat perbedaan jang prinsipiil?" Demikian Sin Po/PIA - x)

Djelas, ja, Saudara2?

Baiklah ini masih ada perlunja. Dalam ... itu sepandjang tulisan HR jaitu Asmara Hadi maksudnja, jang seperti diketahui Sdr. Asmara Hadi adalah tokoh Partindo, Marhaenisme menurut Bung Karno dikatakannja menerima teori perdjuangan klassen-strijd, berbeda dengan PNI sekarang. PNI sekarang, jang mengakui adanja perdjuangan klas tetapi tidak menerimanja sebagai teori. Menurut Asmara Hadi, ini keterlaluan surat kabar ini, 'Asmara' djadi 'Asrama. Ini keterlaluan.

Menurut Asmara Hadi ketika mendjelaskan Manifes Politik Partindo sekarang, Partindo menerima Marxisme sebagai methode ilmiah dalam menganalisa keadaan masjarakat, djadi bukan pandangan hidup, sebaliknja PNI menolak adjaran Marxisme. Begitulah. x). **Tjatatan :**

> **Kesemuanja *tertulis* dalam buku ketjil hasil karja Alimin dengan *djudul* ; Peladjaran Karl Marx ... Nopember '53.**

Ini buku jang tidak ada pada Saudara2, menerangkan **demikian. x)**

Djadi Pak Sartono memang mungkin, Pak Sartono itu kan orang tua, ja een van de oprichters dari PNI, satu diantara toko'2 pendiri dari PNI, bahwa Marhaenisme adalah Marxisme jang disesuaikan dengan keadaan2 di Indonesia dan sebaginja. Tetapi mengatakan Marhaen bukan proletar dan Marhaen tidak memperdjoangkan suatu klassen strijd jang prinsipiil diadjarkan dalam Marxisme. Pak Sartono mengatakan, bahwa Marhaenisme itu adalah Marxisme jang di trapkan.

Tetapi tidak mengakui sebagai teori adanja klas-sentrijd di Indonesia dan tidak mengakui dan tidak mau, tidak mengakui adanja, atau tidak menghendaki adanja diktator, atau diktatur dalam segala bentuk dan tidak menerima Historis-Materialisme setjara keseluruhan didalam pengertian, bahwa segala sesuatu hanja ditentukan oleh benda, tidak diakui. Pada hal klassentrijd jaitu perdjuangan klas, class-struggle itu adalah satu idea, basic-idea dari Marxime, sebagai djuga economis - determinisme, historis - materialisme itu satu basic idea dari pada Marxisme oleh Marhaenisme tidak bisa diterima. Terserah, atau baiklah dipeladjari sampai di mana konsekwensi dari pengakun Pak Sartono tentang difinisi Marhaenisme itu. Tetapi Saudara2, semua harus mengakui saja pertaku tokoh2 PNI, pendiri2. atau tokoh2 pendiri dari PNI maksud saja, saja tidak bermaksud mengurangi penghargaan saja atas djasa2 mereka, toch harus mengakui bahwa Marhaenisme digali oleh Bung Karno. Fakta sedjarah. Walaupun azas semula dari PNI jang didirikan pada tahun 1927, 4 Djuli itu belum Marhaenisme, dan bahwa tafsir Marhaenisme ketika itu tidak disangkut-pautkan dengan Marxisme.

Sebaagi Saudara2 ketahui ini ada didalam sedjarah pergerakan kebangsaan, bahwa PNI jang didirikan pada tahun 1927 itu berazaskan, selfhelp, non cooperation dan anti Kapitalisme dan Imperialisme. Itu mula2. Dan pendirian PNI tahun 1927 ini, tidak bisa dilepaskan dari pada usaha2 dan pengaruh2 dari para studenten. Mahasiswa di Eropah pada waktu itu, seperti apa jang diterangkan oleh Pak Narjo. Memang benar tahun 1922 di Nederland didirikan Perhimpunan Indonesia, kemudian Mahasiswa2 kita jang ada disana itu bergerak dan achirnja mempengaruhi djuga pergerakan2 di Indonesia, se hingga pada tahun 1925 Bung Karno mendi-

rikan Algemene Studie Club pada tahun 1927 bersama2 dengan kawan2 jang baru datang dari Negeri Belanda mendirikan PNI, Persarikatan Nasional Indonesia dengan azas semula jaitu self help, non-cooperation dan tudjuannja vrij making van Indonesia, memerdekakan Indonesia, Indonesia Merdeka sekarang djuga.

Kemudian berkembang, maka azas ini ditambah jaitu dengan anti imperialisme dan Kapitalisme. Djusteru dengan adanja azas anti kapitalisme dan anti imperialisme inilah maka mengenai imperialisme diperlukan adanja studi tentang masjarakat Indonesia, teruasnja bagaimana mengungkap dan mentjari rahasia2 daripada kolonialisme.

Demikianlah Bung Karno dengan bantuan kawan2 tentunja, mempeladjari persoalan ini, mengupas segala sesuatunja inj mulai dari djaman Hongie Tochten, jaitu dari sedjarah Indonesia, mulai dari Cultur stelsel, monopoli politik dalam perdagangan, Opendeur politik/buka pintu, Finanz Kapital dan sebagainja. Saudara2 sudah batja semua rahasia2 dari Kapitalisme dan rahasia2 dari Imperialisme dan kolonialisme. Karena itu maka azas dari PNI kemudiannja ditambah dengan anti Kapitalisme dan anti Imperialisme, anti Imperialisme berarti bahwa kita harus membebaskan diri dari pada Kolonialisme, ja kongkritnja dari Belanda bebas dari dominasi oleh bangsa atas bangsa, anti Kapitalisme jaitu dalam arti bahwa kita harus bebas dari segala penindasan oleh manusia atas manusia Ini kesemuanja tidak lepas dari inlander-feer, suasana bergedjolaknja dunia saat itu, terutama dengan bangkitnja Pan A-ziatisme.

Nah, dengan inilah saudara2 jaitu setelah PNI berdiri dengan azas jang semula kemudian ditambah, maka disanalah timbul satu Study dari Bung Karno terhadap masjarakat Indonesia jang achirnja lalu menimbulkan satu istilah baru, jaitu istilah Marhaenisme jang waktu itu tidak ditegaskan/belum ditegaskan sebagai azas daripada PNI. Jang ditondjolkan oleh Bung Karno ialah pengertian tentang nasionalisme dan demokrasi jang kemudian kita kenal dengan rumusan Socio Demokrasi.

Adapun kata „Marhaen" dipakai Bung Karno di Djawa Barat seperti pengganti „Kromo untuk di Djawa Tengah. Marhaenisme memang adalah Kromoisme.

Saudara2, saja tadi mengatakan, apakah itu satu hukuman bagi Bung Karno, kalau saja mengatakan beliau revisionis. Saja katakan hukuman jang baik. Sebab Bung Karno sendiri sekarang sudah mengakui sebagai seorang Marxis. Tetapi jang sebelumnja menurut sedjarah kita mengetahui bahwa Bung Karno dianggap sebagai seorang Marxis tetapi Marxis dalam arti Marxis revisionis, sebagai satu diantara revisionis di dunia Marxis.

Saudara2, saja mengatakan tadi Bung Karno seorang Marxis. Mengapa; Satu, atas dasar apa jang digambarkan oleh definisi? tadi Kedua, adalah kemungkinan adanja Rivisionis2 dari Marxisme itu.

Saudara2, saja tidak bawa — didalam Buku Dibawah Bendera Revolusi, karena terlalu besar, ja didalam Buku dibawah Bendera Revolusi, beliau mengatakan perdjuangan Marxis modern itu mempunjai tjara2 dan strategi tersendiri untuk mengusai masjarakat dan rakjat. Seorang Marxis modern tidak anti Nasionalis, seorang Marxis modern tidak anti agama.

Dikatakan, Saudara-saudara nanti boleh buka Buku Dibawah Bendera Revolusi didalam hal NASIMA, Nasionalisme Islamisme Marxisme jaitu jang beliau inginkan

bahwa antara 3 unsur NASIMA ini. Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme itu supaja mendjadi satu dalam satu ikatan, dalam satu kekuatan mendjadi satu potensi jg kuat untuk menumbangkan Imperialisme. Dalam rangka itu beliau mengatakan, bhw Marxisme modern sekarang ini didalam gerakan Marxis didunia, sudah robah haluan perdjuangannja. Djadi kalau Marxis Ortodox, atau Marxis dogmatis, seperti Marxisme, — Leninisme, atau Marxisme Trozkijsme itu anti agama, atau tidak mau tahu mengenai kekuatan absoluut, jaitu Tuhan: atau anti Nasionalisme, sebab Internasjonals cosmopoliet: maka Marxis Modern tidak demikian. Marxis Modern tidak anti Nasionalis: tidak anti Agama. Dan di landjutkan oleh Bung Karno sendiri, bahwa Bung Karno tidak bisa menerima sebagai seorang Marxis, ini kontradiksinja Saudara2 sebagai seorang Marxis beliau, tidak menerima teori perdjuangan klas dan tidak manerima diktatur dalam segala bentuk.

Dus Bung Karno seorang Marxis, Marxis revesionis Marxis modern (?) jang menerima Agama jaitu theisme, jang menerima nasjonalisme jang menerima sosialisme jang menerima sosialisme. "Bahwa didalam tjita tjita politikku aku ini Nasjonalis, didalam tjita2 sosialku aku ini sosialis., didalam tjita2 sukmaku aku ini sama sekali Theis. Sama sekali pertjaja kepada Tuhan" Buku Sarinah dihalaman 325. Itu Marxisnja Bung Karno ditambah dengan tidak menerima perdjuangan klas sebagai teori, tidak menerima diktatur.

Terserah kepada masjarakat sekarang terserah kepada dunia Marxis apakah Bung Karno itu sebenarnja.

Tetapi toch beliau menjatakan „saja seorang Marxis" djadi sudah lebih daripada dulu. Dulu beliau mengatakan "saja seorang Marxis' tetapi djuga „saja seorang Islamit' Muslim' tetapi djuga „saja seorang Nasionalis" Itu dulu. Dan ini diutjapkan didalam surat kabar Pemandangan pada tahun 1941. Tetapi dalam tahun 1966 beliau menjatakan „saja seorang Marxis' Punt.

Nah, kalau sekarang Saudara2 dan kita bersama kembali kepada sedjarah dulu, kepada Buku Dibawah Bendera Revolusi, sekarang saja tinggal menanjakan Marxis apakah Bung Karno. Dalam hubungannja dengan Marhaenisme sebagai saja terangkan tadi, jaitu sebagai seorang Marxis, Bung Karno memegang dua pendirian tadi: Imperialisme harus hantjur. Kapitalisme harus hantjur.

Karena hanja dengan hantjurnja imperialisme, lenjap kolonialisme, dan Kapitalisme inilah maka mesjarakat jang dalam segala halnja menguntungkan dan memberikan kebahagiaan terhadap kaum Marhaen bisa terlaksana.

Karena hanja dengan hantjurnja imperialisme, lenjapnja kolonialisme, dan Kapitalisme inilah maka masjarakat jang dalam segala halnja menguntungkan dan memberi kan kebahagiaan terhadap kaum Marhaen bisa terlaksana.

Didalam melaksanakan perdjuangannja. Bung Karno sudah berobah, Kembali lagi saja katakan, dus Marxisnja itu berubah dengan sendirinja. Bung Karno harus menjesuaikan diri dengan keadaan. Sebab beliau terpaksa melihat keadaan di Indonesia ini. Marx mengadjarkan, bahwa Kapitalisme, atau Imperialisme harus dilawan oleh Proletar sadja jang ada? Apakah istilah proletar jang diberikan oleh Marx itu di Indonesia berlaku sepenuhnja?

Bung Karno menganalisa ini dari pada matjam2 Revolusi didunia Revolusi Amerika. dalam abad ke—18 tahun 1776 beliau mempeladjari Revolusi Amerika Revolusi Amerika bukan revolusi rakjat Revlusi Amerika adalah revolusi Militer, revolusi kekuasaan, kekuatan. Angkatan perang dengan sendja

ta melawan kolonialisme Inggeris. Bung Karno djuga mempeladjari revolusi Perantjis tahun 1789. itu djuga buku revolusi Rakjat itu adalah revolusi middenstand revolusi bordjuis jang menggunakan rakjat Beliau djuga mempeladjari Revolusi India. Revolusi India adalah Repolusi Middenstand, revolusi Swadesi jang tidak berhasil.

Beliau berpendapat, bahwa di Indonesia tidak bisa revolusi middenstad, tidak bisa revolusi militer, sebab tidak punja militer Revolusi middenstand, atau bordjuis. Jang ada adalah rakjat jang diidjadjah, rakjat jang sengsara Tjuma rakjat ini apa, apa inj proletar, atau bukan. Bung Karno sampai kepada Study, bahwa Indonesia sebagian terbesar ini bukanlah masjarakat proletar, tetapi adalah masjarakat „jang saja belum tahu namanja" Masjarakat jang terdiri dari pada memang sebagian proletar jaitu jang hanja mendjual tenaganja sadja kepada madjikan tetapi djuga terdiri daripada mereka jang mempunjai alat2 produksi, seperti mempunjai sawah, mempunjai patjul mempunjai alat2, pandai besi, jang mempunjai apa namanja, delman dan sebaginja.

Djadi rakjat jang bukan hanja mendjual tenaga kepada madjikannja, sadja, kepada kaum2 kapitalis tetapi djuga rakjat2 jang mempunjai alat2 produksi sendiri jang ketjil sifatnja

Djadi disamping proletar ini, ada banjak dan sebagian besar rakjat Indonesia jang sengsara, tetapi jang mempunjai alat2 produksi. Ini tidak bisa dinamakan proletar Jang sebetulnja dari sedjarahnja mereka ini adalah manusia2 jang memang betul2 mempunjai alat2 produksi dan menghasilkan bagi perdagangan Indonesia, baik didalam maupun diluar Negeri. Teliti sedjarah perekonomian Indonesia sebelum Belanda.

Maka karena itulah Bung Karno sampai kepada suatu kesimpulan bahwa perdjuangan melawan imperialisme dan djuga perdjuangan melawan kapitalisme, tidak tjukup hanja oleh proletar sadja di Indonesia ini, tetapi djuga oleh rakjat2 lainnja, tetapi jang kesemuanja kalau disatukan ini adalah rakjat melarat.

Beliau mula2 akan menggunakan kata2 kromo djadi masjarakat kromo. Tetapi achirnja pada suatu ketika setelah beljau memimpin partai, beliau sampailah kepada satu ilham.

„Pada satu waktu saja sampai kepada satu saat, jang saja memerlukan satu nama umum bagi semua jang ketjil2 ini Tadi jang saja katakan ia buruh, ja tani, ja pegawai ja nelajan dllnja ini semuanja tidak ada jg besar melainkan ketjil2 semuanja Lantas saja beri nama kepada semuanja itu „Marhaen'.

Sedjarah, „tjeritanja ialah pada suatu hari saja berdjalan disebelah selatan kota Bandung Kalau Sdr mau tahu nama desanja Tjigereleng. Di Tjigereleng saja berdjalan djalan disawah dan disanalah bertemu dengan seorang penjawah, seorang jang mempunjai sawah, seorang kampung, seorang penduduk kampung jang mempunjai sawah dan jang mempunjai rumah gubuk mempunjaj alat2 produksi patjul dsb, dan simiskin itu adalah Marhaen. Maka sampailah saja pada satu ilham timbul ilham. kalau begitu semua rakjat Indonesia jang miskin inj saja namakan Marhaen. Ja jang proletar ja jang bukan proletar jang buruh ja jang tani ja jang nelajan ja tukang gerobak ja jang pegawai pendeknja jang ketjil2 ini semua Marhaen. Disinilah timbul istilah 'Marhaenjsme' Waktu itu saja memimpin partai".

Djadi beliau sudah memimpin partaj beliau sudah mendjadi pemimpin PNI waktu itu.

Dus. Saudara2, satu pengetahuan baru jang belum kita selidiki dulu bahwa istilah

„Marhaenisme" dari kata2 Marhaen dan kemudian istilah Marhaenisme jang digunakan oleh Bung Karno ini, adalah didapat oleh Bung Karno setelah beljau memimpin partai

Sjang disinj tidak disebutkan tahun berapa Tetapi bolehlah saja berikan antjer antara2 antara tahun 27 dan Tahun '29 Mengapa saja beri antjer2 itu? Oleh karena tahun '29 bulan Desember Bung Karno sudah masuk tahanan. Dan didalam plejdoi Bung Karno dihadapkan landrad, jaitu pada Desember tahun '30 beljau sudah menguraikan Marhaenisme itu didalam bukunja. Indonesia menggugat. Dus Marhaen dan Marhaenisme itu didapat antara Tahun 27 dan tahun 29 sebab antara tahun "27 beliau sudah memperkenalkan kata2 Marhaen itu.;
Kromo. Marhaen, Jacob, Kromo Marhaen Jacob. achirnja Marhaen, digunakan jang sesuaj waktu itu dengan membiknja PNI di Djawa Barat, chususnja di Bandung.

Djadi memang kata Marhaen itu diambil darj seorang penduduk desa Tjigereleng, Bandung Selatan, Itulah istilahnja. Dus istilah Marhaenisme sesudah beljau memimpin partaj. Ini diakui oleh semua tokoh2 pendirj PNI antara lain Pak Narjo bahwa memang istilah Marhaenisme itu adalah tjiptaan Bung Karno sendirj. Tetapi jang isinja jalah sebagai hasil kupasan penelaahan bagaimana harus menjusun satu kekuatan untuk menjatuhkan atau melenjapkan imperialisme dan kapitaljsme.

Didalam taraf pertama, adalah mendjatuhkan imperialisme Belanda, dan sesudah kemerdekaan, haruslah merobohkan kapitalisme.

Untuk ini, Saudara2, Bung Karno mengorbankan pendirian sebagai seorang Marxjs dalam arti jang komplit. Bung Karno membaktikan kepada Indonesia satu idiologi baru, jang dinamakan Marhaenisme, Jang Marhaenisme ini sudah mengebirj Marxjsme, dan bahkan bertentangan dengan Marxjsme dalam arti jang sesungguhnja.

Orang tidak boleh mengatakan Marxis kalau didalam Marxjsme itu prinsip2 jang basic, atau prinsip2 jang pokok, jang terpenting tidak diambil.

Saudara2 batja Manifest Komunis Saudara akan membatja antara lain Basic Idee dari Marx, jaitu mengenai pengaruh ekonomi dalam hal ini dimaksudkan jaitu economjcche determinisme.

Dan kedua, class struggle, djadi klas sen strijd

Ketiga, penghantjuran kekuatan jang ada .

Dan economisch determinisme inj djdalam hal filsafat materialisme, atau materialisme filsafat adalah historis materialisme, jang achirnja kalau sampai kepada satu epistomologie itu akan memungkiri adanja kekuasaan absoluut, absolute macht dari alam jaitu Tuhan, memungkirj adanja Tuhan. Itu larinja economjch determisme inj.

Class-struggle artinja perdjuangan klas untuk menghilangkan adanja klas didunia maka perlawanan terhadap klas berkuasa harus diadakan class -struggle maksudnja perdjuangan antara klas jang menindas dan jang ditindas, jang menguasai dan jang dikuasai dalam segala tahap kemasjarakatan Dan ketiga, harus melenjapkan untuk selama lamanja kekuasaan jang ada jang exploiting jang selalu memeras dan menghisap. Ini larjnja dalam pelaksanaannja kepada diktatur van het proletariat Ini dalam Manifesto Komunis.

Marhaenisme menolak ini djustru Marhaenisme jang digali oleh Bung Karno menolak economisch determinisme jang lalu mendjurus kepada filosofise beschouwingnja. Dus didalam pengertian bahwa Bung Karno ada

lah Marxis menerima Ketuhanan menerima fal safat batin, dus lahir batin itu tadi, me nolak diktatuur menolak klassenstrijd jaitu class-struggle sebagai teori di Indonesia Ka lau ini pokok2 jang tiga sadja disamping jg lain2 jaitu athisme klassenstrijd dikta- tuur ditolak bagaimana seseorang Marxime Dan karena ini ditolak oleh Marhaenisme bi sa dikatakan sebagai Marxisme. Disinilah le taknja.

Nah kalau orang mengatakan dan Bung Karno sampai sekarang mengatakan bahwa beliau itu adalah Marxis tetapi jang sudah mengorbankan idiologi Marxisme jang sesung guhnja dan telah memberikan suatu Marha enisme kepada masjarakat Indonesia demi hantjurnja kolonialisme dan demi hantjurnja kapitalisme.

Dan karena itulah kita bisa mengerti, apa jang djandjurkan oleh Bung Karno didalam propaganda dimasa-masa jang lampau. Ba tjalah kembali, Sdr2. "Indonesia Menggu gat", jang bukunja begini, ini saja tukang djual obat. Kita bisa mengerti mengapa Bung Karno selalu menggembar-gemborkan Nasionalisme. Nasionalisme njawanja pem- bentukan kekuasaan.

Nasionalisme jang diandjurkan oleh Bung Karno, Nasionalisme jang dimaksudkan oleh Bung Karno disini ialah Nasionalisme posi tief. Ini saja ambil kata2 jang baik ; "Ka mi punja nasionalisme haruslah suatu na sionalisme jang positief, suatu nasionalisme jang mentjipta suatu nasionalisme jang po sitief, suatu nasionalisme jang mentjipta dan memudja. Dengan nasionalisme jang po sitief itu maka rakjat Indonesia bisa men dirikan sjarat2 hidup merdeka jang bersi fat kebendaan dan kebatinan"; Sdr2. ber sifat kebendaan dan kebatinan.

Dus ini sudah lahir batin. "Dengan meng hidup2kan nasionalisme jang positief itu" — ini spellingnja tahun '29 — " maka ia bi sa mendjaga djangan sampai nasionalisme itu mendjadi nasionalisme jang chauvinits, atau djinggo nasionalisme jang agressief". Nasionalisme diandjur2kan, digembar-gembor kan mendjadi pokok propaganda sebagai se mangat, sebagai semangat, sebagai djiwa pro paganda. Teori Manifesto komunis, tidak, tetapi adalah internasionalisme. Internasi onalisme dalam arti Kosmopolitorisme, itu lah manipesto komunis. Tetapi Bung Karno lebih djauh dari pada nasionalisme ini, ja itu nasionalisme kemanusiaan, nasionalis me jang mentjipta dan memudja. Nasionalis me jang disini dikatakan oleh Arabndogos ke nasionalisme jang adalah sebenarnja Allah sendiri. Artinja, maksudnja adalah nasionalisme jang tinggi deradjatnja. Dari inilah, nasionalisme inilah jang terus diko ar2kan oleh Bung Karno, Notabene Bung Karno seorang Marxis. Ja, memadju2kan nasionalisme ini maka sampailah Bung Karno kepada Sosio-Nasionalisme, jaitu nasionalis me jang sadar akan kemasjarakatan, jang sadar akan kemanusiaan nasionalisme jang memudja.

Socio berarti kemasjarakatan atau kema nusiaan. Dan kalau kita berbitjara tentang kemasjarakatan dan kemanusiaan, ini kita tidak bisa hindarkan diri dari pada rasa memudja, nasionalisme memudja, me mudja, memudja didalam arti mengabdi ke pada Jang Maha Kuasa. Tetapi waktu itu memang tidak didjelaskan, sebab pada waktu itu pergerakan tjuma ditudjukan kepada ke pentingan politik. Dus strategi pada waktu itu adalah membangkitkan segala sema ngat jang ada, jaitu semangat nasionalisme untuk menjusun kekuatan. Kita belum bisa membitjarakan soal Agama. Walaupun hal ini kuat, karena Bung Karno sudah mulai menggembarkan soal Agama, bahwa masja rakat jang ditudjunja dengan socio-nasiona lisme dan socio-demockrasi itu adalah masja

rakat jang djuga masjarakat beragama.

Sdr2. buka halaman 74 Kitab Mentjapai Indonesia Merdeka. "Marhaen bergerak tak lain tak bukan buat mentjari hidup dan mendirikan hidup". Dus positief creatief", hidup kerezekian hidup kesosialan; hidup kepolitikan, hidup ke-kulturan; hidup keagamaan pendek kata hidup kemanusiaan jang leluasa dan sempurna; hidup ke-manusiaan jang setjara manusia dan selajak manusia. Ini ditulis dalam tahun '33. "Mentjapai Indonesia Merdeka'. Dan dikeluarkan resmi oleh Departemen Penerangan, boleh beli ditoko2.

Saudara2, itulah djalan pikiran dan sifat hakekat daripada Marhaenisme itu. Djadi kembali sedjak semula Marhaenisme itu, dirumuskan dengan socio-nasionalisme dan socio-demokrasi.

Saudara2 ini sudah ditundjukkan didalam sedjarahnja dan dari djalan pikiran saja, bahwa Marhaenisme, socio-nasionalisme, so socio demokrasi ini bukanlah Marxisme. Dan saja tolak pula definisi bahwa Marhaenisme adalah Marxisme jang diterapkan di Indonesia. Sebab kalau dikatakan bahwa Marhaenisme adalah Marxisme jang ditrapkan di Indonesia, maka pikiran kita harus lari kepada RRT, harus lari kepada Moskow, atau daerah2 lain maksud saja negeri2 lain jang tidak mendurhakai prinsip2 dari Marxisme.

Marhaenisme "mendurhakai" Marxisme; Seperti jang tadi saja katakan, membuang class struggle; teori perdjuangan klas; membuang diktatur, membuang athejsme. Dan malah kalau kita lari kepada Undang2 Dasar '45, teori meerwarde, teori nilai lebih, teori itu djuga sudah dibuang dan memang tidak bisa dalam Marhaenisme. Dus bukan Marxisme jang ditrapkan di Indonesia, tetapi Marhaenisme jang harus kita akui jang digali oleh seorang Marxis, seperti Marxisnja Bung Karno itu, oleh seorang Marxis, atau seorang jang menjukai Marxisme seperti Bung Karno.

Ada kontradiksi; Saudara2; antara definisi "Marhaenisme adalah Marxisme jang diterapkan" dengan istilah "Marxisme saja gunakan sebagai alat sadja; atau sebagai alat methode berpikir". Itu berlainan. Kalau Marhaenisme dikatakan sebagai hasil penggalian dengan menggunakan alat, tjara berpikir Marxis, barangkali masih bisa kita timbang2 untuk mengartikannja. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa Marhaenisme adalah Marxisme jang diterapkan di Indonesia, itu sudah tidak bisa kita terima. Bagaimana bisa kita mengatakan begitu. Marxismenja sendiri didurhakai, Marhaenisme dikatakan Marxisme jang diterapkan setjara logis. Saja pernah mengatakan kalau sebagai alat misalnja, bisa sadja dipertimbangkan dan itu bukan satu-satunja alat.

Djadi bisa sadja kalau sebagai alat, Pak Wir djuga mengatakan Marxisme digunakan hanja sebagai alat berpikir, dan dengan tjara berpikir itu menghasilkan satu buah, satu hasil baru, jaitu Marhaenisme. Itu barangkali bisa kita pertimbangkan. Tetapi kalau saja mengatakan, saja menggunakan Marxisme sebagai alat menganalisa keadaan masjarakat dan berbuah Marhaenisme adalah Marxisme, maka begitu salah. LOGIKA — saja, Patjul — ini alat matjul tanah. Saja tanam apa disitu? Apakah hasil daripada tanah jang saja tjangkul itu boleh saja namakan patjul? Itu tidak bisa! Alat tinggal alat; alat tidak bisa berhubungan dengan produksi jang tumbuh daripada tanah jang saja tjangkul. Tidak bisa. Alat ada diumpamakan djuga sebagai pisau, pisau penganalisa, dadi pisau untuk mengupas

mangga. Simangga dan pisau tidak bisa di satukan, alat dan mangga lain.

Djadi didalam hal ini, Saudara2; maka saja sekarang mengatakan kesadaran saja dalam soal ini, bahwa istilah definis Marhaenisme jang orang sekarang mengatakan bahwa bagaimanapun Marhaenisme itu adalah Marxisme jang diterapkan dsb. ini saja tolak.

Sebab Marhaenisme bertentangan dgn Marxisme. Tjatat tadi basic-ideas. Ini objektif. Pun djuga kalau mengatakan bahwa Marhaenisme adalah Marxisme, itu tidak bisa; Marhaenisme itu sebagai nasilnja adalah Marxisme jang ditrapkan. Ini tidak logis.

Nah Saudara2, djelas bahwa buat saja Marhaenisme sedjak semula sudah mengandung unsur2 apa jang sekarang ditetapkan oleh MPP, jaitu socio-nasionalisme socio demokrasi dan Ketuhanan Jang Maha Esa.

Seperti apa jang sudah saja batjakan ini mulai dari "Indonesia Menggugat" sampai itu tadi dan sampai "Mim", disana sudah tergambar unsur2 Ketuhanan, penghargaan Keagamaan, tjuma waktu itu sebagai taraf strategi perdjuangan, kita memang tidak menondjol nondjolkan soal Agama. Apalagi karena ketika itu partai Agama sudah banjak.

Mari sambil merokok kita teruskan. Nah Saudara2, sampailah kita kepada socio-nasionalisme dan socio-demokrasi. Kalau socio-nasionalisme ini pada tingkat pertama adalah dititik beratkan diwaktu perdjuangan melawan imperialisme, maka socio-demokrasi adalah dimaksudkan untuk mewudjudkan masjarakat, sesudah Indonesia Merdeka ter tjapai, jang dimaksudkan didalam buku2 Mentjapai Indonesia Merdeka" ialah diseberang djembatan mas, mewudjudkan masjarakat adil makmur.

Ini socio demokrasi. Walaupun ini sudah ditjetuskan sedjak semula untuk kritik terhadap masjarakat, untuk kritik pula terhadap bordjuis, Revolusi2 jang saja uraikan tadi, revolusi Amerika, repolusi Perantjis, revolusi India, dan seterusnja sebagai kritik, jaitu bahwa revolusi2 itu hanja menggunakan rakjat sadja untuk meningkatkan kaum middenstand, dan achirnja mereka berkuasa, setelah berkuasa mereka menjengsara, memeras, dan menghina atau menjengsarakan rakjat.

Karena itu maka socio demokrasi ini dimaksudkan demokrasi jang komplit, jaitu social ekonomisch, atau politiek, ekonomische-democratic. Dus demokrasi didalam bidang politik dan demokrasi didalam bidang ekonomi. Demokrasi dibidang politik sadja orang tidak akan dapat hidup dengan baik, Ringkasnja dia bisa mendjadi anggota Parlemen berkaok-kaok, tetapi keluar dari Parlemen, dia bisa dionslag oleh madjikannja, bisa dilepas oleh madjikannja dan sengsaralah hidupnja. Karena itu maka demokrasi itu harus komplit, demokrasi ekonomi dan demokrasi politik.

Demokrasi politik dimana orang bisa turut bersama2 mengatur negara, mengatur pemerintahan, demokrasi ekonomi dimana orang bisa mempunjai hak jang luas jang baik didalam bidang perekonomian.

Karena itulah maka didalam hal ini idee koperasi diandjur-andjurkan, idee koperasi, karena dengan djalan koperasi inilah pada taraf pertama bisa mendjelang terlaksananja apa jang dimaksudkan didalam Undang2 Dasar '45 Pasal 33, jaitu ekonomi jang diatur setjara kekeluargaan, dimana dipisahkan hak dan wewenang dari penguasa, atau dari Pemerintah dalam hal2 ekonomi, jaitu hal jang pokok2 sadja jang pen

ting-penting dan mana hak2 bagi swasta.

Dalam alam Marhaenisme kekuasaan tentang ekonomi tidak hanja oleh negara saja, jang dijistilahkan dengan etatisme, seperti di Rusia; itu tidak, tetapi djuga bersama2 dengan rakjat, atau dengan swasta. Ekonomi diatur setjara gotong-rojong setjara kekeluargaan ini berarti menghilangkan penindasan atas penguasaan sepihak dan menghilangkan etatisme, menghilangkan staatskapitalisme, tetapi jang ada adalah kehidupan cooperatif collectief, diatur atas asas kekeluargaan.

Dus didalam masjarakat Marhaenis djuga masih dimungkinkan adanja kehidupan swasta. Itu jang dimaksudkan dengan kata2 atau inilah rumusan socio-demokrasi.

Sdr2., dalam kata2 socio-nasionalisme dan socio-demokrasi menurut sedjarahnja sudah terkandung arti pengabdian kepada Tuhan Jang Maha Esa. Karena itulah, Saudara2, dihadapan Panitia Persiapan Kemerdekaan tanggal 1 Djuni 1945 Bung Karno pidato didalam rangka mentjari dasar dan falsafah Negara dan dalam pidato I Djuni itu dielas2 diterangkan oleh Bung Karno pembagian daripada sila2 kita.

Tolak berpikir atau pangkal bertolak untuk mewudjudkan Pantja Sila itu tidak bisa lain dinilaian analisanja adalah datang dari pada socio-nasionalisme dan socio-demokrasi.

Pak Jamin didalam Seminar Pantja Sila di Jogja tahun '59 sudah menjatakan bahwa kalau kita ingin mengetahui dari mana datangnja Pantja Sila, kita harus kembali kepada socio-nasionalisme.

Saudara2 boleh buka buku itu. Ada dirumah tidak saja bawa buku itu, sudah terlalu banjak ini. Sebab socio-nasionalisme ini kalau dipetjah terdjadi daripada socialisme dan nasionalisme. Gabungan daripada sosialisme dan nasionalisme.

Atau socio-nasionalisme hendaknja diartikan jaitu Nasionalisme jang berdasarkan kemasjarakatan dan kemanusiaan. Karena itulah maka timbul didalam Pemantja Sila, pengertian Socio Nasionalisme itu djika dipetjah, mendjadi kemanusiaan dan kebangsaan, perikemanusiaan dan perikebangsaan itu dari Socio-Nasionalisme. Dus Socio-Nasionalisme bisa dipetjahkan mendjadi Sosialisme dan Nasionalisme; atau Nasionalisme dan Internasionalisme. Dan kalau kita bitjara tentang Internasionalisme dalam artian ini, dan Sosialisme dalam artian ini, itu dimaksudkan adalah Pri pergaulan hidup manusia atau pri kemanusiaan. Dan nasionalismenja sendiri, adalah kebangsaan i sudah sila kedua dan ketiga, Lalu Socio Demokrasi adalah demokrasi jang meliputi politik-economische demokratie, demokrasi politik dan ekonomi. Disini dikandung dalam Socio demokrasi itu jaitu Demokrasi jang sadar akan kemasjarakatan, akan kehidupan manusia didalam pergaulan hidup, dalam masjarakat dan karena itu lah maka disini dipetjah mendjadi dua, jaitu demokrasi didalam arti kerakjatan jang sempurna jaitu kerakjatan jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan.

Tetapi ini tidak sempurna kalau tidak digandeng dengan kesedjahteraan hidup didalam masjarakat dan karena itu adalah sila kesedjahteraan sosial, Keadilan sosial.

Dus pemetjahan dari Socio-Nasionalisme mendjadi prikemanusiaan dan kebangsaan, pemetjahan dari Sosio-Demokrasi adalah kerakjatan dan kesedjahteraan sosial. Dan Ketuhanan ini, jaitu jang diambil dari sedjarah tadi jang sudah saja terangkan, dan tjita2 semula jang sebelumnja sudah ter

kandung djuga didalam kata2 Sosio itu jang dianggap logika dan didasarkan atas pandangan hidup kerohanian dari bangsa Indonesia jang tidak bisa lain selain dari pada Ke-Tuhanan, maka djadilah, timbullah Sila Pertama; jang dalam pidato 1 Djuni mula2 Sila ke-5, tapi kemudian dirobah men djadi Sila Pertama dalam consensus nasio nal dari tokoh2 Nasional, jakni Ketuhanan Jang Maha Esa.

dalam hal ini, Bung Karno itu seorang Mus lim, atau seorang beragama, maaf, seorang beragama. Sebab memang beliau sendiri di sini sudah mendjelaskan dengan tandas; pertjaja atau tidak, terserah, tetapi ini sudah ditulis.

Kenjataan, beliau mengatakan ; "kalau saja mimpi maka dengan mimpi itu saja rasa ini mimpi, mimpi betul, biasanja kee sokan harinja terdjadi; bagi lain orang mungkin lain. Barangkali terdjadinja itu lain bulan dan sebagainja. Bagi saja, prak tek saja kalau saja sudah mimpi dan saja betul ini bukan mimpi2an kontan keesokan harinja terdjadi. Hal2 jang sematjam itu memberikan kejakinan kepada saja, bahwa Tuhan ada. 'Beliau mengalami' kalau ti dak memasukkan sila ini, jaitu Sila Ketu hanan, kalau tidak memasukkan sila ini, kita kehilangan salah satu leitstar jang utama.

Saja ingin mengoreksi kata2 leitstar ini. Leit itu bahasa Djerman star adalah baha sa Inggris. Ini Djerman dikawinkan de ngan Inggris. Tetapi karena Bung Karno itu seorang agitator tidak perduli pada ba hasa. Saja akan membetulkan leitstar ini sebetulnja harus leitstren atau guidingstar kalau mau Bahasa Inggrisnja, tetapi ka lau bahasa Djerman mesti Leitstern. Kalau kita tidak memasukkan sila Ketuhanan ini kita kehilangan salah satu leitstar jang utama; sebab kepertjajaan utama untuk mendjadi satu bangsa jang mengedjar per baikan. Bukan sadja media statis; tetapi djuga leitstar dinamis menuntut kepada ki ta supaja element ke Tuhanan ini dima - sukkan.

Dan itulah sebabnja maka didalam Pan tjasila element ke Tuhanan ini dimasuk kan dengan njata dan tegas. Bung Karno memperdjuangkan sila Ke Tuhaan itu dima sukkan didalam Pantjasila.

Sdr2, demikianlah Pantjasila. Dus dengan Marhaenisme jang dirumuskan dengan sosio nasionalisme dan sosio-demokrasi terutama sampai kepada tgl. 1 Djuni. Saja tidak akan membitjarakan kepada Sdr2 apakah Bung Karno ini berunding dengan kawan2 untuk membitjarakan atau mentjetuskan Pantjasila ini? Saja tidak tahu. Waktu itu saja masih muda, itu waktu baru u- mur saja 37. Itu masih muda, dan saja waktu itu hanja sebagai seorang anggota Barisan Pelopor Istimewa. Djadi tidak mem perhatikan tidak ikut didalam Tjuo Sangi in, tidak ikut didalam Panitya Persiapan Kemerdekaan. Saja hanja mendjadi tukang baris waktu itu. Djadi saja tidak tahu. Dja di kalau ada orang sekarang mempersoal kan jang menggali Pantjasila itu bukan Bung Karno sendiri, saja tidak tahu.

Djuga Sdr2 tanja nanti kepada saja, Apakah Bung Karno barangkali berunding dengan lain2. Itu saja tidak tahu dalam fakta sedjarah Bung Karno pidato pada tgl. 1 Djuni dihadapan Panitya Persiapan Ke merdekaan dan bahwa kata2 Pantjasila be liau sendiri mengakui itu atas Bantuan ka- wan beliau, kawan ahli bahasa beliau. Sia pa jang dimaksudkan, saja tidak tahu. Saja tidak mau bikin sedjarah sendiri.

Kata2 jang beliau semula utjapkan ada lah Pantja Dharma, bukan Pantjasila; te tapi kemudian beliau mendapat bisikan dari salah seorang kawan; siapa itu ti

dak tahu, jaitu Pantjasila. Dan ini jang mendjadi achirnja nama dari ke-5 sila itu didalam bahasa Sanskerta adalah Pantja sila itu djuga bersandarkan kepada kete rangan Pak Yamin almarhum, jaitu dalam Seminar Pantjasila di Jogjakarta, bahwa kalau ingin mengetahui sedjarah Pantjasila ini harus digali, harus kembali kita kepa da sosio nasionalisme, maka saja jakin da lam perkembangan ini dan membatja kese luruhan dari lahirnja Pantjasila itu, jaitu Pantjasila itu adalah socio-nasionalisme, sosio-demokrasi ke Tuhanan.

Karena itulah maka saja mendapat satu kesimpulan dan kita orang PNI mempunjai kejakinan bahwa Marhaenisme jang sudah saja katakan itu sama dengan Pantjasila ditindjau dari segi historis dan segi per kembangannja. Pantjasila ini pada tgl. 18 Agustus, diumumkan setelah dirumuskan di dalam Pembukaan Undang Dasar '45 dan idee2nja dituangkan didalam pasal2 Un dang2 Dasar '45 itu sendiri jang Sdr2 lihat sekarang. Baik dalam Pembukaannja mau pun pasal2nja atau batang tubuhnja dari pada UUD '45 itu, bagi Marhaenisme sama sekali tidak ada pertentangan. Marhaenis me sudah ada didalam Undang2 Dasar '45. Pantjasila sudah berkembang didalam Un dang2 Dasar '45. Pantjasila sudah berkem bang didalam Undang2 Dasar '45.

Demikianlah, Sdr2, sekedar untuk men djawab itu tadi mengenai isme dengan Pan tjasila.

Keterangan saja ini adalah djawaban pa da pertama kali, apakah benar, sampai di manakah benarnja difinisi bahwa Marhaen isme adalah Marxisme jang diterapkan di Indonesia dan sebagainja. Ini sudah saja djawab disini. Bahwa Marhaenisme apakah betul sama dengan Pantjasila, sudah sa ja berikan sekaligus didalam soal ini, ser ba singkat.

Djadi dengan demikian Sdr2 Marhaenisme bukan Marxisme jang diterapkan di Indo nesia. Marhaenisme bukan Marxisme, teta pi Marhaenisme adalah sosio-Nasionalisme sosio-demokrasi dan ke Tuhanan jang Ma- ha Esa, jang adalah sama dengan Pantja sila.

Demikianlah, Sdr. Pimpinan, ini uraian dari saja dan untuk menetapi perintah su rat itu saja setudju dengan sdr2 menshors dulu pembitjaraan dan selandjutnja nanti kalau dipandang perlu mengadakan diskusi. si.

Terima kasih.
(Diutjapkan dalam Kursus Kader Wanita Marhaenis DCI Djaja 1968)